

وَاذْكُرُوا الصَّلَاةَ لَكُمْ فَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ يَلْعَنُونَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag.

# FIKIH

Bagian Kedua

Munakahat, Mawaris, Jinayah  
dan Siyasah

Dilengkapi dengan hadis-hadis  
yang bersanad sampai kepada  
Nabi Muhammad saw.





# FIKIH II

Munakahat, Mawaris, Jinayah,  
Siyasah

*Dilengkapi dengan hadis-hadis yang bersanad  
sampai kepada Rasulullah saw.*

Oleh:

DR. ALI IMRAN SINAGA, M.Ag.



**FIKIH II**  
**Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasah**

Penulis: Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag.

Copyright © 2011, Pada Penulis.  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Ali Said Nasution  
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

**Citapustaka Media Perintis**

Jl. Cijotang Indah II No. 18-A Bandung

Telp. (022) 82523903

E-mail: citapustaka@gmail.com

Contact person: 08126516306-08562102089

Cetakan pertama: September 2011

Cetakan kedua: September 2013

ISBN 978-602-8826-91-4

Didistribusikan oleh:

**Cv. Perdana Mulya Sarana**

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-7347756, 77151020 Faks. 061-7347756

E-mail: asrulmedan@gmail.com

Contact person: 08126516306

Alhamdulillah  
Fikih II ini berkai

Semula Buku  
yang diperuntukk  
IAIN Sumatera Ut  
13 tahun lamany  
dilakukan diman  
kajian pembahas

Buku Fikih II  
dan siyasah. Kele  
kitab Fiqih lain a  
riwayatnya kepad  
yang berminat u  
itu, matan hadis y

Meskipun d  
pihak-pihak lain s  
pengetahuan dan

Mudah-mud  
dan menjadi iba  
demi kesempurn  
seraya mengucap



# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vi
 <b>BAB I</b>	
<b>MUNAKAHAT</b> .....	1
A. Nikah .....	1
B. Perwalian .....	11
C. <i>Al-Muharramat</i> (Wanita-wanita yang Haram Dinikahi) .....	17
D. Putusnya Perkawinan dan Akibat-akibatnya .....	21
 <b>BAB II</b>	
<b>MAWARIS</b> .....	36
A. Dalil Hukum .....	36
B. Sebab-sebab Kewarisan dan Sebab-sebab Terhalangnya .....	39
C. Ahli Waris dari Golongan Laki-laki dan Perempuan .....	48
D. <i>Ashab al-Furud</i> dan Bagian-bagiannya serta Asabah .....	54
E. Hijab .....	62
F. Metode Pembagian Harta Warisan dan contoh-contohnya ..	64
 <b>BAB III</b>	
<b>JINAYAH</b> .....	84
A. <i>Qisas</i> .....	85
B. <i>Hudud</i> .....	90
1. Murtad .....	91
2. Bagyu. ....	93



3. Hirabah .....	97
4. Hukuman zina. ....	98
5. Qazf (menuduh berzina). ....	104
6. Minum khamar .....	105
7. Pencurian .....	107
<b>C. Ta'zir</b> .....	113
1. Definisi dan Dalil-dalil Ta'zîr .....	113
2. Tujuan Hukuman Ta'zîr. ....	124
3. Imâm Sebagai Pelaku Ta'zîr. ....	127
4. Seluk-beluk Hukuman Ta'zîr. ....	138

#### **BAB IV**

<b>FIKIH SIYASAH</b> .....	158
<b>A. Pengertian dan Dalil Hukum</b> .....	158
<b>B. Imamah</b> .....	174
<b>C. Ahl al-Hall wa al-'Aqd</b> .....	177

<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	185
----------------------------	-----

#### **Halaman**

v

vi

1

1

11

17

21

36

36

39

48

54

62

64

84

85

90

91

93



# BAB I

## MUNAKAHAT

### A. Nikah

Secara etimologi nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna الضَّمُّ والجَمْعُ, terkadang juga bermakna الضَّمُّ والثَّدَاخُلُ الوَطءُ, terkadang juga bermakna الضَّمُّ والجَمْعُ atau عِبَارَةٌ عَنِ الْوَطءِ وَالْعَقْدِ yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Kata nikah merupakan kata asli syar'iy atau Alquran yang diadopsi oleh bahasa Arab itu sendiri sehingga menjadi kata kebiasaan bagi kaum muslimin untuk menyatakan perkawinan. Berdasarkan ini, maka nikah selalu diorientasikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan suatu akad yang sah.

Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanaakhati al-asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin) karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke sela rumpun yang lain.<sup>1</sup>

Sementara itu, menurut terminologinya nikah adalah

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمِهِمَا

Nikah adalah suatu aqad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan mesum (*wath'*) dengan (terlebih dahulu mengucapkan) lafaz nikah atau *tazwij* (perkawinan), atau berjima' (berkumpul) antara keduanya (suami isteri). Dengan kata lain, suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami-isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat*.

Nikah merupakan istilah syara' dan dianggap sesuatu yang sakral dalam hubungan suami-isteri ditinjau dari banyak sisi. Apakah sisi hubungan



seksual, hubungan pemenuhan kebutuhan makan dan minum, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, seni dan hiburan maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan dalam hidup berumah-tangga.

Pernikahan merupakan tindakan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: 'Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Pernikahan itu sendiri berdasarkan situasi dan kondisinya dapat berubah hukumnya yang dikelompokkan menjadi lima bentuk, yaitu:

1. Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. Hal ini dikarenakan menjauhkan diri dari sesuatu yang haram adalah wajib, sedangkan kondisi itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan pernikahan.
2. Sunnat bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat perzinahan.
3. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon isterinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
4. Makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja calon isterinya. Dengan kata lain, sekalipun tidak merugikan calon isteri ditinjau dari sisi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan,

dan papan k  
punyai ke  
makruh.

5. Wajib bagi  
wajibkan se  
haramkan u

Nikah sangat  
dini bermakna b  
di dalamnya sepe  
ayang menyaya  
perempuan yang d  
diperlukan rukun  
adil sebagai b

1. Adanya calon  
calon pangan

1) Keduanya

2) Keduanya  
untuk di

3) Keduanya

4) Keduanya

5) Keduanya  
dibenark

6) Calon su  
orang, se  
lain atau

7) Calon iste  
sabda Ra

رَوَى عَنْ زَيْدٍ

عَامِرٌ عَلَى

خَوِ الْمُؤْمِنِ



dan papan karena kemampuan ekonomi tinggi, tetapi tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat tetap dipandang sebagai yang makruh.

5. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.<sup>2</sup>

Nikah sangat dianjurkan oleh agama Islam. Kalimat 'sangat dianjurkan' di sini bermakna bahwa pernikahan dapat mendatangkan banyak kebaikan di dalamnya seperti saling tolong-menolong di dalam keluarga dan saling sayang-menyayangi. Bahkan, dapat menghindarkan bentuk-bentuk perzinahan yang dilarang agama Islam. Untuk itulah, dalam pernikahan diperlukan rukun-rukun tertentu. Adapun rukun-rukun nikah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Kedua calon pengantin ini harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:
  - 1) Keduanya harus Muslim atau Muslimah.
  - 2) Keduanya tidak ada hubungan *muhrum* (orang yang diharamkan untuk dinikahi).
  - 3) Keduanya tidak dipaksa melakukan pernikahan.
  - 4) Keduanya tidak dalam keadaan umrah atau haji.
  - 5) Keduanya memiliki jenis kelamin yang berbeda (untuk itu, tidak dibenarkan pernikahan lesbian dan homoseksual/gays).
  - 6) Calon suami tidak dalam keadaan mempunyai isteri empat orang, sedangkan calon isteri tidak sedang status suami orang lain atau telah habis masa 'iddahnya.
  - 7) Calon isteri tidak sedang dalam pinangan orang lain sebagaimana sabda Rasulullah saw. di bawah ini,

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ غَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ

فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَّاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ  
حَتَّى يَذَرَ

Artinya; "Orang mukmin adalah saudara orang mukmin yang lain, maka tidak halal bagi seorang mukmin meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh saudaranya sehingga nyata sudah ditinggalkannya" (H.R. Shahih Muslim Kitab an-Nikah no. 2536).

Untuk kasus di atas ini hanya tindakan pengharaman saja. Namun, jika pernikahan tetap berlangsung meskipun dalam pinangan orang lain masih juga tetap dianggap sah.

2. Wali semata-mata hanya dari pihak calon pengantin wanita sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang berbunyi,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ جَعْفَرِ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

Artinya: "Barangsiapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah saw. mengucapkannya tiga kali. Lalu, jika seorang laki-laki telah menikahinya, maka wajib membayar maharnya. Jika kamu saling berselisih, maka sultan (penguasa)-lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali" (H.R. Sunan Abu Daud Kitab an-Nikah no. 1784).

Hal ini diperkuat dengan hadis beliau yang lain,

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا



هَيْشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Artinya: "Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri sebab sesungguhnya wanita yang berzina tersebut adalah yang menikahkan dirinya sendiri" (H.R. Sunan Ibnu Majah Kitab an-Nikah no. 1872).

Wali pernikahan ini harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Laki-laki muslim.
  2. Mempunyai hubungan (*nasab*) perwalian dengan calon pengantin wanita.
  3. Balig dan berakal sehat.
  4. Tidak dalam keadaan ihram (haji atau umrah).
3. Dua orang saksi sebagaimana sabda Rasulullah saw. di bawah ini,

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ رَفَعَ عَبْدُ الْأَعْلَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ وَأَوْفَقَهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهَذَا أَصَحُّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَا رَوَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا وَرَوَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

عُرُوبَةَ نَحْوِ هَذَا مَوْقُوفًا وَفِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ مَنْ مَضَى مِنْهُمْ إِلَّا قَوْمًا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ إِذَا أَعْلَنُوا ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ هَكَذَا قَالَ إِسْحَقُ فِيمَا حَكَى عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ

Artinya: "Sesuatu yang melampaui batas dinikahkan mereka (wanita-wanita) tanpa ada saksi (bukti)' (H.R. Sunan Tirmizi Kitab an-Nikah 'an Rasulullah no. 1022).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saksi tersebut adalah:

- 1) Laki-laki muslim.
- 2) Balig.
- 3) Tidak ada pemaksaan baginya.
- 4) Tidak sedang dalam keadaan ihram.
- 5) Saksi tidak menderita tuna-netra, tuna-wicara, tuna-rungu, atau sudah uzur.
- 6) Merdeka bukan status sebagai budak.
- 7) Memahami bahasa yang dipergunakan sebagai ijab-qabul.
- 8) Adil atau tidak *fasiq*.

4. Lafaz akad nikah. Lafaz ini berbentuk *ijab* (dari wali calon isteri) dan *qabul* (dari calon suami) yang saling beriringan satu sama lain.



Lafaz ini harus berada dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*) dan waktu yang sama yang kesemua rukun-rukun yang lain dapat menyaksikannya. Seperti kedua pengantin, wali, dan kedua saksi harus berada di sana selama proses *ijab* dan *qabul*. Hal ini untuk menghindari keraguan atau kesamaran upacara yang sakral ini jika dilakukan dengan pernikahan melalui telepon atau televisi secara langsung yang kedua pengantin berada jarak jauh atau tidak berada di dalam satu majelis.

Untuk itu, syarat-syarat lafazh akad nikah ini adalah:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon suami.
3. Memakai kata-kata nikah atau *tazwij*.
4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambung.
5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
6. Orang-orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang dalam *ihram*.
7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu minimal dihadiri oleh empat orang yaitu calon suami dan wakilnya, calon isteri dan walinya, dan dua orang saksi.

Selanjutnya, mahar yang wajib diberikan calon suami kepada calon isterinya dalam bentuk uang, perhiasan, ataupun barang-barang lainnya. Hal ini dinyatakan Allah Swt. dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا



Artinya: 'Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya'.

Sebenarnya, mahar (*shadaqatihinna* adalah suatu istilah yang digunakan Alquran dan surat an-Nisa' ayat 4)) ini wajib bagi laki-laki, tetapi

bukanlah menjadi rukun dari pernikahan dan jika tidak disebutkan pada waktu akad, pernikahan itu masih dianggap sah. Islam tidak pernah menetapkan berapa besar jumlah mahar yang diberikan kepada isteri, tetapi ini sangat bergantung kerelaan calon isteri untuk menerimanya. Untuk itu, diupayakan mahar berdasarkan kemampuan calon suami. Jika calon suami belum dapat memberikannya ketika pernikahan dapat diupayakan dengan jalan mengutang.<sup>3</sup>

Namun, jika suami telah menceraikan isterinya sebelum ber-*jima'* (*coitus*) dengan isterinya, maka suami wajib membayar  $\frac{1}{2}$  dari mahar jika jumlah mahar itu telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah: 237,

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: 'Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan'.

Kemudian, jika suami meninggal dunia sebelum bercampur dengan isterinya, sedangkan mahar belum dibayar, maka isteri berhak sepenuhnya terhadap mahar yang diambil dari harta peninggalan suaminya. Hal ini dinyatakan dalam suatu hadis,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ



مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيِّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ امْرَأَةً مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فَفَرَّحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ قَالُوا لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ لَكَانَتْ الْحُكْمُ فِيمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ بِمِصْرَ بَعْدَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ وَقَالَ بِحَدِيثِ بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ

Artinya: "Dari Alqamah berkata, 'Seorang perempuan telah menikah dengan seorang laki-laki. Lalu, laki-laki itu mati sebelum bercampur dengan isterinya itu dan maharnya pun belum ditentukan banyaknya. Alqamah berkata, 'Mereka mengadukan hal tersebut kepada 'Abdullah bin Mas'ud. Lalu, 'Abdullah bin Mas'ud berpendapat, 'Perempuan itu berhak mengambil mahar misil sepenuhnya dan ia berhak mendapat pusaka dan wajib ber'iddah. Lalu, ketika itu Ma'qil ibn Sinan al-Asyja'iy menyaksikan bahwa sesungguhnya Nabi saw. telah memutuskan terhadap Barwa' binti Waasyiq seperti keputusan yang dilakukan oleh 'Abdullah bin Mas'ud tadi. Kemudian, Ibnu Mas'ud pun senang mendengarnya" (H.R. Sunan Tirmizi Kitab an-Nikah 'an Rasulillah no. 1064).

Sementara itu, terkadang terjadi pernikahan yang terindikasi mengarah pada sesuatu yang terlarang dalam Islam, seperti sebagai berikut:



1. *Nikah Mut'ah/nikah muqaqqat/nikah munqathi'* adalah nikah untuk jangka waktu tertentu (*temporary marriage*). Lamanya pernikahan tergantung pada kesepakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, misalnya sehari, seminggu, sebulan, setahun, dan seterusnya. Ulama sepakat mengharamkan pernikahan seperti ini.
2. *Nikah Syigar* adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan pada masa jahiliyah yang hakikatnya merupakan pertukaran wanita dari satu laki-laki secara timbal-balik. Dengan kata lain, tukar-menukar wanita dari suatu perkawinan. *Syighar* meniadakan mahar sebagai suatu kewajiban dan menggantikannya dengan kehormatan wanita, padahal Islam berusaha mengangkat derajat dan martabat wanita. Wujud dari *syighar* ini adalah seorang laki-laki memberikan saudara wanitanya atau anak perempuannya, atau anak perempuan di bawah perwaliannya kepada seorang laki-laki dengan imbalan diterimanya anak perempuan atau saudara perempuan di bawah perwaliannya tanpa memberinya mahar. Praktek ini pernah dilakukan pada zaman Jahiliyah.
3. *Nikah Tahlil* yaitu suatu bentuk perkawinan yang semata-mata menghalalkan kembalinya suami kepada mantan isterinya akibat hak ruju' setelah talak tiga. Praktek ini juga dilakukan pada zaman Jahiliyah.
4. Kawin gadai atau kawin pinjam merupakan kebiasaan orang Arab sebelum Islam dimana seorang suami menyuruh atau mengizinkan isterinya untuk bergaul dengan orang-orang yang terpendang (bangsawan). Tujuannya adalah mencari bibit unggul dari hasil hubungan tersebut. Sementara itu, suami berpisah dengan isterinya sampai isterinya hamil dan berkumpul kembali jika dia berkenan. Adapun anak yang lahir dari hasil hubungan seksual dengan orang-orang ternama tersebut dinisbahkan kepada anak suami-isteri tersebut.
5. Poliandri artinya banyak suami. Artinya, adalah seorang wanita yang digauli oleh sejumlah laki-laki dalam kurun/waktu yang sama. Jika wanita itu hamil dan melahirkan, ia mengumpulkan laki-laki yang secara rutin menggaullinya. Untuk menetapkan siapa ayah si anak tersebut, ia menunjuk salah seorang di antara mereka. Biasanya, poliandri ini terjadi karena rasio/libido seks wanita tersebut yang berlebihan, tidak mempunyai kecemburuan seks, harta yang berlimpah,

mencegah l  
dari polian  
digauli oleh  
yang disebu  
6. Kawin wari  
anak menga  
dianggap sel  
nya tanpa h  
isteri ayahn  
waris juga  
lain atau me  
melalui Fir

إِنَّهُ كَانَ

Artinya  
telah dikaw  
Sesungguh  
buruk jala

Semua be  
karena merupa  
siaan. Perkawin  
diri pribadi mu  
agama itu sen

## B. Perwali

### 1. Urutan w

Sebagaim  
adalah seoran  
memberikan iz  
perwaliannya.  
jelasnya siapa  
Kompilasi Huk  
Tahun 1991 Ba



mencegah hartanya berpindah ke tangan orang lain. Bentuk lain dari poliandri ini adalah wanita-wanita yang tidak menolak untuk digauli oleh siapapun dengan imbalan atau tidak. Bentuk inilah yang disebut dengan prostitusi atau pelacuran.

6. Kawin waris merupakan kebiasaan Arab Jahiliyah yaitu seorang anak mengawini mantan isteri ayahnya. Isteri-isteri mendiang ayahnya dianggap sebagai warisan seperti harta-benda. Anak boleh mengawininya tanpa harus membayar mahar. Bahkan, dia boleh mengawinkan isteri ayahnya kepada orang lain dengan menerima maharnya. Ahli waris juga dapat mencegah isteri ayahnya menikah dengan orang lain atau membiarkannya menjanda seumur hidupnya.<sup>4</sup> Hal ini dilarang melalui Firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 22 berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: 22. dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Semua bentuk perkawinan tersebut dilarang oleh agama Islam karena merupakan perbuatan yang tidak layak menurut etika kemanusiaan. Perkawinan semacam itu dapat menimbulkan efek negatif kepada diri pribadi muslim/muslimah, lingkungan masyarakat, negara, bahkan agama itu sendiri.

## B. Perwalian.

### 1. Urutan wali.

Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa wali dalam pernikahan adalah seorang muslim yang mempunyai hubungan nasab yang memberikan izin pernikahan calon pengantin wanita yang dibawah perwaliannya. Wali merupakan rukun dalam pernikahan. Untuk lebih jelasnya siapa-siapa yang dapat dijadikan wali dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Bab IV pasal 19 ayat 21 di bawah ini:

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.<sup>5</sup>

Wali *nasab* berdasarkan empat kelompok di atas dipilih secara berurutan kedudukannya. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat atau tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Perpindahan hak menjadi wali akan terjadi antara satu dengan yang lain jika disebabkan adanya persengkataan antara sesama wali, ketiadaan wali atau tidak berada di tempat ketika ijab kabul berlangsung.

Apabila seluruh wali-wali yang disebutkan di atas tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali seperti tidak ada lagi (meninggal dunia), tidak bisa hadir, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, ataupun 'adil (enggan), maka yang bertindak menjadi wali adalah wali hakim sebagai mana sabda Rasulullah saw. di bawah ini,

حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّي وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

Artinya: 'Tidak sah nikah tanpa wali dan sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali' (H.R. Musnad Ahmad Kitab wa Musnad Bani Hasyim no. 2147).

Secara yuridis formal yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali yang ditunjuk berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kementerian Agama Republik Indonesia. Pendelegasian ini telah diatur oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kementerian Agama Republik Indonesia di seluruh daerah.



## 2. Jenis wali.

Berdasarkan penerangan di atas, diperoleh keterangan bahwa wali nikah memiliki dua jenis yaitu wali *nasab* dan wali hakim.

Wali nasab adalah lelaki muslim yang mempunyai hubungan darah/keturunan dengan calon pengantin wanita sebagaimana diutarakan di atas. Wali ini tidak disyaratkan haruslah yang adil sebab orang yang durhaka tidak kehilangan haknya menjadi wali dalam pernikahan kecuali jika kedurhakaannya telah melampaui batas-batas kewajaran atau kesopanan yang berat.

Jenis kedua wali ini adalah wali hakim yang tidak memiliki hubungan darah/keturunan dengan calon pengantin wanita. Wali hakim berhak menikahkan kedua mempelai jika seluruh wali-wali yang disebutkan di atas tidak ada, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, *adhal* (enggan), ataupun anak (hasil) zina.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 berbunyi anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Pasal 100 berbunyi anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Untuk itu, anak hasil perzinahan tidak berhak berwali kepada 'lelaki' yang menikahi ibunya ataupun kawin hamil. Hal ini dikarenakan wali haruslah yang mempunyai hubungan nasab dengan wanita yang bersangkutan (pasal 19, 20, dan 21). Ketika wali nasab sudah tidak ada, maka wali hakim-lah yang berhak menikahkan seorang wanita yang tidak mempunyai wali nasab.

Keberadaan wali hakim berdasarkan penunjukkan atau pengangkatan pemerintah sebagaimana dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah berdasarkan surat keputusan Pengadilan Agama setempat. Wali hakim tidak sembarang diangkat, oleh orang lain, tetapi berdasarkan sistem legalitas negara sebagaimana dijelaskan sebelumnya.<sup>6</sup>

## 3. Karakteristik wali nikah.

Jika ditinjau dari sisi karakteristiknya, wali nikah itu terbagi atas:

- a. Wali *aqrab* (dekat) yaitu wali yang dekat nasabnya dengan calon pengantin wanita seperti ayah dan kakek kandung yang mempunyai

kekuasaan mutlak terhadap anak atau cucu perempuan yang akan dinikahkan mereka. Kebalikannya adalah Wali *ab'ad* (jauh) yaitu wali yang dianggap jauh nasabnya dari posisi ayah atau kakek kandung tersebut. Mereka adalah urutan sistematis wali selain ayah dan kakek tersebut Wali *aqrab* lebih didahulukan haknya (dalam menikahkan wanita yang menjadi perwaliannya) daripada wali *ab'ad* ini.

- b. Wali *mujbir* yaitu seorang wali yang berhak menikahkan orang yang diwalikannya tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu. Suka atau tidak suka wanita yang akan dinikahkannya tersebut. Seperti anak-anak, kurang akal, ataupun orang gila, tidak *sekufu* (tidak sederajat seperti bangsa, agama, akhlak, keturunan, pekerjaan, dan kesehatan). Sikap wali *mujbir* tidak berlaku terhadap gadis normal dan 'matang' sebab wali harus menanyakan terlebih dahulu kesediaannya terhadap calon laki-laki yang ditawarkan kepadanya. Artinya, tidak ada pemaksaan di dalamnya sebagaimana sabda Rasulullah saw. di bawah ini,

و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَرُبَّمَا قَالَ وَصَمَّتُهَا إِقْرَارُهَا

Artinya: "Janda lebih berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya dan gadis hendaknya diminta izinnnya dalam perkara dirinya. Dan izinnnya adalah diamnya" (H.R. Shahih Muslim Kitab an-Nikah no. 2546).

Hal ini berlaku juga bagi janda yang tidak perlu meminta pendapat walinya, tetapi wali cukup hanya menikahkan dirinya. Wali *mujbir* ini hanya dibolehkan dilakukan seorang ayah kepada putrinya atau kakek kepada cucunya. Selain itu, wali-wali lain tidak dapat dikatakan

wali mu  
dapat i  
kakek  
tersebu  
yaitu s

- 1) Tid  
kep
- 2) He  
da  
ke
- 3) Ma
- 4) Tid  
ma
- 5) Tid  
bal  
lak  
sel  
ke

- c. Wali 'a  
calon p  
sebab n  
priany

يُؤَسَّ  
فِيهِ قَالَ  
بِخَطْبِهَا  
وَاللَّهُ  
تَرْجِعَ  
لِاللَّهِ

Art



wali *mujbir*. Wali-wali lain cukup menikahkan mereka jika telah mendapat izin dari calon mempelai wanita. Keistimewaan ayah atau kakek kandung tersebut dalam memaksa calon pengantin wanita tersebut akan terpenuhi jika telah memenuhi beberapa syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak ada permusuhan antara bapak kepada anak atau kakek kepada cucu.
- 2) Hendaknya dinikahkan dengan orang yang sederajat (*sekufu'*) dalam hal bangsa, agama, akhlak, keturunan, pekerjaan ataupun kesehatan).
- 3) Maharnya tidak kurang dari mahar *misil* (sebanding).
- 4) Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar.
- 5) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) calon pengantin wanita dalam pergaulannya dengan laki-laki itu. Misalnya, orang itu buta atau sudah sangat tua sehingga kemungkinan jauh dari harapan akan mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahannya.

c. Wali *'adhlal* adalah wali yang enggan untuk menjadi wali pernikahan calon pengantin wanita yang diwalikan kepadanya karena sesuatu sebab misalnya 'keberatan' atau enggan terhadap status calon pengantin prianya sebagaimana sabda Rasulullah saw. di bawah ini,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أَخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوِّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتُهَا ثُمَّ جِئْتُ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوِّجْهَا إِيَّاهُ

Artinya: "Dari Ma'qal ibn Yasar berkata, 'Saya telah menikahkan



saudara saya dengan seseorang, kemudian diceraikannya. Setelah habis masa 'iddahnya, laki-laki itu datang meminang saudara saya itu kembali. Saya katakan kepadanya, 'Saya telah menikahkan engkau dengan segala hormat, kemudian engkau ceraikan, sekarang engkau datang meminangnya. Demi Allah, saya tidak akan mengembalikan saudara saya kepadamu. Keadaan laki-laki itu baik dan perempuan itu ingin kembali kepadanya. Lalu, dengan kejadian ini datanglah wahyu Allah, 'Dan apabila kamu telah menceraikan perempuan, kemudian habis 'iddahnya, maka janganlah kamu keberatan menikahkan mereka dengan bekas suaminya" (al-Baqarah: 232). Ma'qal berkata, 'Apakah yang akan aku lakukan sekarang Ya Rasulullah ?. Lantas, Rasulullah saw, berkata, 'Nikahkanlah dia (saudaramu itu) dengan laki-laki itu" (H.R. Shahih Bukhari Kitab an-Nikah no. 4735).

- d. Wali *gaib* adalah wali yang tidak bisa hadir dalam acara pernikahan *ijab* dan *qabul* seperti tempat tinggal yang sangat jauh, kondisi kesehatan wali yang terganggu, ataupun kesibukan tertentu. Untuk itu, wali yang berhak menikahkan adalah wali yang terdekat dari calon pengantin berdasarkan urutan-urutan wali yang disebutkan di atas.
- e. Wali yang menikahi *maula*-nya. Laki-laki boleh mengawini perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa menunggu persetujuan wali lainnya dengan syarat tidak *mahram*-nya dan perempuan itu rela menjadi isterinya. Hal ini terjadi dalam suatu hadis di bawah ini,

و حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَعَبْدِ  
الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي  
ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا  
أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ  
الْعُبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ  
حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّابِ عَنْ أَنَسٍ  
ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ  
الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّابِ عَنْ

صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَقَهَا

قَهَا عَتَقَهَا

Artinya: "Sesungguhnya  
lalu dijadikan ist  
maharnya serta m  
Shahih Muslim K

### C. Al-Muharramat

Al-Muharramat  
menyebutkan wanita  
laki sepanjang hidup  
tidak bisa ditawar-ta

Alquran dalam su  
wanita yang haram d

قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
كُمُ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ  
بِتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْتَكُمْ  
كُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ  
بِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
بِ مِنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ  
بِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ  
كُمُ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
وَهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةٌ  
إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا



أَنْسِ كُلَّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا  
صَدَاقَهَا وَفِي حَدِيثٍ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah saw. telah memerdekakan Shafiyah lalu dijadikan isteri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya serta mengadakan walimah dengan seekor kambing" (H.R. Shahih Muslim Kitab an-Nikah no. 2562)

### C. Al-Muharramat.

Al-Muharramat merupakan suatu istilah yang ditujukan untuk menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki sepanjang hidupnya. Keharaman ini sesuatu yang mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam agama Islam.

Alquran dalam surat an-Nisa' ayat 22 - 24 telah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi tersebut, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ  
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ  
وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ  
مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ  
سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾ \* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ ﴿٢٤﴾ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: '(22). Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (23). diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (24). dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.'

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, maka wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*Tahrim mu'abbad*).
  - a. Berhubungan dengan *nasab*.
    - 1) Dengan seorang wanita yang telah melahirkan dirinya, atau silsilah keturunan ke atasnya, seperti ibu kandung, ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak dan terus ke atas.
    - 2) Dengan seorang wanita keturunan dari ayah atau ibunya. Seperti semua perempuan yang lahir dari ibu bapaknya atau salah satunya.

- 3) Dengan seperti atau ka maupun bibi dari
- 4) Dengan dilahirkan nya sep
- b. Berhubungan
  - 1) Dengan seperti ib dari pih
  - 2) Dengan runkann
  - 3) Dengan putusny sebelum yang ibu puannya
  - 4) Dengan anak kar perempuan
- c. Berhubungan
  - 1) Dengan garis lurus dan sete
  - 2) Dengan lurus ke putrinya,
  - 3) Dengan ke bawah
  - 4) Dengan w
  - 5) Dengan a
2. Wanita-wanita y (*Tahrim mu'aqqat*)



- 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan dirinya, seperti semua perempuan yang menjadi saudara ayahnya atau kakeknya baik yang lahir dari kakek dan neneknya maupun dari salah satunya. Termasuk dalam hal ini adalah bibi dari pihak ibu dan saudara perempuan bapak dari ibunya.
  - 4) Dengan wanita yang dilahirkan isterinya dan wanita yang dilahirkan isteri saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya seperti anak perempuannya dan keponakannya.
  - b. Berhubungan dengan perkawinan (*mus??aharah*).
    - 1) Dengan wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya, seperti ibu isteri (mertua), neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah dan terus ke atas.
    - 2) Dengan keturunan wanita bekas isteri orang yang menuhinkannya, seperti ibu tirinya.
    - 3) Dengan wanita keturunan isteri atau bekas isterinya kecuali putusnnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu sebelum persetubuhan/digauli, seperti anak tiri perempuan yang ibunya sudah disetubuhi/digauli, cucu-cucu perempuannnya, dan terus ke bawah.
    - 4) Dengan wanita isteri atau bekas keturunannya, seperti isteri anak kandung, isteri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuann, dan seterusnya.
  - c. Berhubungan dengan sesusuan.<sup>7</sup>
    - 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, seperti ibu susunya, ibu dari ibu susunya, dan seterusnya.
    - 2) Dengan wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, seperti saudara perempuan sesusuannya, putrinya, dan cucunya.
    - 3) Dengan wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
    - 4) Dengan wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
    - 5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.
2. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu (*Tahrim mu'aqqat*).

- a. Wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Wanita yang masih berada dalam masa 'iddah dengan pria lain.
- c. Wanita yang masih kafir/tidak beragama Islam.
- d. Wanita yang adik kandung, bibi, kemenakan dari isterinya seayah atau seibu.
- e. Wanita yang telah ditalaq tiga kali.
- f. Wanita yang sedang dalam ihram.
- g. Wanita yang telah di-li'an (dilaknat) suaminya.<sup>8</sup>
- h. Wanita pezina sebelum bertaubat.

Wanita pezina haram dinikahi oleh laki-laki yang baik (bukan pezina). Hal ini dikarenakan suatu riwayat dari Murtsid Abi Murtsid meminta izin kepada Rasulullah saw untuk mengawini seorang wanita pezina bernama 'Annaq yang di masa Jahiliyah dahulu pernah menjalin hubungan dengannya. Lalu, Nabi Muhammad saw berpaling darinya sampai turun Firman Allah Swt dalam surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi;

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: 3. laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin<sup>[1028]</sup>.

<sup>[1028]</sup> Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

Jika wanita pezina itu telah bertaubat boleh dikawini karena taubatnya itu sudah menjadi wanita yang baik. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 68 – 70;

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ

وَعَمِلَ عَمَلًا صُلَحًا

حِيمًا ﴿٦٩﴾

Artinya: 68. dan lain beserta Allah da (membunuhnya) kecu barang siapa yang m (pembalasan) dosa(ny pada hari kiamat da terhina, 70. kecuali or amal saleh; Maka itu dan adalah Allah Ma

## D. Putus perka

### 1. Perceraian / t

Perceraian adal dalam suatu ikatan Perceraian ini disebu

Pada bentuk ya hal seperti; khuluk ( berikan tebusan), fa pasangan bermasala tidak mendekati iste kumpul suami memba 10 orang miskin, me lamanya sebagaimana 89), Zhihar (menyeri Jika ingin berkumpul dekakan seorang bud kan makan 60 orang 4 (empat) kali masin Swt. kalau antara ke peristiwa li'an ini me atau menikah lagi unt perzinaan isterinya d



الْقِيَمَةِ وَتُحْلَدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦٨﴾

Artinya: **68.** dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), **69.** (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina, **70.** kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

## D. Putus perkawinan dan akibat-akibatnya.

### 1. Perceraian / *talaq*.

Perceraian adalah perpisahan (hidup) antara suami dan isteri dalam suatu ikatan pernikahan yang sah karena sesuatu sebab/hal. Perceraian ini disebut juga dengan *talaq*.

Pada bentuk yang sama, *talaq* ini dapat mewujudkan diri dalam hal seperti; *khuluk* (perceraian karena permintaan isteri dengan memberikan tebusan), *fasakh* (pembatalan pernikahan karena salah satu pasangan bermasalah berat seperti gila dan mandul), *ila'* (bersumpah tidak mendekati isteri selama beberapa waktu tertentu jika ingin berkumpul suami membayar *kaffarat* berbentuk memberi makan dan pakaian 10 orang miskin, memerdekakan seorang budak, atau berpuasa tiga hari lamanya sebagaimana yang tertera dalam Alquran surat Al-Maidah: 89), *Zhihar* (menyerupai isterinya dengan punggung ibu kandungnya. Jika ingin berkumpul kembali, suami membayar *kaffarat* seperti memerdekakan seorang budak, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 orang miskin), *li'an* (antara suami dan isteri bersumpah 4 (empat) kali masing-masing dan yang kelima bersedia dilaknat Allah Swt. kalau antara keduanya dituduh melakukan perzinahan. Akhirnya, peristiwa *li'an* ini menyebabkan suami dan isteri tidak boleh lagi *ruju'* atau menikah lagi untuk selama-lamanya). Akibat tuduhan suami terhadap perzinahan isterinya dalam *li'an* ini, isteri harus dihukum dera zina yaitu



*rajam*, tetapi isteri tidak jadi dhukum jika melakukan tindakan penolakan dengan mengucapkan *li'an* pula sebagaimana yang dilakukan suaminya.

*Talaq* berasal dari kata *itlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan, sedangkan dalam istilah fiqih *talaq* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. *Talaq* dibenarkan dalam Islam, tetapi sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt. sebagaimana sabda Rasulullah saw. di bawah ini,

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda, 'Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah 'Azza wajalla ialah *talaq*'" (H.R. Sunan Abu Daud Kitab at-Thalaq no. 1863).

Jika dilihat dari sisi karakteristiknya, *Talaq* ini dapat dibagi dalam berbagai hal, yaitu:

a. *Talaq tanjiz* dan *ta'liq talaq*.<sup>9</sup>

*Talaq* ini disebabkan pernyataan suami kepada isterinya bahwa mereka bercerai baik lisan maupun tulisan secara sengaja. *Talaq* ini dapat terjadi seketika (*talaq tanjiz*) dan terkadang pula digantungkan pada suatu hal (*ta'liq talaq*). *Talaq tanjiz* banyak terjadi dilakukan seorang suami karena melihat perilaku isteri yang tidak sesuai lagi menurut ajaran Islam seperti durhaka kepada Allah Swt. atau durhaka kepada suaminya. Begitulah, idealnya *talaq* diucapkan suami kepada isterinya. Terkadang pula *talaq* dijatuhkan suami ketika ia sedang mabuk, terpaksa, main-main, lalai/lupa, sindiran, dan sebagainya yang jika dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja, maka *talaq* dianggap sah seketika itu pula.

Sementara itu, adapula yang disebut dengan *ta'liq talaq* yaitu suami mengucapkan kata-kata *talaq* yang digantungkan pada suatu hal atau bersyarat. Misalnya, suami berkata, 'Jika engkau (isterinya) pergi ke tempat hiburan itu lagi, maka jatuhlah *talaq* ku!'. Jika isterinya tetap pergi ketempat hiburan itu, maka isterinya otomatis telah jatuh cerainya.

b. *Talaq sunni* dan *talaq*

*Talaq sunni* adalah *talaq* agama. Misalnya, suami rujuknya dengan sekali *talaq* selama bersih itu. Hal ini al-Baqarah: 229 yang ber

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِوَدِّ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ

Artinya: "Talak (yang lagi dengan cara yang ma tidak halal bagi kamu me berikan kepada mereka, ke menjalankan hukum-huka (suami isteri) tidak dapat ada dosa atas keduanya te menebus dirinya. Itulah melanggarnya. Barangsiapa itulah orang-orang yang

Bersadarkan ayat di a adalah sekali *talaq* kemu Apabila suami yang tela kedua, maka ia boleh men dengan isterinya dengan dengan baik-baik pula. Ruj setelah itu (jika terjadi pe boleh menikah lagi sebe bercerai.

Selanjutnya, jika su cerainya menjelang



b. *Talaq sunni dan talaq bid'i.*<sup>10</sup>

*Talaq sunni* adalah *talaq* yang berproses sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya, suami men-*talaq* isterinya yang telah pernah dicampurinya dengan sekali *talaq* di masa 'bersih' dan belum ia 'sentuh' kembali selama bersih itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah: 229 yang berbunyi,

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: 'Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim'.

Bersadarkan ayat di atas, *talaq* yang benar yang dapat dirujuk kembali adalah sekali *talaq* kemudian rujuk lalu *talaq* lagi kemudian rujuk lagi. Apabila suami yang telah menceraikan isterinya sesudah rujuk yang kedua, maka ia boleh memilih antara meneruskan hubungan perkawinan dengan isterinya dengan baik-baik atau melepaskan ikatan perkawinan dengan baik-baik pula. Rujuk hanya bisa terjadi dua kali dalam perkawinan setelah itu (jika terjadi perceraian kembali) mereka (suami-isteri) tidak boleh menikah lagi sebelum mantan isterinya dinikahi orang lain dan bercerai.

Selanjutnya, jika suami akan menceraikan isterinya, maka ia menceraikannya menjelang 'iddah-nya seperti isterinya diceraikan sesudah

bersih dari haid atau nifas atau sebelum disetubuhinya. Hal ini disebutkan dalam Alquran surat at-Talaq ayat 1 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ  
رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ  
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ  
يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: 'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru'.

Hikmah dari pernyataan ayat di atas adalah karena jika isterinya diceraikan semasa haid berarti ia tidak dapat menyambut masa 'iddah sehingga dengan demikian masa 'iddah-nya menjadi lebih panjang karena sisa masa haid tidak dapat dihitung sebagai masa 'iddah. Hal ini berarti merugikan kepentingan isteri. Selain itu, jika isteri diceraikan pada saat bersihnya, tetapi sudah dikumpul, maka dalam keadaan seperti ini tidak dapat diketahui apakah ia hamil atau belum sehingga tidak dapat diketahui bagaimana cara menghitung 'iddah-nya, apakah ia akan ber-'iddah sesudah bersih dari haid ataukah sesudah melahirkan anaknya?

*Talaq bid'i* adalah *talaq* yang menyalahi ketentuan agama.<sup>11</sup> Misalnya, men-*talaq* isterinya tiga kali dengan sekali ucapan atau men-*talaq* tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Termaksud *talaq bid'i* ketika seorang suami men-*talaq* isterinya pada masa *haid* atau *nifas* atau di masa suci sesudah ia setubuhi. Para ulama sepakat *talaq bid'i* hukumnya haram dan pelakunya berdosa.

Ulama berbeda berpendapat tentang sah atau tidaknya *talaq bid'i* ini. Jumhur ulama berpendapat *talaq* ini sah dengan alasan:

- 1) *Talaq bid'i* tetap sah menurut ayat-ayat *talaq*
- 2) Penjelasan terus menerus ketika haid. *Talaq* yang dimaksud

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ  
مَلِكٍ أَمْرَاتُهُ وَهِيَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
طَهَّرَتْ أَوْ وَهِيَ

Artinya: "S  
isterinya di mas  
hal itu kepada  
merujuknya. Ka  
ketika ia hamil

Kemudian, seb  
alasan bahwa *talaq*  
ini tidak diizinkan o  
kannya. Sebagaim  
mereka itu dalam n

#### c. *Talaq raj'i* dan

*Talaq* ini terjadi  
*talaq* yang dijatuh  
mereka berdua unt  
sekali ataupun *talaq*  
akad perkawinan,  
mempengaruhi hub  
*talaq* ini terjadi me  
akibat-akibat huk  
isterinya. Jika 'idda



- 1) *Talaq bid'i* tetap termasuk dalam pengertian yang tersebut dalam ayat-ayat *talaq* pada umumnya.
- 2) Penjelasan terus terang dari Ibnu 'Umar sewaktu ia *mentalaq* isterinya ketika haid. Lalu Rasulullah saw. menyuruh dia merujuknya. Hadis yang dimaksud adalah:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلِيرَاجِعَهَا ثُمَّ لِيُطْلِقَهَا إِذَا طَهَّرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ

Artinya: "Sesungguhnya Ibnu 'Umar *mentalaq* salah seorang isterinya di masa haid dengan sekali *talaq*. Lalu, 'Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi saw., maka beliau bersabda, 'Suruhlah dia untuk merujuknya. Kemudian, bolehlah ia *mentalaq*nya jika telah suci atau ketika ia hamil" (H.R. Sunan Abu Daud Kitab at-Talaq no. 1865).

Kemudian, sebagian ulama mengatakan *talaq* itu tidak sah dengan alasan bahwa *talaq bid'i* bukanlah *talaq* pada umumnya sebab *talaq* ini tidak diizinkan oleh Allah Swt. bahkan diperintahkan untuk meninggalkannya. Sebagaimana firman Allah Swt. yang artinya, 'Maka *talaqlah* mereka itu dalam masa 'iddah mereka itu" (QS. At-Talaq: 1).

#### c. *Talaq raj'i* dan *talaq ba'in*.

*Talaq* ini terjadi jika ditinjau dari sisi jumlahnya. *Talaq raj'i* adalah *talaq* yang dijatuhkan suami kepada isterinya yang memungkinkan mereka berdua untuk kembali (rujuk) sebagai status suami-isteri.<sup>12</sup> *Talaq* sekali ataupun *talaq* duakali yang dijatuhkan suami tidak menghilangkan akad perkawinan, tidak menghilangkan hak kepemilikan, dan tidak mempengaruhi hubungannya secara halal kecuali bersetubuh. Sekalipun *talaq* ini terjadi mengakibatkan perpisahan, tetapi tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa 'iddah isterinya. Jika 'iddah telah habis, maka rujuk tidak boleh lagi dilakukan.

Apabila salah seorang mati dalam masa 'iddah ini, maka mahar yang akan dibayar belakangan tidak halal diterima oleh bekas isterinya. Namun, halal bekas isteri menerima sisa mahar yang belum dibayarkan jika masa 'iddah-nya habis.

Rujuk dalam hal ini adalah hak suami yang ditetapkan Islam untuknya sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah: 229 yang berbunyi,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim'.

Suami dapat merujuk isterinya dengan perkataan bahwa dia akan bersatu kembali bersama isterinya sebagaimana biasanya yang terjadi sebelum *talaq*. Rujuk ini tidak memerlukan rukun-rukun nikah. Kemauan isteri untuk berkumpul kembali bersama suaminya sudah merupakan rujuk selama masih dalam durasi iddah isterinya. Kemauan isteri untuk kembali bersama suaminya setelah melewati masa iddah, maka kedua suami-isteri tersebut harus diikat dengan pernikahan yang baru lagi sebagaimana yang terjadi dalam pemenuhan rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan dalam Islam. Kondisi inipun hanya berlaku ketika masih dalam *talaq* pertama dan *talaq* kedua. Ketika *talaq* ketiga terjadi, maka rujuk tidak ada lagi.

Sementara itu, *talaq ba'in* adalah *talaq* yang dijatuhkan pada yang

ketiga kali  
*talaq ba'in*  
isterinya  
sebagaimana

فَلَا جُنَاحَ

بَيْنَهُمَا لِعُقُوبٍ

Artin  
kedua), M  
suami ya  
Maka tid  
untuk ka  
hukum-h  
kepada k

Tala  
Talak ba'  
boleh aka  
belum ka  
bersenan  
sebelum  
warisan  
nikah da  
Namun,  
sisa pem  
ba'in kul  
kecuali s

Sec  
hidup, m  
firman A

خَلَقَ اللَّهُ  
ذَلِكَ إِنَّ



ketiga kalinya (inilah yang disepakati ulama) yang disebut dengan *talaq ba'in kubro*.<sup>13</sup> Pada *talaq ba'in* ini suami tidak bisa merujuk dan menikahi isterinya lagi sebelum isterinya kawin dengan orang lain dan bercerai sebagaimana firman Allah Swt, dalam surat al-Baqarah: 230 yang berbunyi,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: 'Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui'.

*Talaq bain* dibagi dua, yaitu *talak ba'in sugra* dan *talak ba'in kubra*. *Talak ba'in sugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk kembali, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya selama mantan isterinya belum kawin dengan laki-laki lain. Oleh sebab itu, suami tidak halal bersenang-senang dengan perempuan tersebut dan jika salah satu mati sebelum atau sesudah masa *'iddah*-nya, maka yang lain tidak memperoleh warisannya. Misalnya, men-*talaq* isteri sebelum disetubuhi setelah akad nikah dan *talaq* dengan tebusan oleh isteri kepada suaminya (*khulu'*). Namun, *talak ba'in sugra* ini membuat mantan isteri tetap berhak atas sisa pembayaran mahar bertempo sebelum mati. Sementara itu, *talak ba'in kubra* adalah tidak menghalalkan suami untuk merujuk isterinya kecuali setelah mantan isterinya kawin dengan laki-laki lain dan bercerai.

Secara umum bagi isteri yang diceraikan suaminya dalam keadaan hidup, maka *'iddah*-nya tiga kali suci jika dalam keadaan *haid* sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah: 228 yang berbunyi,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ

أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: 'Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'.

Apabila wanita itu tidak haid lagi, maka 'iddah-nya selama tiga bulan sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat at-Talaq: 4 yang berbunyi,

وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٦٧﴾

Artinya: 'Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya'.

Oleh karena itu, hak-hak perempuan dalam masa 'iddah ini adalah:

1. Perempuan yang dalam keadaan 'iddah raj'iyah berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya dari suami yang mentalaqnya kecuali isteri yang durhaka (nusyuz) kepada suaminya. Perempuan ini tidak mendapatkan hak apapun sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang berbunyi ,

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ

قَيْسٍ قَالَتْ أَتَيْتُ زَوْجِي فَلَمَّا أَرْسَلَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نِيهَا الرَّجْعَةُ

Artinya : "Dari kepadanya, 'Perempuan kediannya dari bekas merujuk kepadanya"

2. Perempuan yang juga atas kediaman Swt. dalam surat

لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: 'Tempat tinggal mereka untuk isteri yang sudah mereka nafkahnya (anak-anak)mu dan musyawarah dan jika kamu men (anak itu) untuk

3. Perempuan yang talaq tebus maupun tinggal, dan tidak dalam surat at-T



الْأَحْمَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فَلَانَا أُرْسِلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya : "Dari Fatimah binti Qais, 'Rasulullah saw. telah bersabda kepadanya, 'Perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya" (H.R. Sunan Nasa'I Kitab at-Talaq no. 3350).

2. Perempuan yang dalam 'iddah ba'in jika mengandung, ia berhak juga atas kediaman, nafkah, dan pakaian sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat at-Talaq: 6,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ تَرْضَعُ لَهُ أُخْرَى



Artinya: 'Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya'.

3. Perempuan yang 'iddah ba'in yang tidak hamil, baik ba'in dengan talaq tebus maupun talak tiga, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, dan tidak untuk yang lainnya sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat at-Talaq: 6 di atas.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *talaq ba'in* yang tidak hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula tempat tinggal sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang berbunyi,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا قَالَ لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ

Artinya: "Dari Fatimah binti Qais, dari Nabi saw. mengenai perempuan yang ditalak tiga. Rasulullah saw. bersabda, 'Ya tidak berhak atas tempat tinggal dan tidak pula atas nafkah'" (H.R. Shahih Muslim Kitab at-Talaq no. 2717).

Adapun firman Allah surat at-Talaq: 6 di atas, menurut mereka hanya berlaku untuk perempuan yang dalam *talaq raj'iyah*.

4. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *talaq* yang terjadi selain yang disebutkan hak isteri kepada mantan suaminya, maka suami berkewajiban pula memberikan biaya pemeliharaan (*hadanah*) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Bab 17 Pasal 149 ayat d).
5. Perempuan yang dalam *'iddah* meninggal dunia, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung karena dia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapat warisan dari suaminya yang meninggal dunia sebelumnya. Hal ini dinyatakan Rasulullah saw. dalam hadisnya,

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا فَأَجَبَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا وَأَمَرَ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا فَقَالَا وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكَ

نَ أَيْنَ أَتَقِيلُ يَا  
بَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
رَوَانُ لَمْ تَسْمَعْ  
عَلَيْهَا فَقَالَتْ  
عَالِي فَطَلَّقُوهُنَّ  
بَلَّتْ فَأَيُّ أَمْرِ  
الزُّهْرِيِّ وَأَمَّا  
وَحَدِيثُ أَبِي  
أَنَّ قَيْصَةَ بِنَ  
يَن قَالَ فَرَجَعَ

Artinya: 'Tidak hamil'. Perempuan yang meninggal dunia sebelum hamil, dia tidak berhak mendapatkan warisan karena dia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapat warisan dari suaminya yang meninggal dunia sebelumnya. Hal ini dinyatakan Rasulullah saw. Menikah Daud Kitab a

Bekas isteri wajib menjaga d dengan laki-laki

## 2. Kematian.

Jika salah s



إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا وَاسْتَأْذَنْتَهُ فِي الْإِئْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ أَتَقْبَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ تَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كَتَابُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَطَلَّقُوهُنَّ إِعْدَّتِهِنَّ حَتَّى لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قَالَتْ فَأَيُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُوسُفُ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَأَمَّا الزُّبَيْدِيُّ فَرَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثَ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمَعْنَى مَعْمَرٍ وَحَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ بِمَعْنَى عُقَيْلٍ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ قَبِيصَةَ بِنْتُ دُؤَيْبٍ حَدَّثَتْهُ بِمَعْنَى دَلٍّ عَلَى خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ قَالَ فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ

Artinya: 'Tidak ada untukmu nafkah kecuali engkau dalam keadaan hamil'. Perempuan itu minta izin untuk pindah (rumah), lalu beliau mengijinkannya'. Perempuan itu berkata, 'Kemana aku pindah (rumah) ya Rasulullah?'. Rasulullah saw berkata, 'Ke sisi (rumah) Ummi Maktum sebab dia seorang buta. Lalu, ia (wanita tadi) meletakkan pakaiannya di sisi (rumah) Ummi Maktum dan ia tidak melihatnya. Lalu, Wanita tadi berada di sana sehingga habis masa 'iddahnya'. Maka, Rasulullah saw. Menikahkan perempuan itu dengan Usamah' (H.R. Musnad Abu Daud Kitab at-Talaq no. 1947).

Bekas isteri yang diceraikan suaminya selama dalam masa 'iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan laki-laki lain.

## 2. Kematian.

Jika salah satu antara suami atau isteri meninggal dunia, maka

mereka berdua dengan sendirinya telah bercerai. Bagi yang hidup di antara suami atau isteri, mereka mendapat harta warisan sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh Islam.

Jika suami yang meninggal, maka isteri menjalani 'iddah-nya sesuai keterangan di atas dan mendapatkan hak warisan dari suaminya yang meninggalkan dunia.

Selain akibat-akibat yang disebutkan bagi talak di atas, maka akibat putusannya perkawinan karena perceraian yang lain, khususnya mengenai posisi anak sebagai korban perceraian tersebut. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah mengaturnya pada Bab 17 Pasal 156 ayat-ayat:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
  2. Ayah.
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula.
- d. Semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingatkan kemampuan ayahnya

menetapkan  
anak yang

Jika anak  
yang memelihara  
umur 12 tahun  
atau ibunya seba  
anak tetap dita

### 3. Putusan I

Berdasarkan  
Bab 16 Pasal 11  
terjadinya putus  
itu atas kemau  
atas gugatan ist  
(pasal 146 ayat

Menurut F  
28 - 30 Desemb  
talak yang diuca  
Hal ini difatwa  
muslim bahwa  
diputuskan per  
suami mentala  
ini memutuskan  
di dalam penga  
tidak memper  
kepadanya dal

Selain seb  
Keputusan da  
akibat-akibat

Pasal 96  
maka separuh  
lama (2) Pemb  
isteri atau suar  
matinya yang  
Pengadilan A



menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Jika anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, maka yang memelihara adalah ibunya. Jika telah mencapai *mumayyiz* atau umur 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan anak tetap ditanggung oleh ayahnya (Pasal 105 ayat a,b,dan c).

### 3. Putusan Pengadilan.

Berdasarkan ketetapan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab 16 Pasal 113 bahwa putusan Pengadilan Agama turut menentukan terjadinya putusnya perkawinan antara suami-isteri. Apakah perceraian itu atas kemauan suami sendiri (pasal 131 ayat 1,2,3,4, dan 5) atau atas gugatan isteri terhadap suami di depan Hakim Pengadilan Agama (pasal 146 ayat 1 dan 2).

Menurut Fatwa MUI Sumatera Utara dalam sidangnya dari tanggal 28 - 30 Desember 2010 (Selasa dan Kamis) di Medan memutuskan bahwa talak yang diucapkan suami diluar pengadilan dianggap sah perceraian. Hal ini difatwakan karena selama ini masih ada pemikiran sebagian muslim bahwa perceraian terjadi jika diputuskan pengadilan. Jika tidak diputuskan pengadilan, maka perceraian tersebut tidak sah meskipun suami mentalak isterinya di luar pengadilan. Untuk itu, fatwa baru ini memutuskan perceraian jika suami mentalaknya di luar maupun di dalam pengadilan. Tujuan yang dikehendaki dari fatwa ini agar suami tidak mempermainkan kata-kata cerai yang diberikan wewenang kepadanya dalam kondisi apapun.

Selain sebagian keterangan di atas, Pengadilan Agama berdasarkan Keputusan dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang akibat-akibat yang terjadi setelah putusnya perkawinan, yaitu:

Pasal 96 menerangkan pada ayat (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 berbunyi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Meskipun keterangan di atas merupakan keputusan Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama di Indonesia, tetapi ketentuan-ketentuan *faraidh*/warisan dalam Islam juga turut harus dipertimbangkan dalam putusannya perkawinan ini (ketentuan ini akan dibahas dalam Bab Warisan).

## Catatan:

<sup>1</sup> Hakim Rahma  
hal. 11.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq,

<sup>3</sup>Yusuf Qardawi  
h. 559.

<sup>4</sup> Hakim Rahma  
hal. 32.

<sup>5</sup>Kompilasi Hukum Islam  
1992), h. 23.

<sup>6</sup>Ibid., h. 24.

<sup>7</sup>Dari Aisyah r.a.  
haram sekali isapan  
1450. Sunan Tirmizi  
Aisyah juga berkata,  
menjadi haram. Kemudian  
menjadi haram. Kemudian  
bagian dari Alquran  
1452. Tirmizi II;308  
Disyaratkan hendakny  
firman Allah Swt da  
Rasulullah saw bers  
bisa membelah usus-  
II;311 no. 1162).

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Islam

<sup>9</sup>Abu Muhammad  
Mughni li ibn Qudama

<sup>10</sup>Ibid., h. 75.

<sup>11</sup>Ibid., h. 99.

<sup>12</sup>Syaikh Mahmud  
dalam Masalah Fiqih

<sup>13</sup>Ibid., Sementara

jenis yang termasuk ta

ini disepakati oleh sen

sebagian ulama mazh

talaq, dan 4. wanita y

imamiyah karena me

tidak mempunyai 'idd

dicampuri. Lihat Mu

Basritama.1996). h. 4



## Catatan:

<sup>1</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hal. 11.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Dar al-Fikr, 1986), Jilid 2 hal.

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutaakhir* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 559.

<sup>4</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hal. 32.

<sup>5</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), h. 23.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 24.

<sup>7</sup> Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, 'Tidak bisa menjadikan haram sekali isapan dan dua kali isapan'. (Shahih Muslim Jilid II hal. 1073 no. 1450. Sunan Tirmizi II;308 no. 1160. Ibnu Majah I;624 no. 1941, Nasai VI;101). Aisyah juga berkata, 'Termasuk ayat Alquran yang diwahyukan 10 kali penyusunan menjadi haram. Kemudian dihapus ayat yang menyatakan 5 kali penyusunan sudah menjadi haram. Kemudian, Rasul wafat dan ayat Alquran itu tetap dibaca sebagai bagian dari Alquran (Shahih Mukhtasar Muslim no. 879, Muslim II;1075 no. 1452. Tirmizi II;308 no. 1160. Ibnu Majah II;625 no. 1942 dan Nasai VI;100). Disyaratkan hendaknya penyusunan itu berlangsung selama dua tahun berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Albaqarah: 233. Dari Ummu Salamah ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda, 'Tidak menjadi haram karena penyusunan kecuali yang bisa membelah usus-usus di payudara dan ini terjadi sebelum disapih (Tirmizi II;311 no. 1162).

<sup>8</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 28. Bab VI, pasal 39—44.

<sup>9</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni li ibn Qudamah* (Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadisah, tth.), Juz 7, h. 97.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 75.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 99.

<sup>12</sup> Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh M. Ali al-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 234.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Sementara itu, dalam buku Fiqh Lima Mazhab disebutkan beberapa jenis yang termasuk talaq ba'in; 1. wanita yang ditalaq sebelum dicampuri (jenis ini disepakati oleh semua mazhab), 2. wanita yang dicerai 3 kali, 3. talaq khulu' sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa khulu' adalah *fasakh nikah*, bukan talaq, dan 4. wanita yang telah memasuki masa *monopause* khususnya pendapat imamiyah karena mereka mengatakan bahwa wanita *monopause* yang ditalaq tidak mempunyai 'iddah. Hukumnya sama dengan hukum wanita yang belum dicampuri. Lihat Mughniyah M Jawad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama.1996). h. 451.

## BAB II

### MAWARIS

#### A. Dalil Hukum.

Allah Swt berfirman dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 11 - 14 berbunyi;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ

خَلَهُ نَارًا خَالِدًا

Artinya:  
pusaka untuk  
dengan bagah  
perempuan leb  
ditinggalkan;  
separo harta. d  
dari harta yan  
jika orang yan  
bapanya (saja  
itu mempunya  
(Pembagian-p  
ia buat atau  
dan anak-anak  
lebih dekat (b  
Sesungguhnya

12. dan b  
oleh isteri-iste  
itu mempunya  
ditinggalkan  
seduah dibaya  
kamu tinggall  
anak, Maka k  
tinggalkan se  
dibayar huta  
perempuan ya  
tetapi mempu  
saudara pere  
jenis saudara  
lebih dari seor  
dipenuhi was  
dengan tidak  
yang demikia  
Allah Maha r



الْفَوْزَ الْعَظِيمُ ﴿١١﴾ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

13. (*Hukum-hukum tersebut*) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

14. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.

Ulama telah memberikan tafsiran mengenai ayat-ayat *faraidh* ini surat tersebut, khususnya menafsirkan hukum dari *faraidh* itu sendiri, seperti:

1. Dalam tafsir *Jalalain* disebutkan bahwa warisan hukumnya fardhu.
2. Dalam tafsir *Ibnu Katsir* menyebutkan bahwa hukumnya wajib bahkan tidak boleh ditambah dan dikurangi ukurannya.
3. Dalam tafsir *Alusi* selain disebutkan wajib juga diperintahkan untuk dilaksanakan.
4. Dalam tafsir *ar-Razi* disebutkan kewajiban dalam melaksanakannya.
5. Dalam tafsir *At-Tabari* juga mengatakan *faiaidh* itu merupakan perintah Allah Swt untuk dilaksanakan mengenai ukuran-ukurannya.

Dengan demikian, sebagian besar ulama tafsir mengatakan bahwa hukum pembagian *faraidh* atau warisan ini adalah fardu / wajib. Oleh karena itu, hukum pembagian warisan dalam bentuk lain seperti hukum adat dan hukum negara paling dapat diilhami dan mengacu pada hukum *faraidh* agar tidak membawa perseteruan dan permusuhan antara ahli-ahli waris. Keberadaan hukum *faraidh* merupakan ketentuan Allah Swt untuk kemaslahatan manusia sendiri di dunia dan diakhirat yang diharapkan sangat rela menerima ketentuan-Nya ini. Sementara itu, pembagian warisan menurut adat dan negara lebih banyak memberikan mudharat bagi mereka sendiri sebab yang menentukan adalah manusia itu sendiri.

Hukum *faraidh* bersifat universal, sedangkan hukum adat dan hukum negara ini bergantung tempat dan waktu. *Faraidh* dapat dipakai di mana saja kaum muslimin berada tanpa ada pengurangan dan penambahan sedikitpun di dalamnya. Hukum warisan adat sangat bergantung pada adat masing-masing. Pembagian warisan menurut adat Tapanuli



berbeda dengan adat Pariaman, maupun adat Jawa. Pembagian warisan berdasarkan negara bergantung pada negara masing-masing seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia berbeda pembagian warisannya dengan Negara Malaysia atau Arab Saudi.

Hukum Allah Swt dalam hal ini orientasi dunia dan akhirat, sedangkan hukum manusia dalam hal ini hanya untuk dunia belaka. Bahkan, pelanggaran tentang hal ini diklaim-Nya sebagai maksiat, dosa, dan berujung masuk ke dalam api neraka sebagaimana tertera dalam Alquran surat An-Nisa ayat 14 di atas.

## B. Sebab-sebab Terjadinya Warisan dan Penghalangnya.

Mawaris adalah bentuk *jama'* dari kata *miras* yang berarti harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, sedangkan menurut istilah adalah (ilmu) yang mengetahui orang yang berhak menerima warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya, bagian setiap ahli waris dan cara pembagiannya. Ilmu mawaris disebut juga dengan *faraid* bentuk *jama'* dari *faridah* yang artinya bagian tertentu atau ketentuan.

Islam telah memberikan aturan kepada pemeluknya mengenai harta yang ditinggalkan seseorang karena kematian yang lebih dikenal dengan warisan. Warisan itu dapat diterima ataupun tidak dapat diterima ahli waris sangat bergantung pada posisinya saat itu.

Untuk itu, adanya warisan harus memiliki beberapa syarat, yaitu:

1. Orang yang mewariskan harta (*Muwarris*) telah meninggal dunia.
2. Adanya harta warisan (*maurus, miras, irs, turas, dan tarikah*) yang hendak diwarisi setelah disisakan penyelesaian janji-janjinya seperti hutang ataupun wasiat.
3. Ahli waris (*waris*) hidup ketika *muwarris* meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini anak yang masih dalam kandungan ibunya yang berhak terhadap warisan ayahnya yang meninggal dunia. Jika ahli waris terlebih dahulu meninggal dunia, maka dia tidak berhak menerima warisan. Namun, jika *muwarris* dan ahli waris meninggal secara bersamaan (misalnya ayah dan anak), misalnya ayah dan anak bersamaan jatuh dari satu pesawat terbang dan meledak, maka

salah seorang dari mereka tidak dapat mempusakai yang lain karena tidak jelas hidupnya siapa yang mati lebih dahulu. Artinya, tidak diketahui siapa yang mati duluan dan siapa yang mati kemudian. Harta peninggalan mereka diwarisi oleh para ahli warisnya yang benar-benar masih hidup ketika kematian mereka.<sup>1</sup>

Memang, janin dalam kandungan ibunya masih berhak menjadi ahli waris jika pada saat kematian pewaris telah jelas hidupnya. Hak kewarisannya itu baru menjadi pasti jika waktu lahirnya dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisannya sebagaimana sabda Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَهْلَ الْمَوْلُودُ وَرَّثَ

Artinya: 'Apabila bayi baru dilahirkan menangis, ia sudah mendapatkan warisan' (HR. Sunan Abu Daud Kitab al-Faraid no. 2531)

Ulama mazhab berbeda pendapat dalam menanggapi hadis ini. Menurut Malikiyah dan Hanbaliyah, anak yang keguguran jika terdengar tangisan ketika lahirnya, maka tidak diberikan warisan dan tidak diambil waris darinya meskipun ia bergerak dan bernapas. Kecuali jika agak lama ia bernapas atau sampai disusui. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, jika ia bergerak, bernapas, atau bersin, maka diberikan waris dan diambil warisan darinya.<sup>2</sup>

4. Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai atau *mawani' al-irs* (akan dikaji lebih lanjut).<sup>3</sup>

Menurut pengalaman hidup masyarakat kebanyakan, untuk menghindari kesulitan pembagian warisan dan menghindari perselisihan antara ahli-ahli waris di belakang hari kelak, maka pembagian harta warisan hendaknya segera dilakukan dengan tidak menunda terlalu lama sebelum sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi, seperti:

1. Sebagian ahli waris berangkat jauh dari domisili semula sehingga menyulitkan pembagian harta warisan tersebut. Hal ini belum lagi ketika ahli waris tidak diketahui keberadaannya (hilang dan sebagainya) setelah merantau di suatu tempat yang tidak diketahui lokasinya.



2. Sebagian ahli waris kerepotan menanggulangi pihak-pihak ketiga yang mencoba untuk memperlmasalahkan atau memperkeruh suasana yang merasa pembagian tidak sempurna dan kurang adil. Pihak-pihak ketiga itu bisa jadi dari kalangan isteri/menantu/mertua masing-masing ataupun orang lain yang berharap terjadi perselisihan di antara mereka.
3. Ahli waris khususnya mantan isteri *muwaris* akan menikah kembali dengan laki-laki lain yang telah memiliki keturunan, tetapi beberapa tahun kemudian hasil pernikahan mereka membuahkan beberapa anak lagi. Padahal harta warisan dari suami pertama belum dibagi untuk dirinya dan anak-anaknya. Sebidang tanah dan rumah peninggalan mantan suami pertamanya sekarang sudah semakin luas, lebar dan mewah karena hasil usaha suami keduanya. Beberapa tahun kemudian suami keduanya meninggal pula. Sekarang, ahli-ahli waris menjadi bingung dan repot membagi harta warisan mereka. Akibatnya, sesuatu yang dikhawatirkan segera muncul yaitu per-seteruan antara anggota keluarga tersebut yang terkadang menyebabkan putus hubungan silaturahmi dan klimaksnya pembunuhan.

Sekalipun hal ini bukanlah syarat mutlak dalam pembahasan *faraidh*, tetapi lebih merupakan menjunjung tinggi etika dan hubungan silaturrahi di antara orang-orang yang bersaudara. Untuk itulah, demi mencegah kemudharatan yang akan terjadi, kesegeraan pembagian warisan perlu dipertimbangkan demi meraih kemaslahatan antara yang berkeluarga.

Syarat-syarat di atas dijadikan dasar utama untuk dapat menerima pembagian warisan. Selain itu, akan dikemukakan sebab-sebab mendapat warisan dan sebab-sebab terhalangnya mendapat warisan.

### 1. Sebab-sebab mendapat warisan.

- a. Adanya hubungan kekeluargaan (*al-qarabah*).

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: 'Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan'.

Hubungan kekeluargaan itu adalah ibu-bapak (orang tua kandung) dengan anak-anaknya (putra dan putri) dan kaum kerabat *muwarris* yang meninggal dunia baik laki-laki maupun wanita menurut ketentuannya (mengenai orang-orangnya akan dibahas selanjutnya). Hubungan ini ditekankan pada adanya pertalian darah dari *muwarris* yang meninggal dunia. Hubungan tersebut dapat bersifat vertikal seperti buyut, kakek, ayah, suami, anak, cucu, cicit dan dapat juga bersifat horizontal seperti paman dan bibi.

b. Adanya hubungan perkawinan (*al-mushaharah*).

Hubungan perkawinan yang sah antara suami dan isteri telah membuka kesempatan untuk saling mewarisi harta jika salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Masing-masing pihak adalah teman hidup bagi yang lain dan pembantu dalam memikul beban hidup bersama. Suami sebagai pemimpin yang bertanggung-jawab tidak mengenal lelah dalam berusaha demi mencukupi nafkah dan keperluan hidup isterinya. Oleh karena itu, adalah bijaksana sekali jika Islam memberikan bagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dan jerih payahnya jika isterinya meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka. Demikian juga sebaliknya, isteri sebagai kawan hidup yang sama-sama merasakan suka-dukannya hidup berumah tangga, menjaga harta suami, dan bahkan tidak sedikit ia ikut berkorban membantu suaminya dan bekerja untuk menambah penghasilannya, maka adillah kiranya kalau isteri diberi bagian yang pasti dari harta peninggalan suaminya sebagai imbalan jasa-jasanya atau sebagai sumbangan nafkah sampai ada orang lain yang menanggung nafkahnya atau sebagai modal hidup selanjutnya jika suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan harta.

c. Adanya kegiatan seseorang memerdekakan orang lain dari perbudakan (*al-wala'*).

Hal ini dinyatakan Rasulullah saw. dalam suatu hadisnya yang berbunyi,

حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ

مَتِّ بِرِيرَةَ  
نَافِعًا يُحَدِّثُ  
قُلْتُ لِنَافِعٍ

Aryiny  
dekakan"

Begitu jug

لَ قَالَ عَبْدُ

Artinya:  
hamba itu  
dijual, dan  
Kitab al-fa

Perbudaka

1) Wala'  
yang  
karen  
memb  
dan h  
orang  
memi  
benda  
yang l  
kan ke  
anjura  
hak w  
tumbu  
sudah  
berlak

2) Wala'



اللَّهُ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قُلْتُ لِنَافِعِ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا فَقَالَ مَا يُدْرِينِي

Aryinya: "Sesungguhnya hal wala' itu untuk orang yang memerdekakan" (H.R. Shahih Bukhri Kitab al-Buyu' no. 2011).

Begitu juga, dinyatakan pada hadis yang lain,

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كُلُّحْمَةٍ النَّسَبُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

Artinya: "Hubungan orang yang memerdekakan hamba dengan hamba itu seperti hubungan keturunan dengan keturunan, tidak bias dijual, dan tidak bias dihibahkan (diberikan)" (H.R. Sunan ad-Darimi Kitab al-faraid no. 3030).

Perbudakan atau wala' itu sendiri dapat dibagi dua, yaitu:

- 1) *Wala'u al-'ataqah* atau *'ushubah sababiyah* yaitu kekerabatan yang timbul disebabkan membebaskan budak dan bukan karena ada hubungan *nasab*. Jika seorang pemilik budak telah membebaskan budaknya dengan mencabut hak mewalikan dan hak harta bendanya, maka berarti ia telah merubah status orang yang semula tidak mampu bertindak, menjadi mampu memiliki, mengurus dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri dan mampu melakukan tindakan hukum yang lain. Sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada budaknya dan sebagai imbalan atas melaksanakan anjuran syariat untuk membebaskan budak, syariat memberikan hak *wala'* kepadanya. Kondisi ini berlaku ketika zaman perbudakan tumbuh dan berkembang, tetapi zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi, maka bagian ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
- 2) *Wala'u al-muwalah* yaitu kekerabatan yang timbul karena adanya

perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain. Misalnya, seorang berjanji kepada orang lain, 'Hai bung, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku jika aku telah mati dan dapat mengambil diat untukku jika aku dilukai seseorang'. Kemudian, orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu dan melakukan hal yang sama. Pihak pertama disebut dengan *al-mawali* atau *al-adna* dan pihak kedua disebut dengan *al-mawala* atau *al-maula*. Kondisi ini berlaku ketika masa Rasulullah saw menghubungkan persaudaraan antara Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar sehingga dapat saling waris-mewarisi. Namun, setelah berhentinya wahyu seiring dengan wafatnya Rasulullah saw., perjanjian warisan tanpa diikat hubungan *nasab* seperti ini tidak berlaku lagi sampai hari ini dan masa yang akan datang.

d. Adanya hubungan agama.

Jika seorang muslim meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris seorangpun, baik karena hubungan *nasab* dan kekerabatan, maupun pernikahan, maka harta peninggalannya diserahkan ke *bait al-mal* untuk kepentingan kaum muslimin.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهُوزَنِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرُبَّمَا قَالَ فَإِلَيْنَا وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَارِثِهِ وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَّا وَارِثَ لَهُ وَأَنَا وَارِثٌ مَنْ لَّا وَارِثَ لَهُ أَرِثُهُ وَأَعْقِلُ عَنْهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ وَقَالَ عَنِ الْمِقْدَامِ مِنْ كِنْدَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

Artinya: 'Barangsiapa meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya dan paman adalah juga sebagai pewaris. Barangsiapa yang tidak mempunyai ahli waris, maka akulah sebagai pewarisnya bagi orang yang tidak mempunyai hali waris. Aku mewariskannya dan memenuhi kewajiban terhadapnya berupa warisan' (HR. Musnad Ahmad Kitab Musnad as-Syamiyyin no. 16547).

Rasulullah saw. s  
seorang ahli wa  
Mal adalah lem  
dana dan harta d  
Mal ini dapat me  
BAZIS (Badan Am  
dan lain-lain. Sal  
warisan bagi muw  
umat Islam.

## 2. Sebab-sebab

### a. Perbudakan.

Seorang budak ti  
berikan warisan  
punyai hubunga  
berstatus budak  
surat an-Nahl a

ن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا  
لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

Artinya: 'Alla  
sahaya yang dim  
dan seorang yang  
kahkan sebagian  
terangan, Adaka  
tetapi kebanyakan

Sabda Rasululla

أَيُّهُ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ  
ثُ الْمَالِ قَالَ أَبُو



Rasulullah saw. sebagai perantara bagi *muwarris* yang tidak mempunyai seorang ahli waris pun untuk dibagikan kepada umat Islam. Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang menyimpan dan menyalurkan dana dan harta dari dan untuk kepentingan umat Islam. Konsep Baitul Mal ini dapat mewujudkan diri dalam bentuk Kementerian Keuangan, BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedeqah), ZIS (Zakat Infaq Sedekah), dan lain-lain. Salah satu tugas lembaga ini adalah menyalurkan harta warisan bagi *muwarris* yang tidak memiliki ahli waris untuk kepentingan umat Islam.

## 2. Sebab-sebab penghalang menerima warisan.

### a. Perbudakan.

Seorang budak tidak dapat menerima warisan dan tidak dapat memberikan warisan dari dan kepada semua keluarganya (yang mempunyai hubungan *nasab*) yang meninggal dunia selama ia masih berstatus budak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat an-Nahl ayat 75 yang berbunyi,

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

Artinya: 'Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui'.

Sabda Rasulullah saw,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِثُ الْوَلَاءُ مَنْ يَرِثُ الْمَالُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ

Artinya: 'Seseorang mewarisi budak bagi orang yang mewarisi harta' (HR. Sunan Tirmizi Kitab a-Farid 'an Rasulillah no. 2040).

Budak ini dianggap tidak cakap mengurus harta miliknya. Jika ia diberikan harta pusaka dari kerabatnya yang telah meninggal, maka secara juridis harta pusaka yang telah diterimanya itu jatuh ke tangan tuan yang memilikinya. Disamping itu, status kekeluargaannya terhadap kerabatnya sudah dianggap putus sebab ia telah menjadi keluarga asing (bukan keluarganya).

b. Pembunuhan.

Seseorang (dari ahli waris) yang telah terbukti membunuh *muwarris*, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya sebagaimana sabda Rasulullah saw. di bawah ini,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ قَدْ تَرَكَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ

Artinya: "Orang yang membunuh tidak mewarisi (sesuatu apapun dari orang yang dibunuhnya)" (H.R. Sunan Trimizi Kitab al-Faraid 'an Rasulillah no. 2035).

c. Kekafiran.

Kafir adalah orang yang berlainan agama dari Islam. Orang kafir tidak berhak menerima pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima pusaka dari keluarganya yang kafir. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw. yang berbunyi,

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ



عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi pula muslim" (H.R. Shahih Bukhari Kitab Faraid no. 6267).

- d. Anak dari hasil perzinahan atau tidak melalui pernikahan yang sah tidak dapat mewarisi harta kecuali dari ibu yang melahirkannya. Hal ini dikarenakan 'ayah'-nya bukanlah ayah *syar'iy*, tetapi ayah *biologis* semata.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَنَّا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنِ لَهَيْعَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَلَدَ الزَّانَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ

Artinya: 'Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita yang merdeka dan budak wanita, maka anak (dari perzinahan) tersebut adalah anak zina yang tidak dapat mewarisi dan diwarisi (lelaki tersebut)' (H.R. Sunan Tirmizi Kitab Faraid 'an Rasulullah no. 2039).

Anak zina tersebut dihubungkan dengan ibunya sebagai pewaris sebagaimana juga terdapat dalam Kitab Al-Muwatha' Imam Malik di bawah ini:

بَاب مِيرَاثٍ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزَّانَا حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ غُرُورَةَ بِنَ الرُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزَّانَا إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتُهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقُهُمْ وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقُهُمْ وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَبْلَدَنَا

Artinya: 'Sesungguhnya 'Urwah bin Zubair berkata "Tentang anak li'an dan anak zina apabila meninggal dunia, ibunya mengambil warisannya sebagaimana terpampang dalam Kitabullah 'Azza wa Jalla, dari saudara ibunya, ia (anak zina) berwaris sisa perwalian ibunya jika ibunya seorang budak. Jika ibunya seorang Arab (merdeka, ibunya mewariskan hak anak (zina)nya. Ia (anak zina) berwaris kepada saudara ibunya dan sesuatu yang tersisa dari kaum muslimin' (Kitab Al-Muwatta' Imam Malik Kitab Faraid).

### C. Ahli Waris dari Golongan Laki-laki dan Perempuan.

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Berdasarkan ketentuan Alquran, Allah Swt. telah menentukan orang-orang yang dapat dijadikan ahli waris sebagaimana termaktub dalam Alquran surat An-Nisa ayat 11 - 14 di bawah ini;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ

اللَّهُ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ  
بَيْنَ فِيهَا وَذَلِكَ  
يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا

Artinya: '(11) pusaka untuk) anak dengan bagaian dari perempuan lebih dari ditinggalkan; jika a separo harta. dan seperenam dari hart anak; jika orang ya oleh ibu-bapanya (sa itu mempunyai bel (Pembagian-pemba ia buat atau (dan) dan anak-anakmu, lebih dekat (banyak Sesungguhnya Allai

(12). Dan bagi oleh isteri-isterimu, itu mempunyai ana ditinggalkannya ses seduah dibayar huta kamu tinggalkan jika anak, Maka Para is tinggalkan sesudah dibayar hutang-hut perempuan yang tid tetapi mempunyai s saudara perempuan jenis saudara itu sep lebih dari seorang,



مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ  
 وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ  
 الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا  
 فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: '(11). Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(12). Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,

*sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*

(13). *(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.*

(14). *dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan'.*

Untuk lebih rincinya orang-orang yang berhak mendapat pusaka dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

1. Ahli waris dari golongan laki-laki.
  - a. Anak laki-laki.
  - b. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki.
  - c. Bapak.
  - d. Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.
  - e. Saudara laki-laki seibu seapak.
  - f. Saudara laki-laki seapak saja.
  - g. Saudara laki-laki seibu saja.
  - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
  - i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja.
  - j. Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak.
  - k. Saudara laki-laki bapak yang seapak saja.
  - l. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak.
  - m. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak saja.
  - n. Suami.
  - o. Laki-laki yang memerdekakannya (mayat).



Jika 15 orang di atas semua ada/hadir, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka itu hanya 3 orang saja, yaitu: *bapak, anak laki-laki, dan suami*.

2. Ahli waris dari pihak perempuan.

- a. Anak perempuan.
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki.
- c. Ibu.
- d. Ibu dari bapak.
- e. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki.
- f. Saudara perempuan yang seibu seapak.
- g. Saudara perempuan yang seapak.
- h. Saudara perempuan yang seibu.
- i. Isteri.
- j. Perempuan yang memerdekakan si mayat.

Jika 10 orang di atas ada semuanya, maka yang dapat berhak menerima warisan hanyalah 5 orang saja, yaitu: *isteri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu seapak*.

Seandainya, 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari dua orang yaitu suami/isteri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

Tabel kedua ahli waris golongan laki-laki dan perempuan dapat dilihat tabel di bawah ini;

**Tabel****15 Orang Pihak Laki-laki yang Mendapat Ahli Waris**

Level	Seayah	Sekandung	Seayah	Sekandung	Keturunan	Seibu
<i>Kakek</i>					Kakek (4)	
<i>Ayah</i>	Saudara (11)	Saudara (10)			Bapak (3)	
<i>Saudara</i>	Anak (13)	Anak (10)	Saudara (6)	Saudara (5)	Suami (14)	Saudara (7)
<i>Anak</i>			Anak (9)	Anak (8)	Anak (1)	
<i>Cucu</i>					Cucu (2)	

**Catatan:** Orang yang ke-15 adalah Majikan (laki-laki) yang membebaskan budak yang bersangkutan.

**Tabel****10 Orang Pihak Perempuan yang Mendapat Ahli Waris**

Level	Seayah	Sekandung	Keturunan		Seibu
<i>Kakek</i>			Nenek (4)	Nenek (5)	
<i>Ayah</i>			Bapak	Ibu (3)	
<i>Saudara</i>	Saudara (7)	Saudara (6)	Isteri (9)		Saudara (8)
<i>Anak</i>			Anak lk.	Anak pr. (1)	
<i>Cucu</i>			Cucu (2)		

**Catatan :** Orang yang ke-10 adalah Majikan (wanita) yang membebaskan budak yang bersangkutan.



**Tabel**  
**6 Orang yang Mendapat Warisan Jika Hadir 25**  
**Ahli Waris Seluruhnya**

Level	Laki-laki	Perempuan
Ayah	Bapak	Ibu
Mayit	Suami	Isteri
Anak	Anak lk.	Anak Pr.

Bagaimana halnya dengan posisi banci atau *khunsa* apakah mendapat harta warisan ? Bagaimana pula bagiannya menurut Islam ?

*Khunsa* atau banci, menurut kitab Asy-Syarqawi, seseorang yang mempunyai dua alat kelamin yaitu laki-laki dan perempuan atau orang yang mempunyai lubang yang ada pada dua alatnya.<sup>4</sup>

Sementara itu, menurut *syarah ar-Rahbiyah*, *khunsa musykil* itu ada dua macam, yaitu:

1. Yang mempunyai dua alat (laki-laki dan perempuan).
2. Yang mempunyai lubang untuk kencing, tetapi tidak sama dengan alat kelamin laki-laki dan tidak sama pula dengan alat kelamin perempuan (yang kedua ini sulit sekali untuk menentukan statusnya ketika masa anak-anak, dan apabila sudah *baligh* kemungkinan akan terlihat tanda-tanda jenis kelaminnya yang sebenarnya/aslinya) kecuali golongan yang pertama akan kelihatan tanda-tandanya (laki-laki atau perempuan) walaupun dia masih kecil (anak-anak) untuk mengetahui laki-laki atau perempuan, antara lain dengan ciri khas kencingnya.<sup>5</sup>

Menurut hemat penulis, dengan bantuan alat-alat teknologi yang canggih pada masa modern sekarang ini, maka susunan *anatomi* tubuh manusia sudah dapat dilihat dan diamati manakah alat kelamin yang berfungsi secara alamiah dan manakah yang tidak berfungsi sama sekali atau cacat?, Kemudian, dihukumkanlah dia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.

Suatu yang tidak mungkin terjadi adalah terdapat dua alat kelamin laki-laki dan perempuan yang berfungsi yang sama dalam satu tubuh

manusia, tentunya ada yang tidak berfungsi sama sekali atau sekedar cacat belaka. Untuk itu, yang berfungsiilah dihukumkan jenis kelaminnya sebagaimana terkadang sebagian manusia ada jari tangannya enam buah, maka yang satu lagi tidak berfungsi. Dari sinilah warisan diberlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya yang berfungsi tersebut.

*Khuntsa* bukan diperuntukkan/digelarkan kepada seseorang yang selalu disebut-sebut sebagai bencong, waria (wanita-pria), dan wadam (hawa-adam). Mereka ini adalah laki-laki yang sengaja mengubah sedikit gerak tubuh, suara, pakaian, kosmetik, dan asesoris lainnya seperti layaknya wanita kebanyakan. Bahkan, mereka mengklaim semua ini adalah bawaan dari 'sono'/lahir-nya. Prilaku semacam ini dilarang dalam agama Islam. *Wallahu a'lam bissawwab.*

#### D. *Ashab al-Furud* dan Bagian-bagiannya serta Asabah.

*Ashab al-Furud* adalah orang-orang yang berhak mendapat bagian tertentu dari harta warisan yang ditinggalkan *muwarris*. Pembagian yang ditentukan (*furud al-muqaddarah*) masing-masing adalah  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ , dan  $\frac{2}{3}$  (dalil ini dapat dilihat dalam surah an-Nisa' ayat 11 – 12, dan 176) dengan uraian di bawah ini,

1. Orang yang mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  adalah:
  - a. Anak perempuan jika ia hanya sendiri, tidak bersama-sama dengan saudaranya (QS. An-Nisa: 11).
  - b. Anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan.
  - c. Saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak saja jika saudara perempuan seibu seapak tidak ada dan ia hanya seorang saja (QS, an-Nisa: 176).

بَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ إِخْوَةٌ  
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا أُخْتَيْنِ  
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ  
 الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾



Artinya: 'Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) (kalalah adalah seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu'

- d. Suami jika isterinya yang meninggal tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan (QS. An-Nisa: 12).
2. Orang yang mendapat bagian 1/3 adalah:
  - a. Ibu jika yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik seibu seapak ataupun seapak saja atau seibu saja (QS. An-Nisa: 11).
  - b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Orang yang mendapat bagian ¼ adalah:
  - a. Suami jika isterinya yang meninggal itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan, atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan.
  - b. Isteri (baik hanya satu orang ataupun lebih isteri yang di-polygami) jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun anak perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan). Lalu, jika isteri itu lebih dari satu, ¼ itu dibagi rata di antara mereka masing-masing.
4. Orang yang mendapat bagian 1/6 adalah:

- a. Ibu jika ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, seibu seapak saja, atau seibu saja (QS. An-Nisa: 11).
  - b. Bapak si mayat jika yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki (QS. An-Nisa: 11).
  - c. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak) jika ibu tidak ada.
  - d. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki). Mereka mendapat  $\frac{1}{6}$  ini baik sendiri maupun banyak jika bersama-sama seorang anak perempuan. Namun, jika anak perempuan banyak, maka cucu perempuan tadi tidak mendapat pusaka.
  - e. Kakek (bapak dari bapak) jika beserta anak atau anak dari anak laki-laki, sedangkan bapak tidak ada.
  - f. Untuk seorang saudara yang seibu baik laki-laki maupun perempuan (QS. An-Nisa: 12).
  - g. Saudara perempuan yang seapak saja baik sendiri ataupun banyak jika beserta saudara perempuan yang seibu seapak. Jika saudara seibu seapak banyak (dua orang atau lebih), maka saudara seapak tidak mendapat pusaka.
5. Orang yang mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  adalah isteri baik satu maupun banyak jika suaminya meninggalkan anak baik anak laki-laki ataupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan (QS. An-Nisa: 12).
  6. Orang yang mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  adalah:
    - a. Dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki (QS. An-Nisa: 11).
    - b. Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Jika anak perempuan tidak ada berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang banyak itu, mereka mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak  $\frac{2}{3}$  dari harta.
    - c. Saudara perempuan yang seibu seapak jika dua orang atau lebih.
    - d. Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih.



Sementara itu, *'asabah* artinya kerabat seseorang dari jurusan ayah, sedangkan menurut *fuqaha'* adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian yang sudah dipastikan besar-kecilnya yang telah disepakati oleh seluruh *fuqaha'* (seperti *ashab al-furud*) dan yang belum disepakati oleh mereka (*zaw al-arham*). *'Asabah* ini adalah orang yang menghabiskan seluruh harta yang tertinggal dari si mayat setelah dibagi menurut bagian masing-masing yang ada berdasarkan ketentuan di atas.

*'Asabah* ini dibagi dua bagian, yaitu:

1. ***'Asabah an-nasabiyah*** yang dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu:
- a. ***'Asabah bi an-nafs (dengan sendirinya)***.

*'Asabah bi an-nafs* adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan *muwarris* tanpa diselingi oleh perempuan. Ketentuan ini dapat mengandung dua pengertian, yaitu (pertama) antara mereka dengan *muwarris* tidak ada perantara sama sekali seperti anak laki-laki dan ayah *muwarris* dan (kedua) terdapat perantara, tetapi perantaranya bukan perempuan seperti cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayahnya ayah, saudara sekandung dan saudara seayah.

Untuk itu, urutan *'asabah* ini dibagi empat, yaitu:

- 1) Anak laki-laki dan cucu laki-laki betapapun jauh keturunannya ke bawah. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. Dibawah ini:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: 'Rasulullah saw bersabda, 'Berikanlah harta warisan (*faraid*) kepada ahlinya (orang-orang yang berhak menerimanya), sedangkan sisanya adalah untuk golongan laki-laki dalam garis laki-laki' (HR. Sahih Bukhari dalam Kitab Faraidh nomor hadis 6235).

Oleh karena itulah, berdasarkan hadis di atas bahwa anak laki-laki dianggap tidak termasuk *ashab al-furud*, melainkan *'asabah* tulen.

- 2) Ayah dan kakek betapapun jauh silsilahnya ke atas.

- 3) Kerabat menyamping *muwarris* yang dekat yakni keturunan dari ayah *muwarris* seperti saudara-saudara *muwarris* dan anak laki-laki mereka betapa pun jauh keturunannya ke bawah.
- 4) Kerabat menyamping yang jauh yakni keturunan dari kakek *muwarris* betapa pun jauh silsilahnya ke atas. Seperti saudara laki-laki ayah *muwarris* dan anak laki-laki mereka sampai terus ke bawah dan saudara laki-laki kakek *muwarris* dan anak laki-laki mereka sampai seterusnya.

Jika para ahli waris *ashabah* tersebut ada, maka yang harus didahulukan ialah mereka yang terdekat hubungan *nasab* dengan *muwarris*. Oleh karena itu, jika didapati anak laki-laki mewarisi bersama-sama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, hendaklah didahulukan anak laki-laki. Jika ayah mewarisi bersama-sama dengan kakek, hendaknya ayah didahulukan. Jika saudara laki-laki mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki saudaranya, harus didahulukan saudara laki-laki dan jika paman mewarisi bersama-sama dengan anak laki-lakinya paman hendaklah didahulukan paman.

#### b. 'Asabah bi al-gair.

'*Asabah bi al-gair* adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi posisi sebagai '*asabah* dan untuk bersama-sama menerima '*usubah*. '*Asabah bi al-gair* ini ada 4 orang perempuan yang bagian (*fard*) mereka  $\frac{1}{2}$  bila tunggal dan  $\frac{2}{3}$  jika lebih dari seorang, yaitu:

1. Anak perempuan kandung.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
3. Saudari sekandung.
4. Saudari seayah.

Jika salah seorang dari wanita-wanita tersebut bersama-sama dengan seorang *mu'assib bi an-nafsi*, ia menjadi '*asabah bi al-gair* (bersama dengan orang lain). Ia bersama-sama dengan *mua'ssib*-nya menerima sisa harta peninggalan dan *ashab al-furud* atau seluruh harta peninggalan jika tidak ada *ashab al-furud*, dengan ketentuan orang yang laki-laki mendapat dua kali lipat bagian orang perempuan.

Orang laki-laki yang diperlukan untuk menjadikannya '*asabah* orang-orang perempuan tersebut dan ikut bersama-sama dengan mereka dalam menerima '*usubah*, yaitu:



1. Anak laki-laki kandung. Ia adalah *mu'assib* bagi anak perempuan kandung.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki atau anak laki-laki pamannya. Mereka adalah *mu'assib* bagi cucu perempuan dari anak laki-laki. Juga orang laki-laki yang lebih rendah derajatnya daripada cucu perempuan laki-laki. Misalnya anak laki-lakinya cucu laki-laki dari anak laki-laki (*ibnu-ibni-ibni*) jika cucu perempuan tersebut membutuhkan kepadanya. Hal itu disebabkan bahwa dua orang anak perempuan yang mewarisi bersama-sama dengannya telah menghabiskan  $\frac{2}{3}$  harta peninggalan.
3. Saudara kandung. Ia adalah *mu'assib* bagi saudarinya yang sekandung pula.
4. Saudara seayah. Ia adalah *mu'assib* terhadap saudarinya yang seayah.
5. Kakek dalam beberapa keadaan adalah sebagai *mu'assib* terhadap saudari-saudari sekandung atau seayah.

Syarat-syarat perempuan yang menjadi '*asabah bi al-gair* adalah:

1. Perempuan tersebut hendaknya tergolong ahli waris *ashab al-furud*.
2. Adanya persamaan kelompok (*jihat*) antara perempuan *ashab al-furud* dengan *mu'assib*-nya. Dengan demikian, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang mewarisi bersama-sama dengan saudara kandung, tidak menjadi '*asabah bi al-gair* karena *jihat* mereka tidak sama. Anak perempuan atau cucu perempuan anak laki-laki *jihat*-nya adalah *jihat al-bunuwah* (level anak atau cucu dari *muwarris*). Sementara itu, saudara sekandung *jihat*-nya adalah *jihat al-ukhuwah* (level saudara dari *muwarris*).
3. Adanya persamaan derajat antara perempuan *ashab al-furud* dengan *mu'assib*-nya. Oleh karena itu, cucu perempuan dari anak laki-laki (berderajat dua) jika ia bersama-sama mewarisi dengan anak laki-laki (berderajat satu), tidak dapat menjadi '*asabah bi al-gair* sebagai mana halnya saudari kandung (berderajat dua) jika bersama-sama dengan anak laki-laki saudara kandung (berderajat tiga). Misalnya, saudara kandung mendapat  $\frac{1}{2}$  saham (*fard*) kemudian sisanya yang  $\frac{1}{2}$  diberikan kepada anak laki-laki saudara sekandung secara '*usubah*.
4. Adanya persamaan kekuatan kerabat antara perempuan *ashab*

*al-furud* dengan *mu'assib*-nya. Oleh karena itu, saudari sekandung (yang mempunyai dua jurusan kekerabatan) jika bersama-sama dengan saudara seayah (yang hanya mempunyai satu jurusan kekerabatan) tidak dapat menjadi '*asabah bi al-gair*. Kecuali cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menjadi '*asabah bi al-gair* dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lebih rendah derajatnya, jika ia dibutuhkan oleh cucu perempuan tersebut untuk memperoleh pusaka sebab yang belakangan ini tidak bakal menerima pusaka sekiranya tidak dengan jalan '*asabah bi al-gair*.

### c. '*Asabah ma'a al-gair*.

*Asabah ma'a al-gair* adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan '*asabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam '*usubah*. *Mu'assib* (orang yang menjadikan '*asabah*) nya tetap menerima bagian menurut *fard* (saham) nya sendiri. '*Asabah ma'a al-gair* itu hanya berjumlah 2 orang perempuan dari ahli waris *ashab al-furud*, yaitu:

1. Saudari sekandung.
2. Saudari seayah.

Kedua orang di atas dapat menjadi '*asabah ma'a al-gair* dengan syarat:

1. Berdampingan dengan seorang atau beberapa orang anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki sampai seterusnya.
2. Tidak berdampingan dengan saudaranya yang menjadi *mu'assib*-nya.

Sebagaimana telah diterang di atas bahwa *mu'assib ma'a al-gair* itu diperlukan hanya semata-mata untuk menjadikan '*asabah* saudari-saudaranya saja untuk menerima '*usubah*, sedangkan dia sendiri tidak ikut menerima '*usubah*. Ia sebagai *mu'assib* hanya menerima harta peninggalan sesuai dengan *fard*-nya dan saudari yang di-'*asabah*-kan memperoleh sisa harta peninggalan setelah digunakan untuk memenuhi *fard* *ashab al-furud*, termasuk *fard* *mu'assib*-nya. Pada '*asabah ma'a al-gair* ini *mu'assib*-nya tidak turut menerima '*usubah*. Ia hanya diminta untuk meng-'*asabah*-kan saja. Selesai tugasnya, ia menduduki fungsinya semula sebagai *ashab al-furud*.

Dasar hukum adanya ahli waris '*asabah ma'a al-ghair* ini adalah hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari di bawah ini,



حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ سُئِلَ  
 أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةٍ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ  
 وَأَتِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَيِّتَابِعُنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى  
 فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْإِبْنِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ  
 فَلِلْأُخْتِ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأُخْبِرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا  
 دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

Artinya: 'Dari Ibnu Mas'ud r.a. tentang anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Nabi saw. menetapkan hak warisan untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, untuk melengkapi dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan". (HR. Shahih Bukhari Kitab al-Faraid no. 6239).

Berdasarkan keterangan di atas, maka urutan pembagian harta didahulukan daripada yang lain. Jika urutan pertama tidak ada, maka digantikan urutan yang selanjutnya yaitu *ashab al-furud*, 'asabah: 'asabah bi an-nafs, 'asabah bi al-gair, dan 'ashabah ma'a al-gair, kemudian, *zaw al-arham*.

2. **'Asabah as-Sababiyah** yaitu 'asabah karena peristiwa sumpah setia antara dua orang/lebih yang tidak mempunyai hubungan *nasab* untuk bersumpah akan saling waris-mewarisi jika salah seorang dari mereka telah meninggal dunia. 'Asabah berdasarkan sumpah setia ini hanya terjadi ketika Muhajirin dan Anshar dipersatukan dalam peristiwa hijrah dahulu. Setelah peristiwa ini, 'asabah dengan sumpah setia sudah tidak berlaku lagi. Namun, 'Asabah as-Sababiyah dapat juga diberlakukan kepada suami dan isteri. Mereka berdua bisa saling mewarisi disebabkan perkawinan.

## E. Hijab

Secara etimologi *hijab* artinya penutup, tabir, tirai, layer ataupun sekat, sedangkan secara terminologi adalah ahli waris yang dapat menutup/menghalangi ahli waris yang lain untuk memperoleh bagian-bagian tertentu harta warisan.

Ahli waris yang dapat di-*hijab* adalah sebagai berikut:

1. Nenek (ibu dari ibu ayah atau ibu dari bapak) di-*hijab* oleh ibu.
2. Kakek di-*hijab* oleh ayah.
3. Saudara seibu di-*hijab* oleh salah seorang dari empat di bawah ini:
  - a. Anak baik laki-laki ataupun perempuan.
  - b. Anak dari anak laki-laki baik laki-laki maupun perempuan.
  - c. Bapak.
  - d. Kakek.
4. Saudara seapak di-*hijab* oleh salah seorang dari empat di bawah ini:
  - a. Bapak.
  - b. Anak laki-laki.
  - c. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)
  - d. Saudara laki-laki yang seibu seapak.
5. Saudara seibu seapak di-*hijab* salah satu dari tiga di bawah ini:
  - a. Anak laki-laki.
  - b. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)
  - c. Bapak.
6. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak laki-laki di-*hijab* oleh anak (laki-laki atau perempuan).

Selain yang disebutkan di atas, peng-*hijab*-an juga terjadi seperti di bawah ini, yaitu:

1. Saudara laki-laki bapak (paman dari pihak bapak) meng-*hijab* saudara perempuan bapak (bibi) tidak mendapat warisan.
2. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (anak laki-laki paman dari pihak bapak) meng-*hijab* anak perempuannya tidak mendapat warisan.



3. Anak laki-laki saudara laki-laki meng-*hijab* anak perempuannya tidak mendapat warisan.
4. Orang yang memerdekakan budak (jenazah) di-*hijab* oleh ahli waris hubungan *nasab*/kerabat.

## F. *Zawil Arham*.

Secara etimologi *zawil arham* artinya yang mempunyai kasih sayang, sedangkan secara terminologi adalah para ahli waris selain *sahib al-furud*/*Furud al-muqaddarah* dan *'asabah*, baik laki-laki maupun perempuan serta seorang ataupun banyak.

Ulama ikhtilaf dalam menentukan apakah *zawil arham* berhak memiliki harta warisan, yaitu:

1. Ulama yang mengatakan tidak berhak menerima harta warisan, sisa harta warisan, *radd*, atau terhadap seluruh harta warisan bagi yang tidak mempunyai ahli waris. Seluruhnya diserahkan pada *Baitul Mal* dan bukan bagi *zawil arham*, seperti pendapat dari golongan sahabat; Zaid bin Sabit dan Ibnu 'Abbas. Dari golongan Tabi'in; Sa'id ibn Musayyab, Sa'ad bin Jubair. Dari golongan Fuqaha' Sufyan as-Saury, Imam Malik, Imam Syafi'iy, Al-Auza'iy, dan Ibnu Hazm,
2. Ulama yang mengatakan berhak menerima harta warisan jika *muwarris* wafat tidak memiliki ahli waris *ashab al-furudh* yang dapat menerima *radd* atau ahli waris *'asabah nasabiyah*. Pendapat dari golongan ini seperti; Keempat dari Khulafa' ar-Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali, Ibnu 'Abbas, salah satu pendapat Ibnu Mas'ud, Muaz bin Jabal. Dari Tabi'in ; Syuraih al-Qadhi, Ibnu Sirin, Atha', dan Mujahid. Dari golongan Imam Mazhab dan Mujtahid; Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad, Ibnu Abi Laila, Ishaq bin Ruhawaih dan *Fuqaha'* selanjutnya dari mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah.

Rumpun-rumpun *zawil arham* ini menurut mereka adalah:

1. Anak turunannya anak-anak si mati (cucu-cucu) yang tidak termasuk *ashab al-furud* dan *'asabah*.
2. Kakek *ghair sahih* dan nenek-nenek *ghair sahih*.

3. Anak turunannya saudara-saudari yang tidak termasuk *ashab al-furud* dan *'asabah*.
4. Anak turunannya kakek dan nenek, betapa tinggi mendakinya yang tidak tergolong *'asabah*.

Cara pembagian untuk *zawil arham* ini yaitu jika *zawil arham* itu hanya seorang diri, baik laki-laki maupun perempuan menerima seluruh harta peninggalan atau sisa harta peninggalan setelah diambil *fardh* salah seorang suami/isteri bila ia mewarisi bersama dengan seorang suami/isteri. Jika *zawil arham* lebih dari seorang yang berlainan rumpun mereka atau bersamaan rumpun, tetapi berbeda kelompok *jihat*, derajat, dan kekuatan kerabat mereka, maka ulama berbeda-beda pendapatnya tentang azas-azas dan cara membagikan harta warisan kepada mereka. Azas-azas tersebut ada 3 macam, yaitu:

1. *Al-qarabah* (dekatnya hubungan kerabat dengan orang yang meninggal).
2. *At-Tanzil* (penempatan kepada status kerabat yang menyebabkan adanya pertalian *nasab* dengan si mati).
3. *Ar-Rahim* (kekerabatan).<sup>6</sup>

## G. Metode dan Contoh Pembagian Harta Warisan.

### 1. 'Aul.

Berdasarkan dasar kata *'aul* berarti *bertambah* dan dapat juga diartikan *menaikkan*, sedangkan menurut istilah *'Aul* adalah suatu sistem pembagian harta warisan dengan meninjau adanya kelebihan dalam saham-saham para ahli waris dari besarnya asal masalah (lazim dalam bidang Matematika dengan singkatan KPK atau Kelipatan Persekutuan terkecil) dan adanya penyusutan dalam kadar penerimaan mereka dikarenakan asal masalahnya mepet, tidak cukup untuk menerima *fard-fard* dari *ashab al-furud*.<sup>7</sup>

Jumlah saham yang diterima oleh *ashab al-furud* lebih besar daripada jumlah saham yang akan dibagi, yang digambarkan dengan asal masalah. Misalnya, seorang yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami dan 2 orang saudara kandung, maka suami memperoleh  $\frac{1}{2}$  *fard* (3 saham dari asal masalah 6) dan 2 orang saudara kandung menerima  $\frac{2}{3}$  *fard* (4 saham). Padahal jumlah saham

yang dibagi akan diter  
Jika terja  
saham ya  
masalah i  
dinaikkan

Pene  
dari perka  
mempopo

Pada  
saw, teta  
dia ditan  
ahli wari  
sekandun  
sekandun  
perempu  
kelebihar  
sekirany  
didahulu  
bin Abdu  
atau dua  
lain'. 'Ab  
tersebut  
tersebut  
tersebut  
angka ju

Seb  
saham-s  
sehingga  
cukup. U  
nilai per  
6 saham  
bernilai  
tentu set  
daripada

Unt  
cara;



yang dibagi (*asal masalah*) hanya 6, sedangkan jumlah saham yang akan diterimakan ada 7, jadi terdapat selisih kurang yaitu 1 (satu) saham. Jika terjadi demikian, asal masalahnya perlu diperbesar sebesar jumlah saham yang diterima oleh *ashab al-furud*. Akibat dari menaikkan asal masalah ini, nilai 1 (satu) saham akan menjadi lebih kecil daripada sebelum dinaikkan, tetapi jumlah harta peninggalan yang dibagi tidak berubah.

Penerimaan seperti di atas disebut dengan '*aul*'. Kata-kata ini berasal dari perkataan '*aul*' yang artinya naik dan untuk selanjutnya pada *faradiyun* mempopulerkan persoalan ini dengan masalah '*aul*'.

Pada awalnya masalah '*aul*' ini belum muncul di masa Nabi Muhammad saw., tetapi kasus ini terjadi pada masa khalifah 'Umar bin Khattab. Ketika dia ditanya orang tentang penyelesaian pembagian warisan dimana ahli warisnya terdiri dari; suami dan dua orang saudara perempuan sekandung. Suami  $\frac{1}{2}$  karena tidak ada anak dan 2 orang saudara perempuan sekandung  $\frac{2}{3}$ . Jika asal masalahnya 6, suami  $\frac{1}{2} \times 6 = 3$  dan saudara perempuan sekandung  $\frac{2}{3} \times 6 = 4$ . jumlah keseluruhan adalah 7 berarti kelebihan 1. Dalam menghadapi pertanyaan tersebut Umar bimbang sebab sekiranya telah mengetahuinya siapa diantara mereka yang harus didahulukan. Hal ini disampaikan kepada Zaid bin Sabit dan 'Abbas bin Abdul Mutalib dengan berkata, '*Jika aku mendahulukan bagian suami atau dua saudari perempuan itu, maka tidak tersisa lagi hak bagi yang lain*'. 'Abbas bin Abdul Muthalib mengemukakan pendapat agar masalah tersebut di'*aul*'kan. Atas dasar usul sahabat 'Abbas bin Abdul Mutalib tersebut dan disaksikan oleh Zaid bin Sabit, Umar menyelesaikan kasus tersebut dengan cara '*aul*' yaitu menaikkan angka asal masalah sebesar angka jumlah yang diterima ahli waris semula.

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa dalam '*aul*' ini jumlah saham-saham dari para *ashab al-furud* lebih besar daripada asal masalah sehingga untuk memenuhi saham-saham mereka secara sempurna tidak cukup. Untuk itu, asal masalahnya harus dinaikkan dan sebagai akibatnya nilai per-saham menjadi kurang. Misalnya, uang Rp. 42.000,- dijadikan 6 saham (seluruh saham ini sebagai asal masalah), maka tiap saham bernilai Rp. 7000,-. Jika asal masalahnya di'*aul*'kan, misalnya dijadikan 7, tentu setiap saham nilainya lebih kecil (yaitu Rp. 42.000,- : 7 : Rp. 6000,-) daripada saham yang pertama.

Untuk menyelesaikan masalah '*aul*' ini dapat ditempuh dengan cara;

- a. Jalan yang ditempuh oleh para *faradiyun* adalah:
- 1) Setelah diketahui *fard* dari masing-masing *ashhabul furud* hendaknya dicari asal masalahnya.
  - 2) Dicari saham-saham dari masing-masing *ashab al-furud*.
  - 3) Saham-saham *ashab al-furud* ini kemudian dijumlah.
  - 4) Asal masalah yang semula tidak dipakai lagi, tetapi yang dijadikan asal masalah baru ialah jumlah saham-saham yang diterima oleh para ahli waris.
  - 5) Jumlah sisa kurang dari peninggalan yang terbagi ditanggung oleh *ashab al-furud* dengan jalan mengurangi penerimaan masing-masing menurut perbandingan *furud* atau saham mereka masing-masing.
- b. Jalan menurut ilmu hitung ialah dengan mengadakan perbandingan *furud*/saham mereka satu sama lain. Kemudian, saham mereka dijumlah. Jumlah ini dipakai untuk membagi harta pusaka agar diketahui berapa harga tiap-tiap bagian. Setelah harga tiap-tiap bagian diketahui, tentu diketahui bagian mereka masing-masing.

Contoh-contoh dan peyelesaiannya;

- A. Harta peninggalan sejumlah Rp. 42.000,-. Ahli waris terdiri dari suami dan 2 orang Saudari kandung, maka menurut:

1. Contoh cara a:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 6 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp. 42.000,-
Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp. 42.000,-}}{6}$	Rp. 21.000,-
2 Sdri. kand.	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3} \times 6 = 4$	$4 \times \frac{\text{Rp. 42.000,-}}{6}$	Rp. 28.000,-
			Sisa kurang:	Rp. 7.000,-

Sisa kekurangan yang terdapat tabel di atas merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sisa minus (Rp.7000,-) karena menggunakan asal masalah 6. Untuk lebih tepat dan adil pembagian masing-masing ahli waris, maka digunakan 'aul dengan cara menaikkan (meng-



'aulkan) asal masalah menjadi 7 yang merupakan hasil penjumlahan kpk-nya) sebagaimana cara b di bawah ini;

2. Contoh cara b;

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 6 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp. 42.000.,
Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp. 42.000,-}}{7}$	Rp. 18.000,-
2 Sdri. kand.	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3} \times 6 = 4$	$4 \times \frac{\text{Rp. 42.000,-}}{7}$	Rp. 24.000,-
		Jumlah : 7		

Keterangan:

1. a.m adalah ringkasan dari asal masalah Persekutuan bilangan yang Terkecil (KPT).
2. Jumlah : 7 dijadikan a.m. dalam 'aul.

Hal ini harus dipotong dari penerimaan masing-masing dengan jalan membandingkan fard-fard-nya.

Perbandingan fard masing-masing	$= \frac{1}{2} : \frac{2}{3} = 3 : 4.$
Jumlah perbandingan	$= 3 + 4 = 7 = \text{Rp. 7.000,-}$
Potongan untuk suami	$= \frac{3}{7} \times \text{Rp. 7.000,-} = \text{Rp. 3.000,-}$
Potongan untuk 2 Saudari kandung	$= \frac{4}{7} \times \text{Rp. 7.000,-} = \text{Rp. 4.000,-}$
Penerimaan suami tunggal	$= \text{Rp. 21.000} - \text{Rp. 3.000} = \text{Rp. 18.000,-}$
Penerimaan 2 Saudari kandung	$= \text{Rp. 28.000} - \text{Rp. 4.000} = \text{Rp. 24.000,-}$
Total:	$= \text{Rp. 42.000,-}$

3. *Contoh Cara c:*

Jumlah harta yang dibagi	Rp. 42.000,-
Perbandingan <i>furud</i> suami dibanding dengan 2 saudari kandung	$\frac{1}{2} : \frac{2}{3} = 3 : 4$ .
Jumlah perbandingan	$3 + 4 = 7$ Rp. 42.000,-
Penerimaan suami	$\frac{3}{7} \times \text{Rp. 42.000,-} = \text{Rp. 18.000,-}$
Penerimaan 2 saudari kandung	$\frac{4}{7} \times \text{Rp. 42.000,-} = \text{Rp. 24.000,-}$

B. *Contoh yang lain; harta peninggalan muwarris sejumlah Rp. 84.000,-, sedangkan ahli warisnya terdiri dari suami, saudari kandung dan saudari tunggal ibu, maka penyelesaiannya:*

1. *Contoh cara a:*

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 6 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp. 84.000,-
Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp. 84.000,-}}{6}$	Rp. 42.000,-
Sdri. kand.	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp. 84.000,-}}{6}$	Rp. 42.000,-
Sdri. seibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 6 = 1$	$\frac{1 \times \text{Rp. 84.000,-}}{6}$	Rp. 14.000,-
			Sisa kurang	Rp. 14.000,-

2. *Contoh cara b;*

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 6 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp. 84.000,-
Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp. 84.000,-}}{7}$	Rp. 36.000,-
Sdri. kand.	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp. 84.000,-}}{7}$	Rp. 36.000,-
Sdri. seibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 6 = 1$	$\frac{1 \times \text{Rp. 84.000,-}}{7}$	Rp. 12.000,-
		Jumlah: 7	Total :	Rp. 84.000,-

Ketr. : Jumlah 7 dijadikan a.m. dalam 'aul.

Hal ini har

Perbandingan fu

Jumlah perban

Potongan untu

Potongan untu

Penerimaan su

Penerimaan sdr

Penerimaan sdr

Total

3. *Contoh car*

Jumlah harta peni
Perbandingan fur
Jumlah perbandin
Penerimaan suam
Penerimaan sauda
Penerimaan sauda

C. *Contoh yang terdiri : iste*

Ahli waris	Fardh
Isteri	$\frac{1}{8}$
2 anak pr.	$\frac{2}{3}$
Ayah	$\frac{1}{6}$
Ibu	$\frac{1}{6}$

Keterangan: Jum



Hal ini harus dipotongkan dari penerimaan masing-masing dengan jalan:

Perbandingan <i>fard</i> masing-masing	$= \frac{1}{2} : \frac{1}{2} : \frac{1}{6} = 3 : 3 : 1.$
Jumlah perbandingan	$= 3 + 3 + 1 = 7 = \text{Rp. } 14.000,-$
Potongan untuk suami	$= \frac{3}{7} \times \text{Rp. } 14.000,- = \text{Rp. } 6000,-$
Potongan untuk saudari kandung	$= \frac{1}{7} \times \text{Rp. } 14.000,- = \text{Rp. } 2.000,-$
Penerimaan suami tinggal	$= \text{Rp. } 42.000,- - \text{Rp. } 6.000,- = \text{Rp. } 36.000,-$
Penerimaan sdri. kand. Tinggal	$= \text{Rp. } 42.000 - \text{Rp. } 6000 = \text{Rp. } 36.000,-$
Penerimaan sdri. seibu tinggal	$= \text{Rp. } 14.000 - \text{Rp. } 2000 = \text{Rp. } 12.000,-$
Total	$= \text{Rp. } 84.000,-$

### 3. Contoh cara d:

Jumlah harta peninggalan yang dibagi	Rp. 84.000,-
Perbandingan furud masing-masing	$\frac{1}{2} : \frac{1}{2} : \frac{1}{6} = 3 : 3 : 1.$
Jumlah perbandingan	$3 + 3 + 1 = 7 = \text{Rp. } 84.000,-$
Penerimaan suami	$\frac{3}{7} \times \text{Rp. } 84.000,- = \text{Rp. } 36.000,$
Penerimaan saudari kandung	$\frac{3}{7} \times \text{Rp. } 84.000,- = \text{Rp. } 36.000,$
Penerimaan saudari seibu	$\frac{1}{7} \times \text{Rp. } 84.000,- = \text{Rp. } 12.000,$

C. Contoh yang lain harta peninggalan sejumlah Rp. 64.000,-. Ahli waris terdiri : isteri, 2 orang anak perempuan, ayah dan ibu, maka :

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 24 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp. 64.000,-
Isteri	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} \times 24 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp. } 64.000,-}{27}$	Rp. 7.111,-
2 anak pr.	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3} \times 24 = 16$	$16 \times \frac{\text{Rp. } 64.000,-}{27}$	Rp. 37.925,-
Ayah	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 24 = 4$	$\frac{4 \times 64.000,-}{27}$	Rp. 9.481,-
Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 24 = 4$	$\frac{4 \times \text{Rp. } 64.000,-}{27}$	Rp. 9.481,-
		Jumlah : 27		Rp. 63.998,- Pembulatan menjadi Rp. 64.000,-

Keterangan: Jumlah 27 dijadikan a.m. baru dalam 'aul.

D. Contoh berikutnya: Harta peninggalan muwarris sebesar Rp. 15.000,- Ahli warisnya terdiri dari isteri, 2 orang Saudari kandung dan Saudari tunggal ibu, maka:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 12 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp. 15.000,-
isteri	1/4	$1/4 \times 12 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp. 15.000,-}}{13}$	Rp. 3.461,-
2 Sdri. knd.	2/3	$2/3 \times 12 = 8$	$8 \times \frac{\text{Rp. 15.000,-}}{13}$	Rp. 9.230,-
Sdri. seibu	1/6	$1/6 \times 12 = 2$	$2 \times \frac{\text{Rp. 15.000,-}}{13}$	Rp. 2.307,-
		Jumlah: 13	Total :	Rp. 14.998,- Pembulatan menjadi Rp. 15.000,-

Ketr. : Jumlah 13 dijadikan a.m. dalam 'aul.

## 2. Radd.

Berdasarkan arti dasar *radd* adalah *mengembalikan*. Dikatakan *radd* jika jumlah saham-saham para ahli waris lebih kecil daripada asal masalah yang akan dibagi, maka sudah tentu memerlukan penyelesaian setepat-tepatnya agar harta peninggalan yang akan dibagi tidak ada sisa lebih yang tiada terbagi. Dalam lapangan ilmu *mawaris* sisa lebih tersebut harus dikembalikan lagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya menurut perbandingan besar-kecilnya *fard* atau saham yang mereka terima masing-masing dan harus diperhatikan pula siapa di antara para ahli waris yang tidak berhak lagi menerima tambahan. Pengembalian sisa lebih kepada mereka yang berhak menerima kelebihan ini yang disebut dengan *radd*.<sup>8</sup>

Untuk itu, *radd* memiliki rukun, yaitu:

1. Terwujudnya *ashab al-furud*.
2. Terwujudnya kelebihan saham.
3. Tidak adanya ahli waris *'asabah*.

Ketiga rukun itu harus ada karena jika salah satu dari rukun tersebut



tidak ada, maka tidak akan terjadi *radd*. Misalnya, jika para ahli waris dari seseorang yang mati semuanya terdiri dari '*asabah*', maka harta peninggalan, yang dalam hal seperti ini asal masalahnya ialah '*addad ar-russ*' dari seluruh '*asabah*' atau beberapa orang '*ashab al-furud*' dan seorang '*asabah*', niscaya tidak akan bersisa lebih atau tersisa kurang. Demikian juga, jika jumlah saham-saham dari para ahli waris adalah sebesar jumlah *asal masalah* sehingga tidak ada kelebihan sedikitpun, tentu tidak akan terjadi masalah *radd*.

Ahli waris yang berhak menerima *radd* ini semuanya berjumlah 12 orang. Empat orang dari jumlah tersebut terdiri dari orang laki-laki, yaitu:

1. Suami (kalau ada *ashabul furudh* tidak mendapat *radd*).
2. Ayah.
3. Kakek *sahih* betapapun jauh silsilahnya ke atas.
4. Saudara tunggal ibu.

Kemudian, yang delapan orang lagi terdiri dari perempuan semuanya, yaitu:

1. Isteri (kalau ada *ashabul furudh* tidak mendapat *radd*).
2. Ibu.
3. Nenek *sahihah* betapapun jauh silsilah ke atasnya.
4. Saudari kandung.
5. Saudari seayah.
6. Saudari seibu.
7. Anak perempuan, dan
8. Cucu perempuan dari anak laki-laki betapapun jauh keturunannya ke bawah.
9. Ayah dan kakek *sahih*, menurut jumhur disingkirkan dari menerima *radd* karena *radd* itu tidak akan terjadi pada saat wujudnya '*asabah*', yang dapat menghendaki sisa harta peninggalan setelah '*ashab al-furud*'. Ayah dan kakek keduanya dalam satu keadaan dapat menerima dengan jalan *fard* dan dalam suatu keadaan yang lain dapat menerima harta peninggalan dengan jalan mengambil sisa harta peninggalan. Andaikata masih terdapat sisa lebih, maka pemberian kelebihan kepada ayah dan kakek bukan dengan jalan *fard*, tetapi dengan jalan '*usubah*'.

Cara yang ditempuh untuk menyelesaikan *radd* ini lebih dahulu harus diperhatikan apakah dalam masalah tersebut terdapat ahli waris yang ditolak menerima *radd* atau tidak. Untuk itu dibagi dua cara,

- a. Jika di antara para ahli waris tidak didapatkan seorang yang ditolak menerima *radd*, maka penyelesaiannya dapat dijalankan menurut salah satu dari cara-cara di bawah in:

- 1) Hal ini dibagi tiga macam;

- a. Dicari lebih dahulu saham-saham para ahli waris *ashab al-furud*.
- b. Saham-saham para *ashab al-furud* tersebut dijumlahkan.
- c. Jumlah dari saham-saham itu dijadikan *asal* masalah baru, sebagai pengganti asal masalah yang lama.

- 2) Jumlah sisa lebih dari harta peninggalan setelah diambil untuk memenuhi bagian para *ashhabul furud*, diberikan lagi kepada mereka menurut perbandingan *fard* (saham-saham) mereka masing-masing.

- 3) Dengan memperbadingkan *fard-fard* (saham-saham) mereka satu sama lain. Kemudian, angka-angka perbandingan ini dijumlahkan. Jumlah tersebut dipergunakan untuk membagi seluruh harta peninggalan sehingga apat diketahui nilai sauan angka perbandingan. Setelah diketahui nilai satuan angka perbandingan, tentu diketahui pula jumlah bagian mereka masing-masing.

- b. Jika di antara para ahli waris terdapat seorang yang ditolak menerima *radd*, maka dapat diselesaikan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Hal ini dapat dilakukan dalam 2 hal yaitu:

- a. Seluruh *ashab al-furud* diambilkan bagiannya masing-masing menurut besar-kecilnya *fard* mereka, kemudian
- b. Sisa lebihnya diberikan kepada mereka yang berhak saja, menurut perbandingan *fard* atau saham mereka masing-masing dan kemudian penerimaan mereka dari kelebihan ini dijumlahkan dengan penerimaan mereka yang semula.

- 2) Hal ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- a. Orang yang ditolak menerima *radd* diambilkan bagiannya lebih dahulu, kemudian.

b. S

b

1

2

Persoalan

yang tidak set

1. *Radd* bisa

Ahli waris

(pengamb

Pendapat

Abu Hanif

Malikiyah

2. *Radd* dap

kepada ser

maupun so

3. Pendapat

warisan de

lainnya. M

dapat kele

tetapi dise

Contoh-contol

a. (Tidak a

A. Harta peni

terdiri dar



b. Sisanya diberikan kembali kepada para *ashab al-furud* yang berhak menerima *radd*, dengan cara:

- 1- Saham-saham mereka dijumlah untuk dijadikan asal masalah baru dalam *radd*.
- 2- Mencari asal masalah baru berdasarkan *fard-fard* mereka, kemudian jumlah saham-saham dari asal masalah baru itu dijadikan asal masalah yang baru lagi dalam *radd*.

Persoalan penyelesaian metode *radd* ini ternyata ada beberapa ulama yang tidak setuju. Sebagian setuju dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Radd* bisa dilaksanakan hanya terbatas kepada ahli waris *nasabiyah*. Ahli waris *sababiyah* (suami dan isteri) tidak dapat menerima *radd* (pengambilan harta tersisa). Demikian pendapat mayoritas ulama. Pendapat ini dikemukakan oleh Abi bin Abi Thalib yang diikuti oleh Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, *Fuqaha' Muta'akhirin* dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, syi'ah Zaidiyah dan Imamiyah.
2. *Radd* dapat dilakukan dengan mengembalikan sisa harta warisan kepada semua ahli waris yang ada, baik *ashab al-furud an-nasabiyah* maupun *sababiyah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Usman bin 'Affan.
3. Pendapat yang menolak secara mutlak penyelesaian pembagian warisan dengan cara *radd* adalah Zaid bin Sabit dan minoritas ulama lainnya. Menurut pendapat ini, jika dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta, tidak perlu dikembalikan kepada ahli waris, tetapi diserahkan ke *bait al-mal*.<sup>9</sup>

Contoh-contoh:

**a. (Tidak ada ahli waris yang ditolak menerima *radd*).**

- A. Harta peninggalan muwarris sejumlah 12 h.a. sawah. Ahli warisnya terdiri dari nenek sahahah dan saudari tunggal ibu, maka:

## 1. Contoh cara a:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 6 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sawah seluas 12 h.a.
Nenek Shahihah	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1 \times \frac{12 \text{ h.a.}}{6}$	2 h.a.
Sdri. seibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1 \times \frac{12 \text{ h.a.}}{6}$	2 h.a.
			Sisa lebih = 8 h.a.	

## 2. Contoh cara b;

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 6 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sawah seluas 12 h.a.
Nenek Shahihah	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1 \times \frac{12 \text{ h.a.}}{2}$	6 h.a.
Sdri. seibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1 \times \frac{12 \text{ h.a.}}{2}$	6 h.a.
		Jumlah = 2		

Keterangan: Jumlah 2 dijadikan a.m. baru dalam *radd*.

## 3. Contoh cara c:

Sisa lebih ini ditambahkan kepada mereka dengan jalan:

Perbandingan *furud* mereka masing-masing =  $1/6 : 1/6 = 1 : 1$ .

Jumlah perbandingan =  $1 + 1 = 2 = 8 \text{ h.a.}$

Tambahan untuk nenek *sahihah* =  $\frac{1}{2} \times 8 \text{ h.a.} = 4 \text{ h.a.}$

Tambahan untuk saudari seibu =  $\frac{1}{2} \times 8 \text{ h.a.} = 4 \text{ h.a.}$

Jadi, penerimaan nenek seharusnya =  $2 \text{ h.a.} + 4 \text{ h.a.} = 6 \text{ h.a.}$

Jadi, penerimaan saudari seibu seharusnya =  $2 \text{ h.a.} + 4 \text{ h.a.} = 6 \text{ h.a.}$

4. Contoh cara  
Jumlah pening  
Perbandingan fu  
Jumlah perban  
Penerimaan ne  
Penerimaan sa

B. Harta penir  
terdiri dari

Ahli waris	
2 orang anak perempuan	
Ibu	

b. (Ada ahli

A. Harta waris  
Nenek Sahih

1. Contoh cara

Ahli waris	Fa
isteri	1/
Nenek shahihah	1/
2 Sdri. seibu	1/



4. Contoh cara d:

Jumlah peninggalan 12 h.a.

Perbadingan *furud* masing-masing  $= 1/6 : 1/6 = 1 : 1$ .

Jumlah perbandingan  $= 1 + 1 = 2 = 12 \text{ h.a.}$

Penerimaan nenek *sahihah*  $= \frac{1}{2} \times 12 \text{ h.a.} = 6 \text{ h.a.}$

Penerimaan saudari seibu  $= \frac{1}{2} \times 12 \text{ h.a.} = 6 \text{ h.a.}$

B. Harta peninggalan muwarris sejumlah Rp. 48.000,-. Ahli warisnya terdiri dari 2 orang anak perempuan dan ibu, maka:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 6 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp. 48.000,-
2 orang anak perempuan	2/3	$2/3 \times 6 = 4$	$4 \times \frac{48.000,-}{5}$	Rp. 38.400,-
Ibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1 \times \frac{48.000,-}{5}$	Rp. 9.600,-
		Jumlah : 5		Rp. 48.000,-

b. (Ada ahli waris yang ditolak menerima *radd*).

A. Harta waris sejumlah Rp. 24.000,-. Ahli warisnya terdiri dari Isteri, Nenek Sahihah dan 2 orang Saudari tunggal ibu, maka:

1. Contoh cara a:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 12 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp. 24.000,-
isteri	1/4	$1/4 \times 12 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp.} 24.000,-}{12}$	Rp. 6.000,-
Nenek shahihah	1/6	$1/6 \times 12 = 2$	$2 \times \frac{\text{Rp.} 24.000,-}{12}$	Rp. 4.000,-
2 Sdri. seibu	1/3	$1/3 \times 12 = 4$	$4 \times \frac{24.000,-}{12}$	Rp. 8.000,-
			sisia	Rp. 6.000,

## 2. Contoh cara b:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 12 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp. 24.000,-
isteri	1/4	$1/4 \times 12 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp. 24.000,-}}{12}$	Rp. 6.000,-
			Sisa	Rp. 18.000,-
Nenek sahahah	1/6	$1/6 \times 12 = 2$	$\frac{2 \times 18.000,-}{6}$	Rp. 6.000,-
2 orang saudari seibu	1/3	$1/3 \times 12 = 4$	$4 \times \frac{\text{Rp. 18.000,-}}{6}$	Rp. 12.000,-
		Jumlah : 6		

Keterangan: Jumlah 6 dijadikan a.m. baru dalam *radd*.

## 3. Contoh cara c:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 12 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp. 24.000,-
isteri	1/4	$1/4 \times 12 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp. 24.000,-}}{12}$	Rp. 6.000,-
		a.m. : 6	Sisa	Rp. 18.000,-
Nenek sahahah	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$\frac{1 \times 18.000,-}{3}$	Rp. 6.000,-
2 orang saudari seibu	1/3	$1/3 \times 6 = 2$	$2 \times \frac{\text{Rp. 18.000,-}}{3}$	Rp. 12.000,-
		Jumlah : 3		

Keter: Jumlah : 3 dijadikan a.m. baru dalam *radd*.

## 4. Contoh cara d;

Sisa lebih ini ditambahkan (*radd*) kepada nenek dan 2 saudari seibu dengan jalan perbandingan.



Perbandingan *fard* nenek

dengan 2 saudara

$$= 1/6 : 1/3 = 1 : 2.$$

Jumlah perbandingan

$$= 1 + 2 = 3 = \text{Rp. 6.000,-}$$

Tambahan untuk nenek

$$= 1/3 \times \text{Rp. 6.000,-} = \text{Rp. 2.000,-}$$

Tambahan untuk 2 saudara

$$= 2/3 \times \text{Rp. 6.000,-} = \text{Rp. 4.000,-}$$

Penerimaan nenek seluruhnya

$$= \text{Rp. 4.000} + \text{Rp. 2.000} = \text{Rp. 6.000,-}$$

Penerimaan 2 saudara seibu

$$= \text{Rp. 8.000} + \text{Rp. 4.000} = \text{Rp. 12.000,-}$$

B. *Harta peninggalan muwarris sejumlah Rp. 48.000,-. Ahli warisnya terdiri dari 4 orang isteri, 8 orang anak perempuan dan 6 orang nenek sahahah, maka:*

1. Model a;

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 12 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp. 48.000,-
4 orang isteri	1/8	$1/8 \times 24 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp. 48.000,-}}{24}$	Rp. 6.000,-
8 orang anak perempuan	2/3	$2/3 \times 24 = 16$	$16 \times \frac{\text{Rp. 48.000,-}}{24}$	Rp. 32.000,-
6 orang nenek shahahah	1/6	$1/6 \times 24 = 4$	$4 \times \frac{\text{Rp. 48.000,-}}{24}$	Rp. 8.000,-
			Sisa lebih :	Rp. 2.000,-

## 2. Model b;

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 12 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp. 48.000,-
4 orang isteri	1/8	$1/8 \times 24 = 3$	$3 \times \text{Rp. 48.000,-}$ 23	Rp. 6.260,-
8 orang anak perempuan	2/3	$2/3 \times 24 = 16$	$16 \times \text{Rp. 48.000,-}$ 23	Rp. 33.391,-
6 orang nenek shahihah	1/6	$1/6 \times 24 = 4$	$4 \times \text{Rp. 48.000,-}$ 23	Rp. 8.347,-
			Total :	Rp. 47.998,- (Dibulatkan Rp. 48.000,-)

## 3. Model c;

Karena isteri menurut ketentuan tidak dapat menerima *radd* selama masih ada *ashab al-furud*, maka sisa lebih ini hanya di-*radd*-kan kepada 8 orang anak perempuan dan 6 orang nenek *sahihah*. Yaitu dengan memperbandingkan *fard-fard* mereka atau saham-saham mereka. Dengan demikian, penyelesaiannya sebagai berikut:

Perbandingan *fard* 8 orang anak perempuan dengan 6 orang nenek =  $2/3 : 1/6$  (atau perbandingan saham mereka =  $16 : 4$ ) =  $4 : 1$ .

Jumlah saham-saham mereka =  $4 + 1 = 5$ . Sisa yang akan dibagi = Rp. 2.000,-.

Jadi, 8 orang anak perempuan mendapat tambahan  $4/5 \times \text{Rp. 2.000,-}$  = Rp. 1.600,-

6 orang nenek *sahihah* mendapat tambahan  $1/5 \times \text{Rp. 2.000,-}$  = Rp. 400,-.

Penerimaan seluruhnya untuk:

4 orang isteri	= Rp. 6.000,-.
8 orang anak perempuan	= Rp. 32.000,- + Rp. 1.600,- = Rp. 33.600,-.
6 orang nenek <i>sahihah</i>	= Rp. 8.000,- + Rp. 400,- = Rp. 8.400,-.
seorang isteri	= Rp. 6.000,- : 4 = Rp. 1.500,-.
Seorang anak perempuan	= Rp. 33.600,- : 8 = Rp. 4.200,-.
Seorang nenek <i>sahihah</i>	= Rp. 8.400,- : 6 = Rp. 1.400,-.

Nenek *sahihah*

kepada *muwarris* t  
taliannya dengan m  
ibunya ibu, ibunya  
ibu dari ibunya ba  
*muwarris* diselingi  
(*ummi-abi-al-ab*).<sup>1</sup>

Sementara itu  
hubungan nasabny

Ringkasnya d

Khalidah

Khadijah

Ab

**Keterangan:**

Nenek-nenek yang  
Khadijah, dan Zain

Kesemua pem  
anak kandung laki  
laki-laki ada, mak  
anak kandung lak  
orang-tuanya tida  
telah ditentukan s

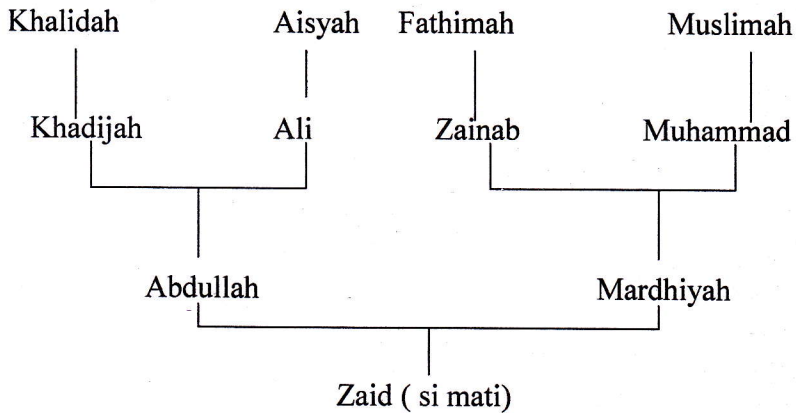
Selanjutnya,  
warisan *muwarris*  
ada, yaitu:



Nenek *sahihah* adalah leluhur perempuan (nenek) yang dipertalikan kepada *muwarris* tanpa memasukkan kakek *gair as-sahih*. Yakni pertaliannya dengan *muwarris* tanpa diselingi oleh kakek sama sekali, seperti ibunya ibu, ibunya bapak, ibu dari ibunya ibu (*ummu-ummi-ummi*) dan ibu dari ibunya bapak (*ummu-ummi-al-ab*), atau pertaliannya dengan *muwarris* diselingi oleh kakek *sahih* seperti ibu dari bapaknya bapak (*ummi-abi-al-ab*).<sup>10</sup>

Sementara itu, nenek *gair as-sahihah* disebut juga nenek yang hubungan nasabnya dengan *muwarris* tanpa diselingi oleh laki-laki.<sup>11</sup>

Ringkasnya dapat dilihat pada skema di bawah ini:



### Keterangan:

Nenek-nenek yang termasuk nenek *sahihah* ialah: Khalidah, Fathimah, Khadijah, dan Zainab. Nenek *gair as-sahihah* ialah Muslimah dan Aisyah.

Kesemua pembagian harta warisan di atas dikarenakan ketiadaan anak kandung laki-laki *muwarris* di dalamnya, tetapi jika anak kandung laki-laki ada, maka kondisinya tidak seperti itu. Hal ini dikarenakan anak kandung laki-laki adakah pendinding (*hijab*) agar harta warisan orang-tuanya tidak jatuh kepada orang lain selain orang-orang yang telah ditentukan seperti ayah dan ibu (termasuk suami/isteri).

Selanjutnya, orang-orang yang tidak terdinding / yang dapat harta warisan *muwarris* meskipun anak kandung laki-laki dan perempuan ada, yaitu:

1. Tiga orang laki-laki yaitu : anak kandung laki-laki (sendiri sebagai pendinding), ayah, dan suami.
  2. Tiga orang perempuan yaitu: anak perempuan, ibu, dan isteri.
- A. *Harta peninggalan muwarris sejumlah Rp. 72.000,-. Ahli waris yang ditinggalkan adalah 3 orang isteri, ibunya ibu, anak perempuan, dan anak laki-laki, maka:*

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 24 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp. 72.000,-
3 orang isteri	1/8	$1/8 \times 24 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp. 72.000,-}}{24}$	Rp. 9.000,-
Ibunya ibu	1/6	$1/6 \times 24 = 4$	$4 \times \frac{\text{Rp. 72.000,-}}{24}$	Rp. 12.000,-
Anak perempuan		(1)	$\frac{1 \times 51.000,-}{3^*}$	Rp. 17.000,-
	Ubg**	$24 - 7 = 17$	$17 \times \frac{\text{Rp. 72.000,-}}{24}$	Rp. 51.000,-
Anak laki-laki		(2)	$2 \times \frac{\text{Rp. 51.000,-}}{3}$	Rp. 34.000,-

**Keterangan:**

1. Tanda \* = angka tiga (3) itu adalah *asal masalah* dalam pembagian pusaka secara *'ushubah*. Angka itu berasal dari *'adadu ar-ruus* (bilangan kepala).
  2. Tanda \*\* = *'Usabah bi al-gair*, yakni sisa yang diberikan kepada ahli waris *'asabah* bersama dengan *mu'assib*-nya.
- B. *Harta peninggalan muwarris mati sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- sedangkan ahli warisnya terdiri dari suami dan 4 orang anak laki-laki, maka:*



Ahli Waris	Fardh	Dari a.m. 4 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp. 200.000,-
Suami	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times 4 = 1$	$1 \times \frac{\text{Rp. 200.000,-}}{4}$	Rp. 50.000,-
4 anak laki-laki	u. b. n	$4 - 1 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp. 200.000,-}}{4}$	Rp. 150.000,-
Masing-masing			Rp. 150.000,- : 4	Rp. 37.500,-

- C. Harta peninggalan muwarris Rp. 100.000,-, sedangkan ahli warisnya terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, maka;

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 10 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp. 100.000,-
3 anak laki-laki	u.b.g	(6)	$6 \times \frac{\text{Rp. 100.000,-}}{10}$	Rp. 60.000,-
Masing-masing			Rp. 60.000,- : 3 =	Rp. 20.000,-
4 anak perempuan	u.b.g	(4)	$4 \times \frac{\text{Rp. 100.000,-}}{10}$	Rp. 40.000,-
Masing-masing			Rp. 40.000,- : 4 =	Rp. 10.000,-

- D. Harta peninggalan si mati sejumlah Rp. 120.000,-, sedangkan ahli warisnya terdiri dari Ibu, Kakek, anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 5 sahamnya	Dari peninggalan peniramaannya	Sejumlah Rp. 120.000,-
Ibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1 \times \frac{\text{Rp. 120.000,-}}{6}$	Rp. 20.000,-
Kakek	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1 \times \frac{\text{Rp. 120.000,-}}{6}$	Rp. 20.000,-
	Sisa	$6 - 2 = 4$	$4 \times \frac{\text{Rp. 120.000,-}}{6}$	Rp. 80.000,-
Anak laki-laki	u.b.g	(2)	$2 \times \frac{\text{Rp. 80.000,-}}{4}$	Rp. 40.000,-
2 anak perempuan	u.b.b	(2)	$2 \times \frac{\text{Rp. 80.000,-}}{4}$	Rp. 40.000,-
Masing-masing			$\text{Rp. 40.000,-} : 2 =$	Rp. 20.000,-

E. Harta peninggalan si mati sejumlah Rp. 42.000,-, sedangkan ahli warisnya terdiri dari Isteri, seorang anak perempuan, dan seorang Ibu. maka:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 12 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp. 42.000,-
se orang isteri	1/8	$1/8 \times 24 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp. 42.000,-}}{19}$	Rp. 6.631,-
seorang anak perempuan	1/2	$1/2 \times 24 = 12$	$12 \times \frac{\text{Rp. 42.000,-}}{19}$	Rp. 26.526,-
se orang ibu	1/6	$1/6 \times 24 = 4$	$4 \times \frac{\text{Rp. 42.000,-}}{19}$	Rp. 8.842,-
			Total :	Rp. 41.999,- (Dibulatkan Rp. 42.000,-)



## Catatan:

<sup>1</sup> Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994). Hal. 79.

<sup>2</sup> Abdullah Zaki al-Kaff, *Fiqih Empat Mazhab*. Terjemahan (Bandung: Hasyimi Press, 2004), Cetakan II, h. 328.

<sup>3</sup> Fatchur Rahman. *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994). Hal. 79.

<sup>4</sup> Zakaria al-Ansari, *Asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir* (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa Syurahahu, tth.), h. 210.

<sup>5</sup> Muhammad bin Umar al-Bakri, *Syarah ar-Rahbiyah* (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa Syurakahu, 1349 H) h, 43.

<sup>6</sup> Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), Hal. 358 – 389 (Lebih lengkap dapat dilihat di buku ini).

<sup>7</sup> Fatchurrahman, *Ilmu Waris* h. 409.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 423.

<sup>9</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Grafindo, 1993), H. 6

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 246.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 247.

## BAB III

### JINAYAH

*Jinayah* mengandung arti perbuatan dosa, maksiat, atau kejahatan,<sup>1</sup> sedangkan menurut istilah *fuqaha jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa, harta, dan sebagainya.<sup>2</sup>

*Jinayah* dalam pengertian ini sama maksudnya dengan istilah *jarimah* yang sering digunakan oleh *fuqaha'* di dalam kitab-kitab fikih mereka. *Jarimah* itu sendiri adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. sebagian *fuqaha* memakai istilah *jinayah* hanya terbatas untuk tindak pidana yang menyangkut jiwa atau anggota badan saja dan tidak menyangkut agama atau harta benda. Oleh karena itu, tindak pidana pencurian, murtad, dan sejenisnya tidak termasuk dalam istilah *jinayah*.

Tujuan disyariatkannya *Jinayah* ini adalah dalam rangka memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Sementara itu ruang lingkupnya meliputi *ar-riddah*, *az-zina*, *hazf az-zina*, *as-syariqah*, *syarib al-khamar*, *qat'u at-thariq/al-muharabah*, dan *al-bughat*.

Seorang dikenai hukum *jinayah* jika memenuhi dua unsur, yaitu;

1. Unsur Umum yang meliputi;
  - a. Formil yaitu adanya ketentuan undang-undang.
  - b. Materil yaitu sifat yang melawan hukum.
  - c. Moril yaitu pelakunya *mukallaf*.
2. Unsur Khusus yaitu unsur yang hanya terdapat pada pidana tertentu dan antara satu jenis berbeda dengan lainnya, seperti pencurian jika ada barangnya.

Adapun *al-ahkam al-jinayah* secara teoritis adalah hukum pidana, sedangkan kata *jinayah* adalah bentuk kata sifat dari kata *al-jinayah*.



*Al-ahkam al-jinayah* disebut juga hukum publik dan ditaklifkan oleh *syara'* untuk melindungi kepentingan dan keselamatan manusia dari ancaman tindak kejahatan dan pelanggaran sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib. Dalam istilah, jenis tindak hukum yang dapat dikategorikan ke dalam golongan kejahatan dan pelanggaran ada yang telah ditentukan berdasarkan teks-teks suci. Adapula yang ditentukan berdasarkan tuntutan perkembangan pemikiran (*ijtihad*) manusia atau para ahli hukum. Rumusan *al-ahkam al-jinayah* sepanjang masih merupakan hasil penalaran terhadap teks-teks hukum istilah lazim disebut *al-Fiqih al-Jina'i*. Jika rumusan itu kemudian disahkan oleh penguasa/pemerintah sebagai undang-undang negara, maka disebut *al-Qanun al-Jina'i*.

Ditinjau dari berat dan ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku *jinayah*, maka *jinayah* dapat dibagi tiga, yaitu *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*, yang biasanya disebut dengan istilah *jarimah hudud*, *jarimah qisas*, dan *jarimah ta'zir*.

## A. Qisas.

*Qisas* secara bahasa berarti hukuman-hukuman, balasan-balasan, atau pembalasan yang sepadan terhadap suatu kelakuan yang diperbuat. Sementara itu, menurut definisi *Qisas* adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang berbentuk pembunuhan, pelukaan, pengrusakkan anggota badan atau menghilangkan manfaat anggota badan lainnya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh *syara'*.

Firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah: 178 - 179 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَنِ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ ۖ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَّأُولَىٰ ۚ أَلَا لَبِيبٌ لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٨﴾

Artinya: '(178). Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas

kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih

(179). dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa'.

Allah Swt. memberikan ketentuan qisas ini dalam ayatnya yang lain surat al-Maidah: 45,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: 'Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim'.

Dari definisi dan dalil kedua ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa qisas itu ada dua bentuk, yaitu:

- a. Qisas berkenaan dengan jiwa yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan. Jika pihak keluarga korban yang terbunuh memaafkan pembunuh, maka pihak keluarga atau pembunuh itu sendiri wajib mengganti kerugian dengan membayar sejumlah *diyat*.

Jarimah qisas/*diyat* ini hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan batas tertinggi sebagaimana yang berlaku dalam jarimah hudud. Disamping itu, jarimah qisas/*diyat* merupakan hak



pribadi. Artinya, pihak keluarga korban bisa menggugurkan hukuman *qisas* tersebut, baik melalui pemaafan maupun ganti rugi karena hak *qisas* atau *diyat* merupakan hak pribadi keluarga korban yang terbunuh.

Selengkapnya tentang jenis pembunuhan dan *diyat*-nya masing-masing dapat dilihat keterangan di bawah ini:

1. Pembunuhan dengan sengaja (*qatl al-'amd*) yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh korban dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Hukuman yang dikenakan pada pelaku pidana ini ialah *qisas*, artinya pelakunya dikenakan hukuman mati. Jika pihak keluarga terbunuh memaafkannya, maka pembunuh harus membayar *diat* (denda).
  2. Pembunuhan menyerupai dengan sengaja (*qatl syibh al-'amdi*) yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap korban, tetapi tidak disertai dengan niat untuk membunuh. Misalnya, memukul korban dengan benda ringan yang menurut kebiasaan tidak mungkin menyebabkan kematian, tetapi ternyata korban meninggal dunia tiba-tiba. Hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana ini adalah *diyat* berat (*mugallazah*) berupa 100 ekor unta dengan perincian; 30 unta betina umur 3-4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. *Diyat* ini wajib dibayar oleh pelaku pidana dengan tunai. Jika unta-unta tersebut tidak didapatkan, maka dapat diganti dengan nilai uang seharga unta-unta yang disebutkan di atas.
  3. Pembunuhan kesalahan semata (*qatl al-khata'*) yaitu pembunuhan yang terjadi semata-mata karena kesalahan pelakunya, seperti orang yang terjatuh menimpa oranglain yang menyebabkan kematiannya. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku pidana ini adalah *diyat* ringan (*mukhaffafah*) berupa 100 ekor unta dengan perincian 20 ekor unta betina umur 1-2 tahun, 2-3 tahun, 3-4 tahun, dan 4-5 tahun dengan masing-masing 20 ekor dan 20 ekor unta jantan umur 2-3 tahun. Harga unta-unta ini dapat dibayarkan dalam bentuk uang.
- b. *Qisas* badan yaitu hukuman *qisas* atau tindak pidana melukai, merusak

anggota badan, atau menghilangkan fungsi anggota badan korban/orang lain. Ancaman hukuman terhadap tindakan ini adalah *qisas*. Misalnya, bagi penganiayaan yang menyebabkan korban kehilangan penglihatannya, maka pidananya dihukum dengan menghilangkan penglihatannya pula sebagaimana pula terjadi pada penganiayaan pada telinga, tangan, dan lain-lain.

Ancaman hukuman terhadap pelaku penganiayaan ini ada dua macam, yaitu:

a. Hukuman pokok.

Hukuman pokok ini adalah *qisas*/balasan yang setimpal sebagaimana maksud dari surat Al-Maidah ayat 45 di atas. Ada 5 macam pada penganiayaan dalam hal ini yaitu: 1) Memotong bagian-bagian badan seperti tangan, telinga, dan alat kelamin, 2) Menghilangkan fungsi bagian-bagian badan seperti merusak pendengaran, 3) Pelukaan di bagian kepala, 4) Pelukaan di bagian tubuh lainnya, 5) Di luar keempat bentuk tersebut seperti memukul dengan alat yang tidak melukai.

b. Hukuman pengganti.

Hukuman pengganti ini diberlakukan jika penganiayaan ini telah dimaafkan oleh pihak korban atau keluarganya, ataupun tidak terkurnya penganiayaan tersebut, maka *diat*/denda yang jumlahnya berbeda antara kejahatan yang satu dengan yang lainnya.

Hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw sendiri dalam hadis Sunan an-Nasai yang berbunyi;

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالذِّيَّاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسَخَّتْهَا مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ



كُلَّالٍ قَلِيلٍ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَاوِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ  
اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي  
النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ وَفِي  
اللِّسَانِ الدِّيَّةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الذِّكْرِ الدِّيَّةُ  
وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ  
وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمُنْقَلَةِ خُمْسُ  
عَشْرَةٍ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنَ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ  
وَفِي السِّنِّ خُمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خُمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ  
يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ خَالَفَهُ مُحَمَّدٌ بْنُ بَكَّارٍ بَنِ  
بَلَالٍ

Artinya: 'Bahwasanya barangsiapa membunuh secara zalim seorang mukmin disertai bukti, maka sesungguhnya qisasnya bergantung kemauan keluarga yang terbunuh. Dan sesungguhnya pada satu jiwa diyatnya 100 ekor unta. Untuk satu hidung jika terjadi kecacatan satu diat. Untuk lidah satu diyat. Untuk dua bibir satu diyat. Untuk zakar satu diyat. Untuk dua pelir satu diyat. Untuk zakar satu diyat. Untuk shulbi (tulang rusuk) satu diyat. untuk dua mata satu diyat. Untuk satu kaki setengah diyat. Untuk satu luka sampai otak sepertiga diyat. Untuk tusukan pada perut sepertiga diyat. al-munaqqilah 15 ekor unta. Setiap satu jari dari kaki dan tangan 10 ekor unta. Satu gigi lima unta. Satu luka yang terlihat tulangnya lima ekor unta. Dan bahwasanya seorang laki-laki yang membunuh seorang wanita harus membayar 1000 dinar emas murni'. (HR an- Nasai Kitab al-Qasamah nomor hadis 4770)

Qisas tidak berlaku jika tidak dapat terukur peristiwa itu, seperti lebam karena pemukulan dengan benda keras. Hal ini tidak dapat diganti dengan diyat karena sulit mengukur diyatnya. Oleh karena itu, hukuman penggantinya adalah ta'zir yang ketentuan semacam ini diberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengaturnya.<sup>3</sup>

Pelaksanaan jenis *qisas* jiwa dan *qisas* anggota badan ini harus memenuhi beberapa persyaratan:

1. Pelakunya sudah balig dan berakal (*mukallaf*).
2. Pelakunya bukan ayah dari korban.
3. Korban tidak kurang derajatnya dari pelaku. Artinya, derajat disini adalah agama, merdeka dan orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, seorang muslim yang membunuh orang kafir tidak berlaku *qisas*, seorang merdeka membunuh hamba, ataupun seorang ayah membunuh anaknya juga tidak diberlakukan *qisas*. Jika *qisas* tidak terjadi, maka dilimpahkan pada hukuman *ta'zir* (dibahas kemudian).
4. *Qisas* itu dilakukan dalam hal yang sama, seperti jiwa dengan jiwa, anggota badan dengan anggota badan, misalnya mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan sebagainya.
5. *Qisas* dilakukan dengan jenis barang yang telah digunakan oleh pelaku terhadap korbannya.
6. Korban adalah orang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan suatu perjanjian, baik dia muslim maupun kafir.

Bagi pelaku pembunuhan sangat bergantung pada tiga pelaksanaan hak kepadanya, yaitu:

1. Hak Allah Swt.
2. Hak ahli waris.
3. Hak yang terbunuh.

Jika pelaku pembunuhan bertaubat dan menyerahkan diri kepada ahli waris (keluarga terbunuh) dengan proses peradilan negara, maka dia terlepas dari hak Allah Swt dan hak ahli waris apakah mereka melakukan *qisas* ataupun mengampuninya dengan membayar *diat* (denda) ataupun tidak? Setelah itu, suatu yang tinggal adalah hak yang terbunuh yang kemudian akan diganti oleh Allah Swt di akhirat kelak.<sup>4</sup>

## B. Hudud.

*Hudud* jamak dari *hadd* yang berarti larangan atau batas antara dua barang yang bertentangan. Menurut istilah *syara'*, *hudud* adalah batas-batas ketentuan Allah Swt. tentang hukuman yang diberikan kepada

orang-orang  
tidak bisa  
Hukuman  
masyarakat

Firm

مِنْ تَحْتِهَا

Artin  
dan Rasul-  
sungai-su  
yang besa

Tind  
macam, y  
dan penc

## 1. Murt

Murt  
jelas diuc  
kekafiran  
atau keya

Terh  
217,

سَبِيلِ اللَّهِ  
تَنْتَهُ أَكْبَرُ

لَمْ نَعُوْا وَمَنْ

رَفِي الدُّنْيَا



orang-orang yang berbuat dosa atau melanggar hukum. Hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun negara. Hukuman itu harus dilaksanakan karena menyangkut persoalan keamanan masyarakat secara umum.

Firman Allah dalam surat an-Nisa: 13 berbunyi,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya: "Demikianlah hudud Allah dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya mereka akan memasuki surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemengangan yang besar".

Tindak kejahatan yang termasuk dalam perkara *hudud* ada tujuh macam, yaitu murtad, *al-bagyu*, *hirabah*, zina, *qazf*, minum *khamar*, dan pencurian.

### 1. Murtad.

Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, baik secara jelas diucapkan dengan lidah, melakukan perbuatan yang menunjukkan kekafiran (misalnya sujud pada berhala), maupun mempunyai *i'tikad* atau keyakinan yang bertentangan dengan *i'tikad* Islam.

Terhadap murtad ini, firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah: 217,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: 'Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya'.

Hukuman yang dikenakan terhadap orang yang murtad ini adalah hukuman mati jika tidak bertaubat sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتَهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Artinya: "Barangsiapa mengganti agamanya (keluar dari Islam), maka bunuhlah ia" (H.R. Shahih Bukhari Kitab al-Jihad wa as-Sair no. 2794).

Konsekwensi hukum lainnya bagi orang murtad adalah secara otomatis, maka terputusnya hubungan perkawinan dengan suami-isteri yang diikat dengan seakidah Islam dan sekaligus terputusnya hubungan waris sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi pula muslim" (H.R. Shahih Bukhari Kitab Faraid no. 6267).



Umar bin Khattab memberikan proses hukuman bagi pelaku murtad ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrazak bahwa Ibnu Mas'ud sedang menghadapi penduduk Irak yang keluar dari agama Islam. kemudian, beliau menulis surat kepada Umar. Lalu, Umar membalas, "Tawarkan kepada mereka agama yang hak ini dan suruh mereka bersyahadat, *"La ilaha illallah"*. Jika mereka mau menerimanya, maka bebaskanlah mereka. Jika tidak, bunuh saja mereka !. Ternyata, hanya sebagian saja yang mau menerima ajakan Ibnu Mas'ud, maka mereka pun dilepaskan. Sebagian lagi menolak ajakannya, maka mereka dibunuh".<sup>5</sup>

Amr bin 'Ash pernah menulis surat kepada Umar untuk menanyakan tentang seorang laki-laki yang masuk Islam, kemudian kafir, masuk Islam lagi, lalu kafir lagi. Dia berbuat begitu terus, apakah Islamnya dapat diterima ? Umar berkata dalam surat balasannya, "Terimalah Islam mereka selama Allah Swt mau menerimanya. Tawarkan Islam kepadanya ! Jika dia mau menerimanya, maka lepaskan dia. Jika tidak mau, maka penggal lehernya !".<sup>6</sup>

Ibnu Qudamah mengomentari bahwa hukuman itu sudah menjadi *ijma'* para sahabat dan di antaranya mereka adalah Umar bin Khattab.

Berdasarkan sikap Umar di atas, ternyata pelaku murtad dipenjarakan terlebih dahulu. Lalu, dinasihati untuk kembali kepada agama Islam. Jika mereka kembali, maka dia dilepaskan. Jika tidak mau kembali, maka dihukum bunuh.

## 2. *Bagyu*.

*Al-Bagyu* adalah orang-orang yang telah keluar dari kebijaksanaan pemerintah dengan terang-terangan memberontak kepada pemerintah dan mempunyai kekuatan untuk mendukung pemberontakannya itu.<sup>7</sup>

Negara merupakan wadah kehidupan yang berkesinambungan untuk suatu komunitas bangsa/rakyat yang heterogen dan multi-etnik yang diikat dalam ideologi, undang/undang atau peraturan dan wilayah tertentu. Perjalanan kehidupan suatu negara diatur oleh pemerintah dengan kebijakannya. Kepatuhan kepada pemerintah sebagai lembaga yang mengatur kehidupan rakyatnya disebutkan dalam Alquran.

Firman Allah Sw. dalam surah an-Nisa': ayat 58,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٨﴾

Artinya: '(58). Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

(59). Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Terkadang, ketika menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah tersebut akan berhadapan dengan ketidakpuasan sebagian komponen masyarakat/bangsa dengan mewujudkan diri dalam suatu bentuk pemberontakan. Pemberontakan ini berbentuk perlawanan dengan kekuatan bersenjata, penggalangan massa, dan sebagainya. Pemberontakan v dengan terang-terangan ini disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam surah al-Hujurat: 9,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَجَنِّبُوا السَّبِيلَ الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: 'Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau

yang satu m  
Perjanjian  
kalau Dia  
dan henda  
orang yan

Berd  
dikenakan  
syarat-sya  
senjata ya  
rintahan y  
kekeliruan

Para  
menanggu  
umum, in  
peperanga  
Jika pen  
itu, maka  
dalam 'par  
semula Kh  
orang-orat  
mereka b  
berkata ke  
ganti apa  
di pihak ki  
perintah-M  
tersebut. 9

Sebal  
yang tidak  
dan bangsa  
tengah ban  
negara, ma  
ini dengan

نَ أَيُّهُ عَن  
مَنْ أَتَاكُمْ



yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil'.

Berdasarkan penuturan Alquran di atas, ternyata hukuman yang dikenakan pada tindak pidana ini adalah ditumpas atau diperangi jika syarat-syaratnya terpenuhi, seperti pemberontak itu memiliki kekuatan senjata yang memungkinkannya melakukan perlawanan pada pemerintahan yang sah dan keluar dari genggamannya pemerintah karena adanya kekeliruan atau salah pengertian.<sup>8</sup>

Para pemberontak negara yang sah tidak mempunyai kewajiban menanggung seluruh kerusakan dan kehancuran fasilitas negara dan umum, infra struktur yang ada, dan korban nyawa yang jatuh akibat peperangan yang terjadi dengan aparat keamanan dari pihak pemerintah. Jika pemberontak dibebani untuk menanggung seluruh kerusakan itu, maka mereka akan semakin lari dan tidak mau kembali lagi masuk dalam 'pangkuan ibu pertiwi' dan kekuasaan pemerintah. Hal ini ketika semula Khalifah Abu Bakar Siddik tetap bersikeras untuk membebani orang-orang murtad dengan membayar *diat* terhadap orang Islam yang mereka bunuh dalam peperangan. Kemudian, Umar bin Khattab ra berkata kepada beliau, 'Hendaknya janganlah mereka bebani untuk mengganti apa yang mereka lakukan. Biarkanlah korban yang berjatuh di pihak kita karena mereka berjuang di jalan Allah Swt dan menegakkan perintah-Nya'. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar menyetujui usul Umar tersebut.<sup>9</sup>

Sebaliknya, akan terjadi rakyat akan memberontak pemerintah yang tidak becus mengurus roda pemerintahan, kemakmuran rakyat dan bangsa terancam, tindakan *a-susila* dan *a-moral* berlangsung di tengah-tengah bangsa, ketidakadilan, dan kekacauan yang sudah pada taraf penting negara, maka Rasulullah saw. memberikan solusi terhadap permasalahan ini dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh 'Urfa'iyah ibn Syuraih,

و حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَتَاكُمْ

وَأْمُرْكُمْ جَمِيعًا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ  
جَمَاعَتَكُمْ فَأَقْتُلُوهُ

Artinya: "Barangsiapa yang datang kepada kamu dan mengurus urusan kamu yang bermaksud untuk menyusahkanmu atau memecah-belah kelompokmu, maka bunuhlah dia". (H.R. Shahih Muslim Kitab al-Imarah no. 3443).

Selanjutnya, ketidakpuasan sebagian komponen masyarakat/bangsa tersebut terhadap kebijakan pemerintahnya terkadang juga timbul. Hal ini disebabkan banyaknya tuntutan kepentingan pribadi dan kelompok dari komponen bangsa sangat heterogen kepada pemerintahnya. Namun, jika pemerintah masih berbuat adil dan dalam koredor roda pemerintahan yang benar dan baik, rakyat harus tetap mematuhi. Dalam kondisi ini, Rasulullah saw memberikan tausiyahnya yang diriwayatkan Ibnu Abbas di bawah ini;

حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْجَعْدِ أَبِي عُمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو  
رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ  
فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبِيرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: "Barangsiapa melihat pemimpinnya ada sesuatu yang dibencinya, maka hendaklah ia bersabar sebab seseorang yang memisahkan diri dari suatu jama'ah satu jengkal saja, maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah" (H.R. Shahih Muslim Kitab al-Futun no. 6531).

Dengan demikian, terdapat suatu larangan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memisahkan diri dari kelompok besarnya. Apalagi, mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dan adil. Hukuman yang dijatuhkan kepada pemberontak yang semacam ini adalah dibunuh dan kematiannya sebagai sesuatu kematian jahiliyah yaitu mati konyol. Sekalipun seseorang atau sekelompok masyarakat ada melihat sesuatu yang dibenci atau tidak disenangi terhadap pemimpinnya, maka hendaklah bersabar dengan syarat tentunya pemimpin yang sah tersebut masih berlaku adil.

### 3. Hiraba

Hiraba  
saw dan m  
istilah muh  
ataupun p

Lebih  
sekelompok  
menumpah  
kehormatan  
Islam, akhl

Firman

أَنْ يُقْتُلُوا أَوْ

بِضِّ ذَٰلِكَ

تَابُوا مِنْ

Artinya

yang mem  
bumi, hany  
kaki merek  
kediamann  
didunia, da

(34).

kamu dap  
Allah Maha

Abu M

seorang la  
al-Kitab. U  
yang mem  
bunuhnya k  
empat ribu

Jika a



### 3. Hirabah.

*Hirabah* adalah orang yang memerangi Allah Swt. beserta Rasulullah saw. dan membuat kerusakan di muka bumi yang disebut juga dengan istilah *muharibin* atau *qat'i at-tariq* (perampok, penyamun, perompak, ataupun pengganggu keamanan umum).

Lebih spesifik Sayyid Sabiq memberikan ciri *hirabah* itu dengan sekelompok orang yang bergerak untuk mengadakan kekacauan untuk menumpahkan darah, menjarah harta orang lain, merampok, merusak kehormatan, memusnahkan tanaman, dan hal itu dimaksud menentang Islam, akhlak, peraturan, dan undang-undang yang berlaku.<sup>10</sup>

Firman Allah Swt. dalam surah al-Maidah : 33 dan 34 berbunyi,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: '(33). Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,

(34). kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'.

Abu Musa al-Asy'ari menulis surat kepada Umar r.a dalam kasus seorang lak-laki Muslim yang membunuh seorang laki-laki dari *Ahl al-Kitab*. Umar membalas surat tersebut, 'Jika dia seorang pencuri atau yang memerangi (*Muharib*), maka penggal saja lehernya. Jika dia membunuhnya karena kesalahan atau sedang marah, maka suruh dia membayar empat ribu *dirham*'.<sup>11</sup>

Jika ada perampok yang melukai atau membunuh korbannya, maka

orang yang dianiaya atau walinya tidak mempunyai hak untuk memaafkannya. Hal ini dikarenakan yang berhak menuntut atas kriminal itu adalah Allah Swt sebab perampokan termasuk hak Allah Swt untuk menghukumnya. Abdul Aziz pernah meriwayatkan dalam tulisan Umar ra., 'Seorang pemimpin adalah wali orang yang memerangi agama. Jika mereka membunuh ayah atau saudaranya, maka bagi penuntut balas tidak mempunyai hak apa-apa terhadap orang yang memerangi agama atau orang yang merusak kemakmuran bumi'.<sup>12</sup>

Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ini adalah dibunuh dan disalib jika penjahatnya itu melakukan pembunuhan terhadap korban dan mengambil hartanya. Dihukum mati tanpa disalib jika melakukan pembunuhan terhadap korban, tetapi tidak mengambil hartanya. Dipotong tangan kanan dan kirinya jika ia tidak membunuh korbannya, tetapi mengambil hartanya minimal sebanyak satu *nisab*. Dipenjara atau hukuman lainnya jika ia hanya menakut-nakuti korban tanpa mengambil harta atau membunuhnya.<sup>13</sup>

#### 4. Hukuman zina.

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* (*baligh*), *mukhtar* (tidak dipaksa) dan tahu keharamannya terhadap kemaluan wanita yang diharamkan dan dia tidak punya hak kepemilikan atau yang menyerupainya.<sup>14</sup>

Meskipun para ulama berbeda dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina, yaitu *wat'i* (persetubuhan) haram dan sengaja atau ada maksud jahat. Seseorang dianggap memiliki maksud jahat jika ia melakukan perzinaan atau ia tahu bahwa perzinaan itu haram. Dengan kata lain, *wat'i* (yang diharamkan tersebut) adalah memasukkan kemaluannya (lelaki) pada kemaluan (*faraj*) wanita bukan isterinya atau bukan hambanya. Artinya, masuknya kemaluan (*zakar*) laki-laki itu seperti masuknya ember ke dalam sumur dan tetap dianggap zina walaupun ada penghalang antara *zakar* dengan *faraj*-nya.<sup>15</sup>

Hukuman zina tidak dilaksanakan kepada anak yang masih kecil (belum *baligh*), orang gila, orang yang dipaksa, dan tidak tahu keharamannya. Termasuk tidak mempunyai hak kepemilikan dan yang menyerupai atas diri wanita yang diajak berzina. Jika penyerupaan hak kepemilikan ini



ada, maka hukumannya tidak boleh dilaksanakan. Hak kepemilikan yang haram disetubuhi itu seperti menyetubuhi budak yang dimiliki secara bersama olehnya dan orang lain. Ada seorang laki-laki dilaporkan kepada Umar ra karena dia telah menyetubuhi budak yang pemiliknya bukan hanya dia hak atas budak tersebut, tetapi juga orang lain. Kemudian, Umar mencambuknya seratus kali kurang satu dan Umar membatalkan *had zina*.<sup>16</sup>

Sementara itu, tentang hak menyerupai kepemilikan yang haram disetubuhi adalah seperti seorang laki-laki yang pergi kemudian isterinya mengutus budaknya untuk menemani suaminya tersebut dan membantu memenuhi kebutuhannya. Kemudian, dia membelinya dan menyetubuhinya. Lalu, kasus ini dilaporkan kepada Umar ra dan berkata, 'Kami telah menjual sebelah tanganmu'. Lalu, Umar ra mencambuknya seratus kali dan tidak merajamnya.<sup>17</sup>

Hukuman yang diberikan kepada pelaku zina ini dibagi dua macam, yaitu:

- a. *Pezina ghairu muhsan* (pemuda yang belum pernah menikah melakukan perzinahan), maka hukumannya adalah 100 kali cambuk dan dibuang ke negeri (daerah) selama setahun.
- b. *Pezina muhsan* (sudah pernah menikah), maka hukumannya *dirajam* dengan cara dilempar dengan batu sampai tewas.

Dalil-dalilnya sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah an-Nur: 2 berbunyi,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ



Artinya: 'Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman'.

Kemudian, sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh 'Ubaidah ibn al-Samit,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ قَالَ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِيَنِي كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّي عَنْهُ قَالَ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الشَّيْبُ بِالشَّيْبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الشَّيْبُ جُلْدٌ مِائَةٍ ثُمَّ رَجُمَ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جُلْدٌ مِائَةٍ ثُمَّ نَفِي سَنَةٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى وَالشَّيْبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ لَا يَذْكُرَانِ سَنَةً وَلَا مِائَةً

Artinya: "Ambillah dariku, sungguh Allah telah membuat suatu jalan untuk mereka. Pemuda dengan pemudi (yang berzina hukumannya) 100 kali dera (cambuk) dan diasingkan keluar negeri selama setahun, sedangkan pria dan wanita yang pernah menikah (berzina hukumannya) 100 kali dera dan dirajam dengan batu" (H.R. Shahih Muslim Kitab al-Hudud no. 3200).

Dalam sirah an-nabawiyah, terdapat dua kasus manusia yang pernah dilakukan *rajam* oleh Rasulullah saw, sebagai berikut:

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ غِيلَانَ وَهُوَ ابْنُ جَامِعِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ مَا عِزُّ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ وَيْحَكَ ارْجِعْ

رَسُولَ اللَّهِ  
جَعِ فَاسْتَعْفِرَ  
اللَّهُ طَهَّرْنِي  
الرَّابِعَةُ قَالَ  
صَلَّى اللَّهُ  
خَمْرًا فَقَامَ  
صَلَّى اللَّهُ  
فِرْقَتَيْنِ قَائِلَ  
أَفْضَلَ مِنْ  
فِي يَدِهِ ثُمَّ  
رَسُولَ اللَّهِ  
نَفَرُوا لِمَاعِزِ  
رَسُولَ اللَّهِ  
تَهُمْ قَالَ ثُمَّ  
طَهَّرْنِي فَقَالَ  
أَنْ تُرَدِّدَنِي  
الزَّيْنِي فَقَالَ  
هِيَ رَجُلٌ مِنْ  
مَ فَقَالَ قَدْ  
يَسَ لَهُ مَنْ  
فَرَجَمَهَا



فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَتُبَّ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 طَهِّرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَحْكُ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ  
 اللَّهُ وَتُبَّ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي  
 فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ قَالَ  
 لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فِيهِمْ أَطَهَّرْكَ فَقَالَ مِنَ الزَّنَى فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي جُنُونٍ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ فَقَالَ أَشْرَبَ خَمْرًا فَقَامَ  
 رَجُلٌ فَاسْتَنَكَّهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمَرٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ  
 يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِئَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةُ أَفْضَلَ مِنْ  
 تَوْبَةِ مَا عَزَّ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ  
 قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَلْيُثْبِتُوا بِذَلِكَ يَوْمَئِذٍ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمَ عَزَّ  
 بَنِي مَالِكٍ قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَ عَزَّ بَنِي مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْ سَعَتْهُمْ قَالَ ثُمَّ  
 جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ  
 وَيَحْكُ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي  
 كَمَا رَدَدْتَ مَا عَزَّ بَنِي مَالِكٍ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ إِنَّهَا حُبَلِي مِنَ الزَّنَى فَقَالَ  
 آتَتْ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَهَا حَتَّى تَضْعِيَ مَا فِي بَطْنِكَ قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ  
 الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ  
 وَضَعْتُ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ إِذَا لَا تُرْجُمُهَا وَتَدْعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ  
 يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَيَّ رِضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَرَجَمَهَا



Artinya: Dari ayah Sulaiman bin Buraidah berkata, 'Ma'iz bin Malik mendatangi Rasulullah saw. Dengan berkata, 'Ya Rasulullah, Bersihkanlah aku!'. Rasulullah pun berkata, 'Celakalah kau, pulanglah, lalu minta ampunlah kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya! Lalu, Ma'iz pulang tidak berapa jauh datang kembali dan berkata, 'Ya Rasulullah, bersihkanlah aku! Rasulullah pun berkata, 'Celakalah kau, pulanglah, lalu minta ampunlah kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya! Lalu, Ma'iz pulang tidak berapa jauh datang kembali dan berkata, 'Ya Rasulullah, bersihkanlah aku! Rasulullah pun berkata seperti itu lagi sampai empat kali. Kemudian, Rasulullah saw berkata, 'Dalam hal apakah aku akan membersihkan engkau?'. Ma'iz menjawab, 'Dari zina'. Rasulullah bertanya kepadanya apakah dia orang gila. Ma'iz mengatakan bahwa dia tidak gila. Dan Rasulullah juga bertanya apakah dia baru minum khamar. Ma'iz berdiri lalu minta Rasulullah mencium bau mulutnya, ternyata tidak terdapat bau khamar dari mulutnya. Rasulullah bertanya, 'Apakah engkau sudah melakukan perzinahan?' 'Benar" kata Ma'iz. Lalu, Rasulullah memerintahkan (sahabatnya) untuk merajamnya. Saat itu terdapat dua kelompok manusia (yang mengomentarnya). Kelompok pertama mengatakan, 'Sungguh binasalah dia, sungguh dia akan menerima cambukan dikulitnya karena kesalahannya tersebut'. Kelompok kedua berkata, 'Apakah suatu taubat lebih afdhal dari taubatnya Ma'iz bahwasanya dia datang kepada Rasulullah saw untuk meletakkan tangannya di dalam tangannya (menyerahkan diri). Kemudian, Ma'iz berkata, 'Bunuhlah aku dengan batu!'. Kemudian, mereka mengerjakannya hari kedua atau hari ketiga. Kemudian, Rasulullah saw datang, ketika mereka sedang duduk dan memberi salam lalu duduk dan bersabda, 'Mintakanlah ampunan kepada Allah atas Ma'iz!. Mereka berkata, 'Allah telah mengampuni Ma'iz' bin Malik'. Rasulullah saw bersabda, 'Ma'iz telah bertaubat dengan setaubat-taubatnya seandainya dibagikan taubatnya itu di antara satu umat, maka pasti masih luas untuk mereka'. Kemudian, seorang wanita dari suku Ghamid (salah satu) etnis al-Azdi mendatangi Rasulullah saw dengan berkata, 'Ya Rasulullah, bersihkanlah aku!' Rasulullah saw menjawab, 'Rasulullah pun berkata, 'Celakalah kau, pulanglah, lalu minta ampunlah kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya.' Wanita tadi berkata, 'Aku melihat engkau ingin berpaling dariku sebagaimana engkau telah berpaling dari Ma'iz bin Malik'. Rasulullah saw bertanya, 'Bagaimana keadaanmu?'. Wanita tadi berkata, 'Aku sedang hamil dari hasil perzinahan'. Rasul bertanya, 'Benar?'

Wanita ta  
itu!'. Kemu  
dan meng  
mendatan  
melahirka  
dan kami m  
yang menyu  
anak itu aka  
(HR. Shahil

Ma'iz b  
dirajam Ras  
Rajam term  
di dalam sua  
sedangkan d

Dengan  
hal, yaitu:

- a. Pengaku  
pada M
- b. Saksi zin  
syarat p  
perzinaa  
Ketika A  
Ma'bad  
berkata,  
saksi ya  
bekasny  
melihat  
masuk k  
memeri  
dan Syil
- c. Kehamil  
bukti su  
kurang  
adalah b  
untuk d



Wanita tadi menjawab, 'Benar'. Rasulullah berkata 'Lahirkanlah anakmu itu!'. Kemudian, seorang laki-laki dari golongan Anshar mencukupi nafkah dan mengurusnya sampai wanita tadi melahirkan. Laki-laki Anshar tadi mendatangi Rasulullah dan mengatakan bahwa Ghamidiyah telah melahirkan. Rasulullah berkata, 'Kalau begitu kami tidak akan merajamnya dan kami menunggu anaknya besar dulu sebab anak itu tidak akan ada yang menyusunya'. Laki-laki Anshar tadi berdiri dan berkata, 'Kepadakah anak itu akan disusui ya Nabiullah'. Kemudian, Rasulullah pun merajamnya'. (HR. Shahih Muslim dalam Kitab al-Hudud no. 3207).

Ma'iz bin Malik dan Ghamidiyah adalah dua orang yang pernah dirajam Rasulullah saw karena perzinaan yang telah mereka lakukan. Rajam termasuk hukuman mati dengan cara dilempar memakai batu di dalam suatu lubang rajam yang hanya kepala timbul dari dalam tanah, sedangkan dari leher sampai kaki berada di dalam tanah.

Dengan demikian, bukti-bukti perzinaan dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Pengakuan perzinaan dari pelakunya sebagaimana yang terjadi pada Mu'az bin Malik dan Ghamidiyah zaman Rasulullah saw.
- b. Saksi zina. Kesaksian zina dapat diterima jika telah memenuhi syarat-syarat persaksian yaitu empat orang saksi dan melihat peristiwa perzinaan itu yakni masuknya zakar pelaku ke dalam farji wanitanya. Ketika Abu Bakrah dan dua orang temannya Nafi' dan Syibli bin Ma'bad menjadi saksi zina atas Mughirah, datanglah Ziyad. Umar berkata, 'Jika seorang laki-laki menjadi saksi hendaknya sebagai saksi yang benar, insya Allah'. Ziyad berkata, 'Saya telah melihat bekasnya dan tempatnya acak-acakan'. Umar berkata, 'Apakah kamu melihat gagang celak masuk ke dalam tempatnya (artinya zakar masuk ke dalam farjinya) ?'. Ziyad menjawab, 'Tidak'. Lalu, Umar memerintahkan agar mereka dicambuk yaitu Abu Bakrah, Nafi, dan Syibli.<sup>18</sup>
- c. Kehamilan. Kehamilan bagi wanita yang tidak bersuami adalah bukti suatu perzinaan dan kelahiran yang terjadi dalam jangka waktu kurang dari waktu biasa (selama enam bulan) dari pernikahannya adalah bukti adanya perzinaan. Semua itu bisa membuatnya berhak untuk dilaksanakan hukuman zina.

Pelaksanaan hukuman zina ini pada dasarnya dilaksanakan oleh kepala pemerintahan, betapapun hukuman itu hak Allah, dan dia boleh mewakilkan pelaksanaan eksekusi hukuman itu kepada para gubernur atau para hakimnya.<sup>19</sup>

### 5. Qazf (menuduh berzina).

Qazf adalah menuduh orang lain melakukan perzinaan tanpa mendatangkan empat orang saksi sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-Nur: 4 berbunyi,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: 'Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik'.

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa bagi pelaku yang menuduh orang lain yang baik-baik berzina dengan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi dalam kejadian perkara di dera 80 kali. Namun, jika penuduh itu seorang budak 40 kali dera. Hal ini dikarenakan hukuman *hadd* bagi seorang budak adalah setengah dari orang merdeka.

Tuduhan-tuduhan zina tersebut dapat mewujudkan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Tuduhan dengan terang-terangan. Tuduhan ditujukan kepada seseorang dengan menyebutkan namanya dihadapan umum. Jika penuduh tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka penuduh akan dicambuk 80 kali cambukan.
2. Tuduhan dengan sembunyi seperti jika ada orang yang mengingkari nasab seorang anak dari ayahnya dengan berkata, 'Kamu bukan milik ayahmu'. Umar melaksanakan hukumam kepada orang yang mengingkari nasab seorang laki-laki muslim ayahnya. Umar juga menghukum kepada seorang ayah yang mengingkari nasab anaknya

sendin

l'an. 2

3. Tuduh

denga

satu b

penda

ayah c

ayah i

hukun

bin Ar

Waha

zina

6. Minu

Minu

memabul

sekali pun

Bahk

(dicampu

tersebut)

tidak me

Salat

berasal d

dan men

bermakna

arti kedu

dapat me

dan bau

Den

dari lafa

karena r

karena l

Disa

minuma

terdapat



sendiri setelah dia mengakui sebagai anaknya dengan hukuman li'an.<sup>20</sup>

3. Tuduhan sindiran. Umar menghukum orang yang menuduh zina dengan sindiran ketika ada dua orang saling mencaci dan yang satu berkata, 'Buku tidak pernah berzina, ayahku juga'. Umar minta pendapat sahabat-sahabatnya dan berkata, 'Dia hanya menyanjung ayah dan ibunya'. Umar berkata lagi, 'Sebenarnya, dia bisa menyanjung ayah ibunya dengan kata-kata yang lain'. Lalu, Umar melaksanakan hukuman *had qazf* kepadanya. Umar pernah mencambuk Ikrimah bin Amir bin Hisyam bin Abdi Manaf bin Abd Dar ketika dia mencaci Wahab bin Zum'ah bin Aswad bin Muthalib bin Asad dengan tuduhan zina dengan sindiran.<sup>21</sup>

## 6. Minum khamar.

Minum khamar menurut istilah *syara'* adalah khamar yang dapat memabukkan dan merusak akal baik sedikit ataupun banyak diminum sekalipun ketika meminumnya tidak memabukkan pelakunya.

Bahkan, tergolong khamar jika dilakukan dengan cara memakainya (dicampur dengan makanan), atau memasukkan ke dalam tubuh (khamar tersebut) melalui kerongkongan, hidung, dan sebagainya sekalipun tidak memabukkan pelakunya.<sup>22</sup>

Salah satu perbuatan yang harus dijauihi itu adalah khamar. Khamar berasal dari kata *khamara* – *yakhmiru* – *khamran* dengan arti menutupi dan menyembunyikan atau merahasiakan bukti.<sup>23</sup> Khamar dapat juga bermakna mendekati dan bercampur.<sup>24</sup> Kedua kata ini dapat dimunculkan arti kedua sifat khamar yaitu mengubah dan menutupi. Artinya, khamar dapat merubah (*tagayyur*) perasan buah yang manis menjadi keasaman dan bau. Kemudian, khamar juga dapat menutupi akal sehat.

Demikian pula, dalam tafsir al-Fakhrurrazi bahwa secara etimologi dari lafaz khamar mempunyai dua arti. Pertama, disebutkan khamar karena menutup akal dan merubahnya dan kedua disebut khamar karena berubah bau perasan buahnya.<sup>25</sup>

Disamping itu, khamar dapat juga didefinisikan sebagai setiap minuman yang memabukkan dan merusak akal. Pedefinisian tersebut terdapat di dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir *al-Munir* menyatakan

bahwa khamar adalah setiap minuman yang memabukkan dan merusak akal.<sup>26</sup> Demikian juga dalam tafsir *al-Jami' li Ahli 'an Alquran*,<sup>27</sup> *al-Mizan fi Tafsir al-Quran*,<sup>28</sup> dan lain-lain.

Dalam keharaman khamar ini terdapat dalam firman Allah Swt. dalam surah al-Maidah: 90,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: 'Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan'.

Menurut Imam Abu 'Abdullah al-Mazaniy, Jumhur Ulama salaf dan lainnya berpandangan bahwa setiap minuman yang memabukkan (sejenisnya) haram meminumnya sedikit atau banyak, mentah ataupun masak (ada anggur yang diperas untuk dijadikan khamar tanpa dimasak dan ada pula yang dimasak) walaupun setetes. Para ulama Kufah berbeda pendapat dengan Jumhur Ulama tersebut bahwa jika sedikit tidak memabukkan dan meminum perasan anggur yang dimasak tidaklah haram. Bahkan, sekelompok ulama Basrah berpendapat bahwa pengharaman hanya terbatas pada perasan anggur dan perasan kismis yang mentah, sedangkan yang dimasak halal selama tidak membuat mabuk. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa pengharaman hanya terbatas pada perasan anggur dan kurma. Anggur diharamkan sedikit atau banyak kecuali dimasak sampai berkurang 1/3-nya, sedangkan perasan kismis dan kurma halal dimasak. Jika dimasak disentuh api langsung dan sedikit terjadi perubahan hanya dihukum had. Adapun yang mentah diharamkan dan pengharamannya tidak diwajibkan had.<sup>29</sup>

Berdasarkan pernyataan Alquran, khamar dibuat dari perasan anggur dan kurma (surat an-Nahl ayat 67 yang lalu). Hal ini dipertegas dalam riwayat an-Nasa'i yang berbunyi;

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ  
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ



Artinya: 'Khamar dibuat dari dua tumbuhan yaitu kurma dan anggur' (HR. an-Nasa'I no. 5449 Kitab Asyrah).<sup>30</sup>

Jika dikumpulkan dari pernyataan di atas, khamar terbuat dari kurma, anggur, dan kismis. Namun, 'Umar bin Khattab pernah menambahkan bahwa selain anggur, kurma, madu, biji gandum, dan gandum itu sendiri bisa dijadikan khamar dengan pernyataannya,

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ عَلَى مَنَبَرِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

Artinya: 'Bukankah telah diturunkan perngharaman khamar yang terbuat dari lima macam, yaitu anggur, kurma, madu, biji gandum, dan gandum, sedangkan khamar adalah yang merusak akal' (HR. An-Nasai no. 5484 Kitab Asyrah).<sup>31</sup>

Tentunya, zaman Rasulullah saw. dengan zaman 'Umar berbeda masa dan keterampilan. Di zaman Rasulullah saw. khamar hanya diketahui orang dapat dibuat dari anggur, kurma, dan kismis. Namun, di zaman 'Umar perkembangan daerah dan populasi umat Islam semakin meluas sekaligus mereka sudah banyak bersentuhan dengan budaya masyarakat lain sehingga selain buah-buahan tersebut di atas, madu dan gandum dapat juga diproses menjadi khamar.

Berdasarkan kondisi di atas, selain buah-buahan di atas, maka buah-buahan lainpun dapat diproses menjadi khamar pada masa sekarang ini. Misalnya, air nira, tape, dan lain-lain. Jika buah-buahan itu diproses menjadi khamar, maka hukumnya menjadi haram.

Karena kemudahan yang terjadi bagi manusia akibat mengonsumsi khamar ini, maka Islam memberikan ancaman pisik bagi peminumnya sebagaimana peristiwa kenabian di bawah ini;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

Artinya: 'Sesungguhnya telah dihadapkan kepada Nabi saw. seorang peminum khamar, kemudian beliau menjilidnya dengan dua tangkai pelepah kurma kira-kira 40 kali' (HR. Shahih Muslim Kitab al-Hudud no. 3218)

Untuk perbuatan minum khamar ini hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya adalah dera 40 kali menurut sebagian pendapat di antaranya Ali ibn Abi Talib. Sementara itu, menurut pendapat 'Umar ibn Khattab dan lain-lainnya di dera 80 kali.<sup>32</sup>

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

Artinya: 'Nabi Muhammad saw. telah memukul peminum khamar dengan pelepah kurma dan terompah kaki. Abu bakar menjilid peminum khamar dengan 40 kali' (H.R. Shahih Bukhari Kitab al-Hudud no. 6275).

Rasulullah saw tidak saja memberikan hukuman fisik bagi pelakunya, tetapi juga melaknat pelakunya sekaligus rotasi pelaku-pelaku ini yang turut menyukkseskan penyelenggaraan minuman khamar ini dengan sabdanya;

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ عَنْ شَيْبِ بْنِ بِشْرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ



عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا  
وَأَكْلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ  
غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَدْ رَوَى نَحْوُ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ  
وَابْنِ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: "Dilaknati dalam masalah khamar ini pada 10 bagian yaitu produsennya, distributornya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesannya" (H.R. Sunan Tirmizi Kitab al-Buyu' an Rasulillah no. 1216).

Sekaligus penghancuran fasilitas khamar tersebut;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ كَثِيرٍ هُوَ ابْنُ شَيْطَاطٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ  
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَرُوا  
الْأَيَّةَ وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ فَإِنَّ الْفَوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَتْ  
الْفَتِيلَةَ فَأَخْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ

Artinya: "Dari Jabir berkata, 'Rasûlullâh saw. bersabda, 'Hancurkanlah bejana khamar atau tumpahkan gelas tempat minumannya, porak-porandakan pintunya (rumah lokasi tempat praktek minum khamar), dan padamkanlah lampunya (alat untuk menerangi lokasinya)! Sesungguhnya orang-orang pasik itu yang barangkali akan menarik sumbu lampunya sendiri yang akan membakar orang seisi rumah tersebut (ahl al-bait)". (H.R. Sahih Bukhari Kitab al-Isti'zan no. 5821).

Hukuman cambuk akibat minuman keras ini dilakukan jika pelakunya sudah sadar dari mabuknya. Hal ini menghindarkan sesuatu yang terjadi di luar dugaan jika dicambuk dalam keadaan mabuk. Namun, jika tidak mabuk, maka dia tetap dihukum juga.

## 7. Pencurian.

Mencuri secara bahasa adalah seseorang mengambil barang orang lain dengan sembunyi sedangkan menurut syara' adalah mengambil

barang orang lain dengan sembunyi dan mempunyai syarat-syarat.<sup>33</sup> Misalnya, adanya pencuri disertai niat untuk mencuri, barang-barang yang dicuri bukan miliknya atau milik anaknya, tetapi adalah milik orang lain, adanya pemilik barang yang dicuri, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Untuk itu, mencopet (ikhtilas) bukan termasuk mencuri karena barang yang diambilnya tersebut bukan dari tempat yang tersembunyi.

Syarat lain untuk dianggap seseorang itu mencuri atau tidak, menurut *jumhur fuqaha'*, jika orang tersebut (pencuri) telah keluar dari rumah yang dicurinya dan membawa barang curian baru dapat digolongkan pencurian dan dihukum *hadd* (dengan potong tangan kalau sampai se-*nisab*). Namun, jika ia masih dirumah orang yang dicurinya dan belum keluar (tetapi sudah tertangkap) tidak dapat disebut pencurian sebab dianalogikan dengan seseorang yang memegang khamar, tetapi belum atau tidak meminumnya, maka dia belum dapat dijatuhkan hukuman *hadd*.

Adapun hukuman yang dikenakan terhadap pelakunya adalah potong tangan jika barang yang dicurinya minimal atau se-*nisab* (sepempat *dinar* menurut sebagian *fuqaha'* atau 10 *dirham* menurut sebagian *fuqaha'* lainnya).

Umar memotong tangan pencuri dari pergelangannya, sedangkan pemotongan kaki ada beberapa riwayat berbeda yang menerangkan tempat pemotongan kaki itu. Diriwayatkan dari Ikrimah dan Amr bin Dinar bahwa Umar memotong kaki dari pergelangan atau sendi-sendinya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa pemotongan kaki itu dilakukan mulai dari pertengahan kakinya dan membiarkan tumitnya. Umar memotong kaki dan menunjuk pada pertengahan kaki tersebut.<sup>34</sup>

Firman Allah Swt. dalam surah al-Maidah: 38 yang berbunyi,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya: 'Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'.

Kemudian, s

حَمْدٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ  
أَيْشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ  
لَا فِي رُبْعِ دِينَارٍ  
سَحَقُ بْنُ مَنصُورٍ  
وَلَدِ الْمِسُورِ بْنِ

Artinya: "Tid  
dinar saja" (H.R

Pada hadis

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
الْبَابُ عَنْ سَعْدِ  
بِوَعِي حَدِيثُ  
مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ  
قَطَعَ فِي خَمْسَةِ  
وَرُوي عَنْ أَبِي  
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا  
الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ  
ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ  
سَلَّ رَوَاهُ الْقَاسِمُ  
مَسْعُودٍ وَالْعَمَلُ  
أَهْلُ الْكُوفَةِ قَالُوا



Kemudian, sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,

حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ مِنْ وَلَدِ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Artinya: "Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada (senilai) seperempat dinar saja" (H.R. Shahih Muslim Kitab al-Hudud no. 3192).

Pada hadis lain, Rasulullah saw bersabda;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَيُّمَنَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَرُوي عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَطَعَا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَرُوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا قَالَا تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ رَأَوْا الْقَطْعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَقَدْ رُوي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ قَالُوا





Potonglah !. Kemudian, dihadapkan keempat kalinya. Beliau berkata, 'Bunuhlah !. Para Sahabat berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya ia mencuri?'. Beliau berkata, 'Potonglah ! Kemudian, dihadapkan kelima kalinya. Beliau berkata, 'Bunuhlah!'. Jābir berkata, 'Lalu, kami tarik dia dari Rasulullah dan kami bunuh. Kemudian, kami gotong dia dan kami campakkan ke dalam sumur dan kami lempari dia dengan batu' (H.R. Sunan Abu Daud Kitab al-Hudud no. 3830).

Dalam kasus yang sama ini, menurut Ibnu Abi Syaibah bahwa Khalifah Umar memotong tangan pencuri itu hanya pada tangan dan kakinya jika mencuri lagi dengan alasan tangan dan kakinya yang lain dapat digunakan untuk aktivitas lain seperti makan, minum, berjalan, dan mencuci kotoran setelah buang air besar, sedangkan hukuman ketiganya cukup dengan memasukkannya ke dalam penjara agar tidak mengganggu orang lain. Sebagaimana pernyataan Umar, 'Jika dia mencuri lagi, maka potonglah tangannya. Jika dia mengulangnya lagi, maka potonglah kakinya. Jangan potong tangannya yang lain, biarkan saja dia dengan tangannya itu agar dia bisa memakainya untuk makan dan dipakai untuk bercebok, namun cukup penjarakan saja agar jauh dari manusia'.<sup>35</sup>

### C. Ta'zir.

#### 1. Definisi dan Dalil-dalil Ta'zir.

Kata ta'zir adalah bahasa Arab dengan asal katanya: *عَزَرَ - عَزْرٌ* yang berarti mencegah (*مَنْعَ*), menolak (*الرَّدُّ*), dan mendidik (*تَأْدِيبٌ*).<sup>36</sup> Disebutkan mencegah atau menolak karena ta'zir dapat mencegah atau menolak pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kembali kejahatannya yang dapat menyakiti dan merusak harta benda orang lain. Kemudian, disebutkan mendidik karena mendidik pelaku kejahatan supaya dapat menyadari dan merubah sikap dan prilaku buruknya sehingga ia tidak mengulangnya kembali.<sup>37</sup>

Ta'zir dapat juga berarti *التَّوْقِيقُ عَلَى الدِّينِ* yaitu menegakkan kewajiban-kewajiban agama dan hukum-hukum agama sebab orang yang memberlakukan ta'zir sama dengan orang yang menegakkan kewajiban dan hukum Allāh.<sup>38</sup>



Para ulama memberikan definisi *ta'zîr* ini dengan, antara lain;

1. Muhammad 'Abdullâh al-Jardânî mengatakan *ta'zîr* adalah "Pendidikan hukum (*ta'dîb*) atas dosa yang tidak ada *had* padanya dan tidak pula *kaffârah*".<sup>39</sup>
2. Burhân ad-Dîn Abî ar-Rifâ' Ibrâhîm mengatakan bahwa *ta'zîr* adalah "pendidikan hukum (*ta'dîb*), perbaikan (*islâh*), dan pelarangan (*zajr*) atas dosa-dosa yang tidak disyari'ahkan untuk diberlakukan *hudûd* dan tidak pula *kaffârah*".<sup>40</sup>
3. Abû Muhammad 'Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah mengatakan *ta'zîr* adalah hukuman yang disyari'ahkan atas *jinâyah* yang tidak ada *had* padanya seperti persetubuhan keroyokan terhadap budak yang dimiliki secara bersama, budak perempuan yang telah menikah, budak perempuan yang dimiliki anaknya, persetubuhan melalui dubur dan masa *haid*, menyetubuhi wanita asing (bukan isteri) tidak melalui alat kelamin, pencurian tidak sampai *nisâb*, ataupun pencurian barang yang tidak dipelihara orang secara ketat, perampasan, pemerasan secara paksa, penggelapan uang negara, perbuatan kejahatan pada orang yang tidak diwajibkan dengan hukuman *had*, *qisâs*, dan *diyat*, ataupun mencaci orang yang tidak sampai menuduh berzina, dan sebagainya karena dapat mencegah dari *jinâyah*.<sup>41</sup>
4. Muhammad Fathî ad-Durainî mengatakan *ta'zîr* adalah "hukuman terhadap setiap kemaksiatan yang tidak diwajibkan *had* dan *kaffârah*".<sup>42</sup>
5. Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan *ta'zîr* adalah "mengenakan hukuman selain *hudûd* dan *kaffârah* kepada pelaku perbuatan tindak-pidana, baik perbuatan itu menyangkut hak Allâh Swt. maupun hak pribadi seseorang".<sup>43</sup>

Berdasarkan paparan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan penulis bahwa *ta'zîr* adalah hukuman yang disyari'ahkan bagi pelaku dosa selain ketentuan Allâh Swt. baik mengenai jumlah maupun bentuknya seperti yang terdapat pada *hudûd* dan *kaffârah*.

Hukuman *ta'zîr* ini telah disyari'ahkan berdasarkan penunjukkan dalil-dalil di bawah ini:

Hadis yang diriwayatkan Abû Burdah r.a berbunyi

كَبِيرٍ  
عَبْدٍ  
يُجْلَدُ  
حَمْدُ  
عَنْ  
عَنْ سَمِعَ  
يَقُولُ

Ar  
sepuluh  
Sunan

Ha  
perawi  
lafaz

Ha  
dengan

كَبِيرٍ  
عَنْ  
لَهُ صَلَّى

Ar  
hukum  
kitab al

Per  
adalah  
tidak le

Hu



أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرَ بْنِ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

Artinya: "Bahwa Rasulullah saw. bersabda, 'Tidak dijilid di atas sepuluh jilidan (cambukan) kecuali mengenai had dari hudûd Allah'. (H.R. Sunan Abû Dâud Kitab al-Hudud no. 3894).<sup>44</sup>

Hadis-hadis yang serupa dengan ini banyak diriwayatkan oleh perawi-perawi hadis seperti Ibnu Mâjah,<sup>45</sup> Ahmad bin Hanbal,<sup>46</sup> An-Nasâ'i dengan lafaz لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.<sup>47</sup>

Hadis yang hampir sama dengan sanad Abû Burdah di atas, tetapi dengan sanad Abû Hurairah,

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعْزَرُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ

Artinya: "Rasûlullâh saw. bersabda, 'Jangan kamu memberlakukan hukuman ta'zîr di atas sepuluh cambukan'. (H.R. Sunan Ibnu Majâh kitab al-Hudud no. 2592).<sup>48</sup>

Persamaan kedua hadis di atas (sanad Abû Burdah dan Abû Hurairah) adalah sama-sama mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman ta'zîr tidak lebih dari sepuluh jilid atau cambukan.

Hudûd di atas berbeda dengan ta'zîr sebab hudûd telah ditentukan

Alquran sesuatu perbuatan kejahatan yang tergolong di dalamnya dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bagi pelakunya. Namun, *ta'zîr* tidak ditentukan Alquran bentuk perbuatan dan sangsi hukumannya. Hal ini diserahkan pelaksanaannya berdasarkan kebijakan *imâm* (penguasa negara) dengan tetap dilandaskan pada penegakkan *amar ma'rûf dan nahî munkar*.

Namun, hadis yang diriwayatkan oleh Abû Burdah di atas tentang jumlah cambukan maksimal sepuluh kali menurut penilaian an-Nawawî telah di-*mansûkh*-kan oleh perbuatan-perbuatan sahabat beliau sendiri yang memberlakukan hukuman cambuk melebihi dari sepuluh kali cambukan seperti 'Umar mencambuk dengan menggunakan pelepah daun kurma seratus kali bagi pemalsu stempel *bait al-mâl* untuk mencuri di dalamnya dalamnya.<sup>49</sup>

'Umar pernah menulis surat kepada Abû Mûsâ al-'Asy'arî, "Jangan engkau menjilid (mencambuk) dalam hal hukuman *ta'zîr* lebih dari duapuluh kali". Perintah *ta'zîr* ini diperintahkannya hanya untuk kalangan pejabatnya, sedangkan 'Umar sendiri pernah mencambuk seratus kali. Disamping itu, 'Usmân juga pernah men-*ta'zîr* tigapuluh kali.<sup>50</sup>

Pe-*mansukh*-an hadis itu hanya mengarah pada jumlah hukuman cambukannya, sedangkan prinsip hukuman cambuk dalam *ta'zîr* tetap berlangsung pada zaman sahabat. Sementara itu, bentuk-bentuk hukuman *ta'zîr* yang lain seperti pengasingan dan lain-lain tidak di-*mansûkh*-kan. Hal ini terungkap dengan hadis *Rasûlullâh saw.* dari Yahyâ, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbâs r.a dari keduanya berkata,

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  
قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَبِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ  
مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَلَانَا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فَلَانَا

Artinya: "Nabi saw. melaknat orang-orang bencong dari (jenis kelamin) laki-laki dan dari (jenis kelamin) perempuan yang kelaki-lakian. Lalu, *Rasûlullâh saw.* bersabda, 'Keluarkanlah mereka dari kampungmu'. Kemudian, beliau mengasingkan si Pulan dan 'Umar pun mengasingkan si Pulan". (H.R. Shahih al-Bukhârî Kitab al-Libas no. 5436).<sup>51</sup>



Hadis di atas memberikan gambaran bahwa *Rasûlullâh saw.* menyuruh sahabatnya untuk mengasingkan para bencong dari kampung halamannya yang mengindikasikan adanya hukuman *ta'zîr* untuk para bencong tersebut. Dalam suasana yang lain beliau juga bersabda dari Bahzî ibn Hakîm dari ayahnya, dari kakeknya berkata,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ بَهْزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ هَذَا الْحَدِيثَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ

Artinya: "Bahwasanya Nabi Muhammad saw. memenjarakan seseorang karena tertuduh melakukan kejahatan. Kemudian, beliau membebaskannya". (H.R. Sunan Tirmizi Kitab ad-Diyat 'an Rasulillah no. 1337).

Hadis di atas kembali memberikan indikasi adanya hukuman *ta'zîr* dalam bentuk pemenjaraan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan.

Dalam *Musannaf Ibnu Syaibah* disebutkan juga bahwa 'Umar pernah mengasingkan seseorang ke Fudak<sup>52</sup> dan Basrah.<sup>53</sup> Bahkan, dalam *Fath al-Bârî* disebutkan bahwa 'Umar pernah mengasingkan seseorang dari Madinah ke Basrah dan Khaibar.<sup>54</sup>

Keberadaan hukuman *ta'zîr* ini juga didukung hadis-hadis *Rasûlullâh saw.* yang lain, diantaranya:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ

Artinya: "Dari Abû Hurairah, dari Nabi Muhammad saw bersabda, 'Apabila salah seorang kamu memukul, hendaklah hindarkan bagian wajah'. (H.R. Sunan Abû Dâud Kitab al-Hudud no. 3895).<sup>55</sup>

Hadis sanad Abû Hurairah di atas memberi kesempatan untuk dapat memberikan hukuman fisik kepada seseorang (dalam hal ini memukul), tetapi dihindarkan dengan memukul bagian wajah. Hal ini dikarenakan bagian wajah adalah bagian tubuh yang sangat penting dan sensitif untuk keseimbangan tubuh manusia. Pada bagian wajah terletak otak besar, otak kecil, saraf, mata, telinga, hidung, dan mulut. Jika salah satu organ tubuh di bagian wajah itu tidak berfungsi akibat pemukulan, maka akan mengakibatkan kecacatan dan ketimpangan dalam tubuh manusia yang berdampak pada pekerjaannya. Oleh karena itu, pemukulan dapat ditujukan pada bahu, kaki, tangan, dan sebagainya yang dapat menghindarkan cacat tubuh secara fisik dan mental.

Selanjutnya, hadis *Rasûlullâh saw.*,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا مُخَنَّثٌ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا لُوطِيٍّ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbâs, dari Nabi Muhammad saw. bersabda, 'Apabila seseorang berkata kepada orang lain, 'Wahai bencong! Maka jilidlah duapuluh kali dan jika seseorang berkata kepada orang lain, 'Wahai Homoseks (Lesbian)! Maka jilidlah dia duapuluh kali" (H.R. Sunan Ibnu Mâjah Kitab al-Hudud no. 2558).<sup>56</sup>

Hadis sanad Ibn 'Abbâs di atas memberikan petunjuk bahwa seseorang yang mencaci orang lain akan mendapatkan hukuman *ta'zîr* dengan di-jilid duapuluh kali. Pada kasus hadis di atas menggelar orang lain dengan gelaran yang sering dilakukan oleh umat Nabi *Lut* zaman dahulu yaitu homoseks atau lesbian. Pada zaman *Rasûlullâh saw.* gelaran semacam itu merupakan suatu bentuk sikap cacian atau makian sehingga perlu dilakukan *ta'zîr* kepada pelakunya dengan duapuluh kali *jilid*-an.

Kedua hadis terakhir di atas memberikan bukti kuat bahwa hukuman *ta'zîr* terhadap pelaku maksiat atau kemungkaran mendapat legitimasi oleh syara'. Kesempatan yang diberikan syara' untuk memberikan hukuman



pisik kepada pelakunya merupakan momentum yang paling tepat untuk menegaskan kebenaran yang diajarkan Islam.

Dalam pelaksanaan hukuman *ta'zîr*, kemungkinan bentuk hukuman yang dapat diterapkan terhadap pelaku kejahatan bermacam-macam. Al-Jardânî menawarkan hukuman *ta'zîr* berkisar dan bertujuan mendidik seperti penjara, memukul tanpa merasakan sakit yang kuat seperti tamparan, pengasingan, pengundulan kepala, penghitaman wajah, mengarak keliling kampung terpidana sesuai dengan kejahatannya, menelanjangi selain aurat tubuh, mencela dengan perkataan, menyalib lebih kurang dari tiga hari kecuali untuk keperluan makan, minum, dan salat, serta perlu dihindarkan mencukur jenggotnya dan menyita harta-bendanya.<sup>57</sup> Ad-Durainî menyebutkan bahwa hukuman *ta'zîr* dapat berbentuk hukuman badan seperti pukulan, mengikat kebebasannya seperti penjara, harta-benda seperti menyita harta bendanya, kejiwaan seperti celaan atau teguran, dan sebagainya.<sup>58</sup> Menurut Ibnu Qudâmah, dalam tindak pidana *ta'zîr* tidak dibolehkan memotong anggota tubuh, melukai dan menyita hartanya karena syari'ah hanya memberikan petunjuk hukuman yang sarat dengan muatan pendidikan.<sup>59</sup>

Demikianlah, berbagai macam bentuk dan jumlah hukuman *ta'zîr* yang dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan. Sekalipun masih dalam *ikhtilâf* jumlahnya, bentuk dan jumlah hukuman itu sendiri dapat dibagi dua bagian besar, yaitu hukuman pisik seperti pukulan dan hukuman harta-benda seperti menyitanya.

Khusus mengenai hukuman pisik yang berbentuk pukulan dan cambuk, terjadi *ikhtilâf* pendapat di kalangan *fuqahâ'*. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, syara' hanya memperkenankan hukuman *jilid* (cambuk) saja. Adapun pukulan dengan tongkat dan tangan telah melampaui batas hukuman.<sup>60</sup> Sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan cambuk diperkenankan dengan ber-*hujjah* pada *ijmâ'* sahabat. Namun, dalam *istidlâl ijmâ'* sahabat dilihat dari sisi an-Nawawî (dalam syarah Muslim), mereka (sahabat) ber-*ijmâ'* terhadap ketetapan hukuman dengan pelepah daun kurma, sandal, dan sudut-sudut pakaian. Kemudian, sebagian ulama *muta'akhirîn* berpendapat boleh menggunakan cambuk dan boleh juga menggunakan sisi-sisi pakaian dan sandal, tetapi bagi orang yang lemah tubuhnya seperti terpidana yang tua dapat melakukan hukuman yang layak bagi mereka. Orang yang menukilkan 'hadis empatpuluh

untuk  
hal ini  
wah. Hal  
penting  
wajah  
mulut.  
akibat  
mpangan  
karena  
againya  
eral.

حَدَّثَنَا  
عَنْ دَاوُدَ  
وَسَلَّمَ  
الرَّجُلُ

Apabila  
empatpuluh  
(Les-  
kitab al-

wa sese-  
dengan  
dengan  
yaitu  
macam  
perlu  
an.

kuman  
rimasi  
kuman

kali cambukan' dengan menetapkan empatpuluh kali pukulan dengan tongkat (misalnya) tidak berdasar sama sekali sebab tidak ada penetapan jumlah tertentu dari *Rasûlullâh saw.*<sup>61</sup>

Setelah mengutip beberapa pendapat *ikhtilâf'ulamâ'* tentang kebolehan atau tidak hukuman cambuk dan jumlah tertentu di atas, Ibnu Hajar al-'Asqalânî berpendapat bahwa mereka telah jauh dari pemahaman sebenarnya. Pemahaman tentang hukuman *ta'zîr* terbagi tiga. *Pertama*, *Rasûlullâh saw.* memerintahkan duapuluh orang laki-laki untuk menjilid peminum khamar. Setiap orang menjilid dua kali dengan pelepah daun kurma dan sandal (*an-ni'âl*). *Kedua*, makna jilid itu sendiri sama dengan 'darb' (memukul) karena menjilid bukanlah dimaksudkan memukul dengan cambuk. *Ketiga*, *Rasûlullâh saw.* tidak pernah menetapkan jumlah hukuman, tetapi beliau hanya memerintahkan mereka memukul, khususnya bagi peminum khamar tersebut.<sup>62</sup>

Hadis ang menjadi dasar pemahaman Ibnu Hajar al-'Asqalânî adalah

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ اضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ  
وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَالَ  
اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ  
الشَّيْطَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ الْإِسْكَندَرَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ  
وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَحْيَةُ بْنُ شُرَيْحٍ وَأَبْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ  
بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ بَعْدَ الضَّرْبِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ بَكِّتُوهُ فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ مَا أَتَقَيَتَ اللَّهُ مَا خَشِيتَ اللَّهَ  
وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ وَقَالَ فِي  
آخِرِهِ وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ الْكَلِمَةَ  
وَنَحْوَهَا



Artinya: "Dari Abû Hurairah r.a. berkata, 'Seorang laki-laki peminum khamar dihadapkan kepada Rasûlullâh saw. Lalu, beliau berkata, 'Pukul dia!'. Abû Hurairah berkata, 'Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan sandalnya, dan adapula yang memukul dengan bajunya. Kemudian, ketika berhenti pemukulan itu, sebagian sahabat berkata, 'Allâh telah mnghinakanmu'. Lalu, Rasûlullâh saw. berkata, 'Jangan berkata demikian, jangan pula kamu menceritakan kejelekan setan terhadapnya!'. (H.R. Sunan Abû Dâud Kitab al-Hudud no. 3882).<sup>63</sup>

Meskipun kasus hadis di atas mengenai hukuman bagi peminum khamar yang termasuk pada hukuman *hudûd*, tetapi hukuman pisik yang berbentuk pukulan dengan menggunakan alat tertentu dan jumlah pukulannya tidak pernah diajarkan Rasûlullâh saw. Hal demikian juga terjadi pada hukuman *ta'zîr* yang tidak pernah ditetapkan alat yang digunakan untuk memukul dan jumlah pukulannya. Sampai di sini penulis setuju dengan pendapat Ibnu Hajar al-'Asqalânî yang menyatakan bahwa mengenai jumlah pukulan dan alat yang digunakan dalam hadis di atas tidak ditentukan dengan tegas. Jumlah dan alat pukulan yang digunakan sahabat hanya bersifat spontanitas saat itu yang ada di tangan mereka masing-masing. Akan tetapi, jumlah pukulan hanya terlihat pada hadis lain dalam kasus peminum khamar di bawah ini,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ الدَّانَاجِ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَكَمَلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَلَ حَارَهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا وَلَ شَدِيدَهَا مَنْ تَوَلَّى هَيْنَهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا كَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ

Artinya: "Dari 'Alî berkata, 'Rasûlullâh saw. dan Abû Bakr as-Siddîq menjilid peminum khamar empatpuluh kali dan 'Umar menyempurnakannya menjadi delapanpuluh kali". (H.R. Sunan Abû Dâud Kitab al-Hudud no. 3885).<sup>64</sup>

Berdasarkan hadis di atas, Rasûlullâh saw. dan Khalîfah Abû Bakr

as-Siddiq men-jilid peminum khamar dengan empatpuluh kali, sedangkan 'Umar menyempurnakannya menjadi delapanpuluh kali.

Jika dikaitkan dengan hukuman *ta'zîr*, *Rasûlullâh saw.* tidak pernah menetapkan jumlah pukulannya. Beliau hanya memberikan kewenangan itu atas *ijtihâd imâm* sebagaimana hadis di bawah ini,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ حَدَّثَنَا هَذَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَرَوَايَةٌ وَكِيعٌ أَصَحُّ وَقَدْ رَوَى نَحْوُ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَيَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ

*Artinya: 'Hindarkanlah hudud tersebut dari kaum muslimin sebagaimana kamu mampu melakukannya. Lalu, jika dia mempunyai jalan keluar, maka berilah kesempatan. Sesungguhnya Imam salah dalam memaafkan orang lain lebih baik daripada salah menghukum' (H.R. Sunan Tirmizi Kitab al-Hudud 'an Rasulillah no. 1344).*

*Sekalipun hadis di atas memberikan indikasi kekuasaan imâm pada hudûd untuk memilih lebih menghindarkan hukuman pada kaum muslimin, tetapi indikasi lain yang tersirat yang dapat dipahami dari hadis itu juga*



adalah *imâm* berwenang dan bertanggung-jawab menangani setiap kejahatan yang terjadi, termasuk persoalan *ta'zîr*. Hal ini disebabkan ternyata kejahatan *ta'zîr* lebih banyak dan sangat kompleks jumlahnya dibandingkan dengan *hudûd* yang hanya meliputi tujuh bagian besar saja. Meskipun peringkat hukumannya lebih rendah daripada *hudûd*, *ta'zîr* tampaknya perlu penanganan yang serius dari seorang *imâm* agar tidak naik peringkatnya atau berubah wujud menjadi *hudûd* seperti pergaulan bebas wanita dengan pria akan berubah menjadi perzinahan jika tidak ditangani secara dini atau caci-maki berubah wujud menjadi tuduhan zina. Untuk itu, penanganan yang serius dan sedini mungkin oleh *imâm* merupakan solusi yang tepat untuk menghindarkan kejahatan *ta'zîr* berubah wujud menjadi *hudûd*. Jadi, *imâm* tidak bisa melepaskan diri dari penanganan kejahatan *ta'zîr* ini.

Berdasarkan hadis di atas pula *imâm* dalam kondisi tertentu dapat memberikan *ma'af* (melepaskan terhukum dari hukuman) dengan mempertimbangkan secara matang situasi dan kondisi terhukum. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya yaitu perubahan tingkah-laku terhukum

Selanjutnya, Muhammad Fathî ad-Durainî mengelaborasi bentuk-bentuk kejahatan yang mendapat hukuman *ta'zîr* antara lain; memeluk anak-anak, mencium wanita lain, menggauli wanita tanpa *jimâ'*, memakan makanan yang tidak dihalalkan seperti bangkai dan darah, mencuri barang yang tidak dipelihara orang atau tanpa *nisâb*, mengkhianati amanah seperti pejabat mengambil harta dari *bait al-mâl*, wakaf, dan harta anak yatim, berkhianat terhadap barang jaminan dan perserikatan, orang yang menipu dalam *mu'âmalah*nya seperti menipu makanan, pakaian, mengurangi timbangan dan takaran, bersaksi palsu, mengajari orang untuk bersaksi palsu, menyogok hakim, menghukum tanpa mempertimbangkan hukum Allâh, menganiaya rakyatnya, membuat hiburan seperti hiburan masa *jâhiliyyah*, mengajak orang lain untuk melakukan tindakan masa *jâhiliyyah*, dan sebagainya yang termasuk ruang lingkup hal-hal yang diharamkan Islam.<sup>65</sup>

Dengan demikian, hukuman *ta'zîr* merupakan suatu jenis hukuman pisik yang disyari'ahkan untuk segala kemaksiatan atau kemungkaran. Bentuk dan jenis hukuman diberikan bergantung pada situasi dan kondisi terpidana. Pemegang hak dan wewenang untuk menerapkan hukuman ini diserahkan pada *ijtihâd* atau kebijakan *imâm*.

Keberadaan *ta'zîr* juga didasarkan pada *ijmâ'* sahabat.<sup>66</sup> *Ta'zîr* wajib diterapkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak termasuk *had* dan *kaffârah*.<sup>67</sup> Sementara itu, Ibnu Qudâmah berpendapat bahwa *ta'zîr* itu wajib jika *imâm* memandangnya wajib.<sup>68</sup> Meskipun *ta'zîr* wajib untuk segala kemaksiatan, tetapi sangat bergantung pada *ijtihâd* atau kebijakan *imâm* mana-mana perbuatan maksiat yang pantas untuk di-*ta'zîr*.<sup>69</sup> Kepantasan tersebut didasarkan pada pertimbangan akal sehat dan keyakinan *imâm* untuk mewujudkan *maslahah* dan menimbulkan rasa keadilan masyarakat.<sup>70</sup> Bahkan, Burhân ad-Dîn Abû ar-Rifâ' Ibrâhîm berpendapat bahwa *ta'zîr* dapat berbeda penerapannya antara satu tempat dengan tempat yang lain. Pada satu negara, *ta'zîr* menjadi sesuatu yang dihargai keberadaannya, tetapi pada negara yang lain tidak demikian. Hal ini bergantung pada *ijtihâd imâm*.<sup>71</sup>

Ibnu Hazm sendiri berpandangan bahwa manusia beragam menilai *ta'zîr* ini. Pertama, *ta'zîr* bukanlah *hudûd*. Kedua, Kemungkinan boleh menurut pandangan *imâm*. Ketiga, tidak boleh melampaui batas ukuran *hudûd*.<sup>72</sup>

Dari kenyataan-kenyataan tentang *ta'zîr* di atas, maka penulis dapat menyimpulkan;

1. Pada dasarnya *ta'zîr* hukumnya wajib bagi setiap kemaksiatan di luar *hudûd*. Dengan kata lain, wajib mencegah terjadinya kemaksiatan *ta'zîr* secara berulang-ulang.
2. Hukumnya menjadi wajib jika *imâm* memandangnya wajib. Jika *imâm* memandang tidak wajib diterapkan, maka tidak wajib pula dilaksanakan. Keputusan *Imâm* sangat menentukan berlaku atau tidaknya *ta'zîr* ini.
3. Satu daerah kekuasaan seorang *imâm* akan berlainan dengan satu daerah kekuasaan *imâm* yang lain dalam hal *ta'zîr*. Satu daerah dapat melaksanakan *ta'zîr*, sedangkan satu daerah mungkin tidak melaksanakannya.

## 2. Tujuan Hukuman *Ta'zîr*.

Tujuan hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan bagi individu dan bagi masyarakat.<sup>73</sup> Dikatakan *maslahah* karena *maslahah* itu sendiri berarti mengambil manfaat dan menolak kerugian (*mudarra*) atau



Tanpa ini upaya tersebut tidak mencapai sasaran seperti hukuman mencela (*at-taubikh*), pemberian nasihat (*al-wa'z*), mengisolir (*al-hijr*), ancaman (*at-tahdîd*), publikasi kejelekan tingkah-lakunya (*at-tasyhîr*), harta (*al-mâliyah*), penjara (*al-habs*), jilid (*al-jild*), ataupun hukuman mati (*al-i'dam*).<sup>80</sup>

Menurut Abdul Azis Dahlan (*et. al.*), untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan bagi kejahatan *ta'zîr*, syara' menyerahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan *imâm* setelah mempertimbangkan kemaslahatan terhukum, lingkungan yang mengitarinya, dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut.<sup>81</sup>

Cara ini lebih mengarahkan hukuman *ta'zîr* pada proses pelaksanaan nilai-nilai pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan harapan yaitu terlaksananya usaha penyadaran dan perubahan tingkah-laku. Bahkan, Ahmad Fathî al-Bahnîsî berpendapat bahwa proses pendidikan di dalam hukuman *ta'zîr* merupakan sesuatu yang mutlak adanya sebab ditinjau dari latar belakang dan dasar *ta'zîr* itu sendiri terdapat adanya pendidikan hukum (*ta'dîb*).<sup>82</sup>

Kemudian, 'Abd al-Azîz 'Amîr mengatakan bahwa tujuan hukuman *ta'zîr* selain upaya pencegahan, perubahan tingkah-laku, juga adalah mendidik.<sup>83</sup> Keseluruhan dari proses kerja hukuman *ta'zîr* tetap bermuara pada tujuan akhir dari pelaksanaannya yaitu terciptanya rasa penyesalan yang mendalam (bertaubat) dan tidak mengulangi kembali kejahatan yang serupa di masa akan datang.<sup>84</sup> Jika memperhatikan makna dasar *ta'zîr* adalah mendidik lebih detail lagi, maka taubat merupakan salah satu tujuannya.<sup>85</sup>

Meskipun tujuan *ta'zîr* adalah mencegah atau menolak (الزجر والردع) pelaku kejahatan untuk mengulangi kembali kejahatannya dan perbaikan dan pendidikan (الإصلاح والتهديب), tetapi syari'ah Islam menghindarkan hukuman untuk tujuan penyiksaan dan kesia-siaan sehingga merugikan pelakunya dan ini sudah keluar dari prinsip tujuan semula hukuman *ta'zîr*.<sup>86</sup>

Untuk mencapai tujuan hukuman tersebut, tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar. Keinsyafan/ taubat tidak begitu saja muncul dalam diri seseorang, tetapi memerlukan waktu untuk berpikir dan menyadari kesalahannya. Sekalipun pelaku kejahatan telah menerima hukuman bukan berarti setelah itu ia insyaf seketika.



Untuk itulah, *ta'zîr* yang berkenaan dengan jangka waktu tetap untuk menunggu kesadaran terhukum. Jika kesadaran belum terlihat, masa hukuman dapat diperpanjang *imâm*. Sebaliknya, jika waktu yang ditetapkan lebih cepat terjadinya kesadaran, *imâm* dapat menghentikan masa hukuman dengan jalan membebaskannya.<sup>87</sup>

### 3. *Imâm* Sebagai Pelaku *Ta'zîr*.

*Imâm* dalam pemerintahan berarti pemimpin masyarakat. Istilah ini merupakan padanan dari istilah '*amîr*' dan '*khalîfah*'. Untuk menggantikan fungsi kenabian dibentuk lembaga *imâmah* yang bertujuan untuk memelihara agama dan mengatur dunia.<sup>88</sup>

Pada dasarnya dalam dunia sunni *imâm* juga disebut dengan *khalîfah* dan *amîr* kecuali jika ditinjau dari fungsinya yang berbeda. Disebut dengan *imâm* karena dilihat dari fungsinya sebagai pemimpin yang ditaati dan diikuti seperti halnya jema'ah salat mengikuti *imâm*-nya. Disebut *amîr* dilihat dari fungsinya sebagai penguasa militer tertinggi dan kepala administrasi pemerintahan. Akhirnya, disebut *khalîfah* karena yang memerintah adalah seorang yang berstatus sebagai pengganti *Rasûlullâh* atau wakil Tuhan dalam memelihara agama dan mengurus kepentingan umat. Untuk itu, *imâm* di sini memiliki dua bentuk pengertian yaitu *imâm* secara makro dan *imâm* secara mikro. *Imâm* secara makro adalah orang yang mengatur segala kepentingan umum yang ditaati baik urusan keagamaan maupun urusan keduniaan. *Imâm* ini merupakan *khalîfah* (pengganti) Nabi yang mengatur kehidupan keagamaan dan politik duniawi. *Imâm* secara mikro adalah *imâm* dalam salat yang memimpin gerakan-gerakan salat *ma'mûm* secara berjema'ah.<sup>89</sup>

Râsyid Ridâ mengatakan bahwa Lembaga Institusi *Khalîfah* disebut *al-khilâfah*, *al-imâmah al-'uzmâ'*, ataupun *imârah al-mu'minîn*. Keempat term tersebut memiliki pengertian yang sama yaitu kepemimpinan pemerintahan Islam secara menyeluruh untuk mencapai kemaslahatan agama dan dunia.<sup>90</sup> Ibnu Khaldûn juga mengartikan *khalîfah* dengan pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad saw. dalam memelihara agama dan mengendalikan urusan dunia.<sup>91</sup>

Dengan demikian, pengertian *imâm* dapat disamakan dengan *khalîfah* dan *amîr*. Namun, pengertian *imâm* disini akan berlainan dengan *imâm* menurut ajaran syi'ah.



Penggunaan secara teknis term *imâm* ini dalam syi'ah berkaitan dengan seseorang yang memiliki *Nur al-Muhammadiyah* (*Muhammadan Light*) yang diperoleh melalui jalur Fâtimah dan 'Alî, *imâm* pertama dan berlanjut pada *imâm-imâm* selanjutnya dan berakhir pada *imâm* yang *gaib*, yang akan muncul kembali sebagai *al-Mahdi*. Akibat adanya *Nur Muhammadiy* itu, maka *imâm* adalah *ma'sûm*.<sup>92</sup> Persoalan *imâmah* ini merupakan pokok ajaran agama.<sup>93</sup> Bagi aliran Syi'ah Isnâ 'Asy'ariyyah, *imâm* yang terakhir *gaib* adalah *imâm* yang kedua belas yang dimitoskan sebagai *al-Mahdi al-Muntazar* yang dianggap hilang secara misterius sejak usia kanak-kanak.<sup>94</sup> Sementara itu, bagi aliran Syi'ah Ismâ'iliyyah atau Sab'iyyah bahwa *imâm* yang *gaib* itu adalah *imâm* yang ketujuh yaitu Ismâ'il bin Ja'far yang dianggap tidak mati<sup>95</sup> dan dipandang sebagai *al-Qâ'im* (Yang Bangkit) untuk menegakkan keadilan di muka bumi.<sup>96</sup> Jadi, *imâm* bagi syi'ah adalah bagian pokok keimanan yang harus diyakini kedatangannya suatu saat dan dianggap suci dari dosa.<sup>97</sup>

Meskipun terjadi perbedaan yang mendasar mengenai pemahaman *imâm* ini, penulis tidak memasukkan konsep *imâm* ini menurut pemahaman syi'ah, tetapi konsep *imâm* dalam pemahaman sunnî sebagai pemimpin masyarakat atau negara.

Pada prinsipnya tugas seorang *imâm* sebagaimana tugas seorang *khalîfah* dan *amîr* adalah melanjutkan tugas-tugas kenabian saw sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan.<sup>98</sup> *Imâm* bukanlah *ma'sûm* dari kesalahan dan dosa, egois pemikiran, kebal dari nasihat dan kritik, terhindar dari hukum Allâh Swt., melainkan adalah pengganti dari kewajiban yang diberikan umat. *Imâm* diikuti dan ditaati selama ia berada dalam cita-citanya dan selama menegakkan hukum-hukum Allâh Swt. Ia akan disingkirkan jika melenceng dan meremehkan hukum-hukum Allâh Swt.<sup>99</sup>

Dengan pemahaman dasar tentang *imâm* di atas, maka hukum-hukum Allâh Swt. akan berjalan dengan sendirinya sebab *imâm* adalah pelanjut tugas-tugas Nabi sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Hal ini beralasan bahwa Nabi juga melaksanakan hukum-hukum Allâh Swt. Namun, jika suatu negara bernuansa nasionalisme, sekularisme, dan atheis, maka hukum-hukum Allâh Swt. tidak berjalan sekaligus keberadaan *imâm* menjadi luntur. Dalam konteks hari ini, negara itu disebut negara Islam.

Disebutkan negara Islam jika penduduknya mayoritas Islam dan hukum-hukum Islam terlihat di dalamnya, atau negara-negara yang tidak dikuasai muslim selama penduduknya muslim melakukan hukum-hukum Islam, ataupun selama tidak ada hal-hal yang menghalang-halangi mereka untuk melahirkan hukum-hukum tersebut. Kebalikannya, negara bukan Islam adalah penduduknya minoritas muslim dan hukum-hukum Islam tidak terlihat di dalamnya, atau negara-negara yang dikuasai kaum muslimin, tetapi hukum-hukum Islam tidak terlihat berjalan didalamnya, ataupun ada pihak-pihak yang menghalangi mereka untuk melahirkan hukum-hukum tersebut.<sup>100</sup>

Negara-negara seperti 'Arab Saudi atau *Al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'ûdiyyah* dengan bentuk negara *monarchi* mendasari Islam sebagai dasar negaranya<sup>101</sup> dan Pakistan atau *Islamic Republic of Pakistan (Jamhuriya-e Pakistan)* yang bentuk pemerintahannya adalah Republik Islam<sup>102</sup> termasuk negara-negara Islam, sedangkan Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara yang berdasarkan Pancasila sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>103</sup> Penduduk Indonesia dipersilahkan melaksanakan hukum-hukum Islam tertentu yang telah dilembagakan dalam peraturan-peraturan, seperti tertuang dalam kompilasi hukum Islam dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 yang memuat Buku I Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan, dan Buku III Hukum Perwakafan.<sup>104</sup> Namun, hukum pidana Islam posisinya di tengah-tengah perundang-undangan dan konteks politik hukum Islam di Indonesia masih bagian dalam perjuangan membentuk hukum pidana nasional. Perumusannya tidak perlu terpaku pada rumusan yang tersurat dalam ayat-ayat. Namun, yang terpenting adalah bagaimana hukum pidana Islam dapat diterima seluruh bangsa Indonesia tanpa harus memakai kata-kata yang pas menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan lingkungan dan kondisi Islam di Indonesia berlainan dengan negara-negara lain yang menerapkan hukum Islam.<sup>105</sup>

Menurut Dawam Rahardjo, di Indonesia pernah terjadi Konferensi Ulama tahun 1954 yang mencetuskan bahwa Presiden Soekarno dalam hukum syara' disebut dengan seorang *wâlî al-amr bi asy-syaukah* (*û syaukah* artinya orang yang sedang berkuasa atau sedang memerintah), apakah dia dinilai tidak berbuat adil atau dianggap zalim ?. Kedudukannya itu merupakan sumber legitimasi bagi pengangkatan para *qâdî*, penghulu



atau *wâlî* hakim yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan nikah. Inilah yang melatarbelakangi pandangan, mengapa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka kepala negara haruslah seorang muslim. Dalam UUD 1945 memang tidak ada yang mengatur ketentuan bahwa presiden harus beragama Islam. Namun, untuk bisa mendapatkan dukungan dari kaum muslim dalam pemilihan umum atau dalam MPR, seorang yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, mestilah seorang muslim. Kalau tidak, maka akan timbul krisis legitimasi.<sup>106</sup>

Setelah reformasi dengan pengunduran diri presiden Soeharto dari kursi kepresidenan, maka pintu keterbukaan bagi setiap pemeluk agama dapat mencalonkan diri sebagai presiden. Itu artinya, Presiden Indonesia tidak harus beragama Islam.

Sejak dulu al-Mawardî telah memberikan syarat-syarat tertentu untuk bisa diangkat menjadi *imâm*. *Pertama*, adil untuk setiap kelompok. *Kedua*, berilmu yang diarahkan untuk ber-*ijtihâd* terhadap semua persoalan dan hukum-hukum. *Ketiga*, sehat inderawi seperti pendengaran, penglihatan, dan lidah untuk dapat secara baik dan langsung menyaksikan suatu peristiwa. *Keempat*, sehat anggota-anggota tubuh lainnya yang dapat mengurangi dan mencegah kebebasannya bergerak dan kesegaraan bertindak. *Kelima*, pandangan yang luas terhadap persoalan politik rakyat dan pengaturan kemaslahatan. *Keenam*, berani melaksanakan perlindungan terhadap semua permasalahan dan *jihâd* pada musuh. *Ketujuh*, keturunan berasal dari suku Quraisy sebagaimana dimaksudkan hadis dan *ijmâ'* sahabat, tidak disyaratkan seorang muslim dalam hal ini.<sup>107</sup>

Sementara itu, menurut Wahbah az-Zuhailî, *imâm* juga harus memiliki syarat-syarat yaitu muslim, merdeka, laki-laki, berakal, *bâlig*, mampu dalam artian sehat jasmaniah, membenci kefasikan, wajib mengadakan perbaikan (*islâh*), bangsa Quraisy yang tidak disyaratkan dari Banî Hâsyim atau keturunan 'Alî (sebagaimana pemahaman sebagian Syi'ah).<sup>108</sup>

Suku Quraisy sebagai syarat yang ditetapkan di atas bagi *imâm* sebagian menolaknya sehingga terjadi dua kubu. Ada yang mengatakan harus berasal dari suku Quraisy sebagaimana pendapat sebagian kaum Muktazilah dan Khawarij dan ada yang mengatakan tidak harus Quraisy sebagaimana pendapat sebagian lain kaum Muktazilah.<sup>109</sup>

Karena terjadi pertentangan syarat suku Quraisy dalam pemilihan *imâm* di atas, maka penulis beranggapan bahwa suku Quraisy bukanlah

merupa  
syarat-s  
bahwa  
pemilih

Ke  
seorang

1. Ber
2. Isla
3. Par
4. Per
5. Ari
6. Ke
7. Sul

Pe  
hangat  
adalah  
adanya  
Bahkan  
harus  
ulû al-  
berken  
Jadi, in  
Le  
surat a



merupakan syarat prioritas pertama, melainkan syarat terakhir jika syarat-syarat lain telah dipenuhi. Bahkan, di sisi lain dapat dikatakan bahwa suku Quraisy bukanlah syarat mutlak atau harus ada dalam pemilihan *imâm*, melainkan hanya sebagai pelengkap belaka.

Kemudian, Muhammad Rawwâs Qal'ahjih mengatakan bahwa seorang *imâm* itu harus mempunyai syarat-syarat, yaitu:

1. Berakal sehat dan *bâlig* sebab seluruh pekerjaan itu hanya dibebankan kepada orang-orang yang berakal dan *bâlig*.
2. Islam dan hal ini merupakan keharusan karena pemerintahan adalah kekuasaan umum, sedangkan kekuasaan dari non-muslim tidak perlu terjadi.
3. Pandai dalam hukum syari'ah Islam.
4. Pemberani dalam penegakkan *amar ma'rûf* dan *nahî munkar*.
5. Arif dan bijaksana seperti mempunyai sifat-sifat lembut dan bukan lemah, keras dan tidak bengis, bisa menahan diri dan tidak pelit, dan toleran dan tidak boros. Jika satu sifat saja tidak ada dalam diri seorang pemimpin, maka sifat yang tiga lagi tidak ada gunanya.
6. Ketaqwaan yaitu sifat yang bisa membawa pemiliknya untuk menjalankan semua perintah Allâh Swt. dan menjauhi semua larangan-Nya.
7. Suka bekerja keras dan tidak menyerahkan pekerjaan kepada orang yang tidak punya minat sama sekali dan tidak punya sifat mau menerima (*qana'ah*) kecuali jika terpaksa agar hasil pekerjaan itu bisa sempurna adanya.<sup>110</sup>

Persoalan *imâm* muslim atau tidak muslim juga menjadi pembincangan hangat di kalangan *fuqahâ'*. Asy-Syâfi'î menyebutkan bahwa *imâm* itu adalah pemimpin pengganti *Rasûlullâh saw*.<sup>111</sup> Dibalik konteks tersebut adanya keyakinan Islam sebagaimana yang diyakini oleh *Rasûlullâh saw*. Bahkan, ketika dia mengatakan bahwa jika terjadi perselisihan, mereka harus mengembalikan pada Alquran dan sunnah, termasuk *imâm* atau *ulû al-amr*. Dengan demikian, tidak mungkin pemimpin yang non-muslim berkenan mengembalikan permasalahannya pada Alquran dan sunnah. Jadi, *imâm* adalah muslim.<sup>112</sup>

Lebih detail ayat yang dijadikan sandaran asy-Syâfi'î adalah Alquran surat an-Nisâ' ayat 58-59 yang berbunyi;



﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٨﴾

Artinya: '(58). Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

(59). Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya'.

At-Tabarî menafsirkan *ulû al-amr* dengan 'Umarâ', 'ulamâ', fuqahâ', sahabat-sahabat Nabi saw., dan *Khilâfah ar-Râsyidah*.<sup>113</sup> Bahkan, dalam *Kitâb Hâsiyah as-Sâwî 'an Tafsîr al-Jalâlain* disebutkan juga bahwa *ulû al-amr* juga adalah *Khulafâ' ar-Râsyidîn* dan pemimpin-pemimpin *mujtahid*, dan para hakim.<sup>114</sup>

Al-Marâgî menafsirkan *ulû al-amr* dengan kata 'Umarâ', hakim, 'ulamâ', pemimpin tentara, dan seluruh pemimpin dan tokoh yang berkonsentrasi pada kebutuhan dan kemaslahatan umum. Mereka wajib ditaati dengan syarat menciptakan keamanan umum dan tidak berlawanan dengan perintah Allâh dan sunnah Rasûl-Nya yang dikenal secara *mutawâtir*.<sup>115</sup>

Di sini jelas bahwa *ulû al-amr* adalah pemimpin yang mengemban amanah dan melaksanakan perintah Allâh Swt. dan Rasûl-Nya. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang non-muslim. Untuk itu, *ulû al-amr* sangat dipastikan adalah seorang muslim. Bahkan, ayat lain melarang mengangkat pemimpin dari golongan orang-orang kafir yang berbunyi dalam surat An-Nisa' ayat 144;

﴿ أَتُرِيدُونَ أَنْ

Artinya  
orang-orang  
orang mukm  
(untuk meny

At-Taba  
orang-orang  
orang muna  
sebagai tinc  
dari orang-

Sekalip  
muslim bagi  
tetapi hal in  
masing-mas  
maka wajib  
mendasarin  
maka sang  
memperebe

Berda  
dibagi pula  
melarang n  
bangkai. P  
seperti der

Menu  
ta'zîr yang  
Pertama, t  
dilarang se  
tidak dilar  
penguasa  
tingan ma  
pada raky  
memelihar  
terhadap



يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ؕ أَتُرِيدُونَ أَنْ  
تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١١٦﴾

Artinya: 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali (penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?'.

At-Tabarî menafsirkan ayat tersebut sebagai larangan mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin sebab hal tersebut merupakan sifat orang munafik.<sup>116</sup> Bahkan, dalam *Kitâb Hâsyiyah as-Sâwî* juga disebut sebagai tindakan orang-orang munafik yang mengangkat pemimpinnya dari orang-orang *kâfir*.<sup>117</sup>

Sekalipun demikian, masih ada ulama yang tidak mensyaratkan muslim bagi pengangkatan *imâm* seperti pendapat Al-Mawardî sebelumnya, tetapi hal ini sangat bergantung pada kondisi bangsa dan bentuk negara masing-masing. Jika suatu negara mendasarinya dengan agama Islam, maka wajib *imâm* tersebut berasal dari muslim. Jika suatu negara tidak mendasarinya dengan agama Islam sekalipun mayoritas penduduknya, maka sangat bergantung pada upaya setiap penganut agama untuk memperebutkan kursi ke-*imâm*-an tersebut.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka pelaksanaan *ta'zîr* dapat dibagi pula bentuknya. Ada *ta'zîr* berasal dari syara' seperti ayat-ayat yang melarang melakukan sesuatu perbuatan yang haram misalnya memakan bangkai. Pelakunya di-*ta'zîr*. Adapula *ta'zîr* yang berasal dari penguasa seperti denda bagi pelanggar peraturan lalu-lintas.

Menurut Ahmad Hanafi, pelaksanaan *ta'zîr* ada dua bentuk yaitu *ta'zîr* yang ditetapkan syara' dan *ta'zîr* yang ditetapkan oleh penguasa. Pertama, *ta'zîr* yang ditetapkan oleh syara' dalam bentuk maksiat tetap dilarang selama-lamanya dengan tidak mungkin akan menjadi perbuatan tidak dilarang pada waktu kapanpun juga. Kedua, *ta'zîr* yang ditetapkan penguasa bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendakinya. Pelaksanaan *ta'zîr* oleh penguasa pada rakyatnya bertujuan agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan umum serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak.<sup>118</sup>



Untuk itu, *ta'zîr* diserahkan syari'ah pengurusannya kepada *imâm* sebab *imâm* bertanggung-jawab terhadap pemeliharaan hak-hak masyarakat. Undang-undang dan peraturan-peraturan merupakan konsekwensi dari penerapan *ta'zîr* sebab di dalamnya telah memuat sangsi-sangsi bagi orang yang melanggarnya.<sup>119</sup>

Namun, sesuatu kejahatan yang telah ditentukan syara' menjadi *haram* untuk selamanya sehingga tidak boleh diubah menjadi sesuatu yang *mubâh*. Adapun sesuatu yang *haram* berdasarkan penetapan *sultân* (*ulû al-amr*) pada satu waktu, pada waktu lain dapat menjadi sesuatu yang *mubâh* jika ada kemaslahatan umum di dalamnya.<sup>120</sup>

Manakala proses pelaksanaan hukuman *ta'zîr* yang dilakukan *imâm* terjadi sesuatu di luar dugaan yang membawa kematian kepada pelaku kejahatan akibat pukulan atau cambukan, apakah *imâm* bertanggung jawab atas kematian tersebut ?

Dalam menanggapi permasalahan ini, Ibnu Hajar al-'Asqalânî memberikan jawaban bahwa *imâm* wajib membayar *diyat* (denda) sebab hukuman cambukan bukan merupakan hukuman dasar dari syari'ah, tetapi sudah merupakan hukuman tambahan dari *imâm* bersangkutan sebagaimana *qa'idah* *إِنَّ الْأَمْلَ الضَّرْبَ بِغَيْرِ السُّوْطِ* (Sesungguhnya dasar memukul itu adalah tanpa cambukan).

Oleh karena itu, jika terhukum meninggal ketika proses hukuman, maka *imâm* wajib membayar *diyat*. Hal ini berdasarkan pendapat 'Alî bin Abî Tâlib dan disetujui 'Umar sebagaimana *asar* di bawah ini.

Ketika 'Umar mengutus Mugîbah untuk menemui seorang wanita (untuk menemui 'Umar), wanita itu berkata, 'Wahai celakalah bagi dia dan bagi 'Umar! Tatkala dalam perjalanan, tiba-tiba wanita itu terkejut dan merasakan sakit karena hendak melahirkan. Lalu, ia melahirkan anaknya saat itu dan melihat bayinya berteriak dua kali dan meninggal. Kemudian, 'Umar bermusyawarah dengan sahabat Nabi Muhammad saw. yang lain. Sebagian mereka mengisyaratkan bahwa hal itu bukanlah menjadi masalah bagi 'Umar sebab dia penguasa (hakim) dan pemberi hukuman (*mu'addib*). 'Umar terdiam atas isyarat itu. Lalu, 'Umar berkata kepada 'Alî bin Abî Tâlib, 'Apa pendapatmu wahai Abû al-Hasan?'. 'Alî menjawab, 'Jika mereka berkata dengan pikiran mereka, sungguh pikiran mereka itu salah. Jika mereka berkata menurutkan nafsumu, mereka tidak memberikan nasihat (yang baik) kepadamu. Sesungguhnya



engkau wajib membayar *diyat* kepadanya karena engkau telah mengejutkannya'. Lalu, wanita itu menemui 'Umar dan 'Umar berkata, 'Aku akan memberikan *diyat* kepadamu agar engkau tidak merasakan kesusahan sehingga engkau membagikan *diyat* itu atas kaummu'.<sup>121</sup>

Dari *asar* di atas, 'Umar setuju pendapat 'Alî bahwa ia harus membayar *diyat* kepada wanita yang meninggal anaknya ketika dalam perjalanan menemuinya melalui berita dari utusannya yang bernama Mugîbah.

Hal ini dikarenakan *imâm* bertindak atas nama hukum, sesuatu yang diputuskan *imâm* berdasarkan prinsip menjunjung tinggi kemaslahatan dari Allâh Swt. *Imâm* hanya menjalankan tugas keagamaan yang diamanahkan kepadanya. Inilah yang terjadi pada pada kasus 'Umar di atas, 'Umar hanya diwajibkan membayar *diyat*.

Dengan demikian, untuk menjaga kehati-hatian dan kesewenangan penguasa dalam bertindak yang membawa kematian terhukum, jaminan *diyat* merupakan solusi yang cukup tepat.

Salah satu tugas berat seorang *imâm* adalah penegakan hukum. Untuk itu, ia memberikan wewenang tersebut kepada *qâdî* atau *hâkim* sebagai penggantinya secara proporsional dan profesional.

Sepanjang sejarah *Rasûlullâh saw.* dan *Khilâfah ar-Râsyidah* jabatan *qâdî* terkadang dirangkap oleh seorang *imâm*. *Rasûlullâh saw.* sebagai pemimpin juga sumber hukum kedua setelah Alquran, sedangkan *ijtihâd* sahabat dianggap sebagai *hujjah* sebab kedekatan mereka pada *Rasûlullâh saw.* semasa hidupnya, khususnya sahabat-sahabat besar yang menjadi *khalîfah*. Setelah mereka, jabatan *qâdî* terpisah dari *imâm* sampai hari ini.

*Imâm* dapat mengangkat dan memberhentikan *qâdî*. *Qâdî* adalah wakil atau kepercayaan dari kaum muslimin. Pemberhentiannya tidak boleh dilakukan jika ia masih dalam kebenaran (*haq*). *Qâdî* juga wakil dari *imâm* (dalam struktur kepemimpinan) dan menyukseskan pekerjaan *imâm* di bidang perkara hukum. Akhirnya, *imâm* juga adalah wakil atau kepercayaan umat dalam memelihara kemaslahatan, melaksanakan ajaran-ajaran Allâh Swt., dan mengawasi pelaksanaan hukum-hukum-Nya untuk dilaksanakan manusia.<sup>122</sup>

Oleh karena itu, *qâdî* mempunyai syarat-syarat yang harus dimilikinya sebagai berikut;



1. Pria dan tidak sah wanita. Khusus syarat wanita masih menjadi *ikhtilâf* 'ulamâ'.
2. Berakal sehat.
3. Muslim sebab selamanya Allâh Swt. tidak memperkenankan orang-orang *kâfir* mengurus persoalan hukum ini pada orang-orang muslim secara mutlak.
4. Adil, amanah, dan tidak pasik.
5. Berilmu tentang hukum-hukum syara' sehingga dapat membedakan antara yang *haq* dan *bâtil*.
6. Sehat pendengaran, penglihatan, dan pemikiran.<sup>123</sup>

Disamping itu, menurut at-Tarîff, *qâdî* harus memiliki syarat-syarat, yaitu:

1. Islam. *Fuqahâ'* sepakat bahwa jabatan *qâdî* harus dipegang oleh kaum muslimin sebab *qâdî* dituntut untuk melaksanakan hukum-hukum Allâh Swt. dan pelaksanaan syari'ah-Nya dan yang melaksanakan ini adalah orang yang mencintai Islam dengan dasar taqwa. Terlebih-lebih untuk kemaslahatan kaum muslimin yang tidak mungkin dilaksanakan orang *kâfir*. Orang *kâfir* itu hanya boleh menjadi *qâdî* untuk kalangan agama mereka saja.
2. *Bâlig*. Tidak boleh mengangkat *qâdî* anak-anak yang belum *bâlig* dan tidak *mukallaf* sebab akal mereka belum sempurna pertumbuhannya dan memegang amanah yang dititipkan padanya.
3. Berakal dan tidak sah *qâdî* bagi orang gila, kurang akal, sakit, dan pelupa.
4. Orang merdeka.
5. Lelaki.
6. Adil. Sifat-sifat adil ini dapat ditandai dengan menunaikan kewajiban-kewajiban agama, tidak melakukan dosa besar, terhindar dari dosa kecil, dapat mengendalikan marah dan kesenangan, jauh dari keraguan, benar dalam perkataan dan perbuatan, nyata amanahnya, dan terhindar dari perbuatan-perbuatan menurunkan martabatnya.
7. Berilmu. Kemampuan ber-*ijtihâd* dalam persoalan hukum Islam.
8. Sehat penglihatan.
9. Sehat pendengaran.
10. Mampu membaca dan menulis.<sup>124</sup>

Demikianlah, pada umumnya syarat-syarat bagi seorang *qâdî* dalam pandangan *fuqahâ'* dan telah berlangsung selama berabad-abad dalam sejarah Islam. *Qâdî* inilah yang mendapat wewenang dan tanggung-jawab dari *imâm* sekaligus *nas* untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan *ijtihâd*-nya sebagaimana hadis di bawah ini,

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

Artinya: "Dari Abû Qais maulâ 'Amr bin al-'Âs berkata, 'Rasûlullâh saw. bersabda, 'Apabila seorang hakim menjatuhkan hukuman dan ber-*ijtihâd* secara benar, ia mendapat dua pahala. Apabila ia menjatuhkan hukuman dan ber-*ijtihâd* (ternyata) salah, ia mendapat satu pahala". (H.R. Sunan Abû Dâud Kitab al-Aqdiyah no. 3105).<sup>125</sup>

Dari hadis di atas, *Rasûlullâh saw.* memberikan wewenang dan tanggung-jawab kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman pada orang yang bermasalah hukum dengan mengeluarkan seluruh kemampuan *ijtihâd*-nya. Jika benar, maka ia mendapat dua pahala. jika salah, ia hanya mendapat satu pahala. Namun begitupun, *ijtihâd* dan keputusan hukumnya tetap mendapat penghargaan agama berdasarkan hadis di atas.

Dari hadis di atas, *Rasûlullâh saw.* memberikan wewenang dan tanggung-jawab kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman pada orang yang bermasalah hukum dengan mengeluarkan seluruh kemampuan *ijtihâd*-nya. Jika benar, maka ia mendapat dua pahala. jika salah, ia hanya mendapat satu pahala. Namun begitupun, *ijtihâd* dan keputusan hukumnya tetap mendapat penghargaan agama berdasarkan hadis di atas.



#### 4. Seluk-beluk Hukuman *Ta'zîr*.

##### a. Katagori maksiat yang dihukum *ta'zîr*.

Maksiat (durhaka atau tidak patuh) adalah suatu perbuatan yang tidak mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allâh Swt. seperti kedurhakaan umat pada masa lalu kepada para Nabi dan ajaran yang dibawanya.<sup>126</sup>

Makna yang sejenis dengan kata maksiat adalah *jarîmah* atau *jinâyah*. *Jarîmah* merupakan kedurhakaan seorang hamba kepada Allâh Swt. yang disyari'ahkan hukumannya melalui *had* ataupun *ta'zîr*; sedangkan *jinâyah* adalah suatu nama pekerjaan yang diharamkan syara' baik yang ada hubungannya dengan jiwa seperti melukai, memukul, dan, membunuh, maupun yang ada hubungannya dengan harta seperti mencuri dan lain-lain. Kedua pengertian *jarîmah* dan *jinâyah* adalah sama karena merupakan suatu tindak kejahatan yang diharamkan syara' dan *fuqahâ'* selalu menggunakan kedua bentuk kata itu untuk menyebut suatu kejahatan di dalam Islam.<sup>127</sup>

*Fuqahâ'* bersepakat bahwa seseorang yang meninggalkan kewajiban agama dan mengerjakan pekerjaan yang diharamkan adalah maksiat dan dihukum *ta'zîr*. Jika ia meninggalkan yang sunat-sunat atau mengerjakan yang *makrûh*, *fuqahâ'* sepakat tindakan keduanya termasuk maksiat. Namun, mereka berselisih-paham apakah kedua tindakan tersebut termasuk maksiat atau tidak. Kelompok pertama mengatakan bahwa tidak boleh di-*ta'zîr* sebab beralasan *ta'zîr* dihukum selain terdapat ada di sana *taklîf* dan bukanlah keberadaan *ta'zîr* ada pada hal-hal yang sunat (*nadb*) ataupun *makrûh*, dan hukuman *ta'zîr* hanya diberlakukan pada orang yang meninggalkan kewajiban. Kelompok kedua mengatakan bahwa boleh diberlakukan *ta'zîr* sebab beralasan pada tindakan 'Umar yang men-*ta'zîr* seorang laki-laki yang membaringkan seekor kambing untuk disembelih dengan cara membanting-bantingnya kesana-kemari.<sup>128</sup> Terkadang, hukuman *ta'zîr* dijatuhkan pada perbuatan yang tidak termasuk maksiat sebagaimana praktek 'Umar seperti menceraikan isteri bukanlah tindakan maksiat sebab sesuatu yang dibolehkan, tetapi dibenci Allâh Swt. Namun, kata-kata cerai yang dilontarkan seorang suami sampai seribu kali dan bermain-main dalam satu waktu membuat 'Umar menghukumnya dengan *ta'zîr* yaitu mencambuknya dan selanjutnya memisahkan mereka berdua.<sup>129</sup>

Sement  
dapat dilak  
sesuatu yan  
satu tempat  
kelamin. Pe  
pada hewan  
(manusia) c

Pada sis  
yang diwaji

1. Maksiat  
menipu  
lain unt
2. Maksiat  
tidak di
3. Maksiat  
memuku

Sement

- a. *Ta'zîr* ter  
yang tic
- b. *Ta'zîr* ter  
undang-  
Biasany
- c. *Ta'zîr* te  
lebih se  
menger

'Abd al-  
menyebutka

- a. Biasany  
seperti  
menipu  
suap, m  
cari kes  
tetapi ti
- b. Jika per



Sementara itu, asy-Syaukânî berpendapat bahwa maksiat yang dapat dilakukan hukuman *ta'zîr* diantaranya: makan dan mencela sesuatu yang diharamkan, bersetubuh dengan isteri melalui dubur, satu tempat tidur dengan 'orang asing' yang sejenis ataupun lain jenis kelamin. Permainan dadu, catur, menyanyi, perjudian, kesenangan pada hewan. Jelasnya, sesuatu yang bersangkutan dengan hak *adamî* (manusia) dan hak Allâh.<sup>130</sup>

Pada sisi lain Muhammad Fathî ad-Durainî membagi kemaksiatan yang diwajibkan hukuman *ta'zîr* menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Maksiat yang bersangkut-paut dengan harta pribadi seperti menipu susu asli dengan susu yang sudah dicampur dengan yang lain untuk dijual.
2. Maksiat yang terjadi pada harta orang lain seperti pencurian yang tidak diwajibkan *had*.
3. Maksiat yang tidak ada sangkut-pautnya dengan harta seperti memukul orang lain dan lain-lain.<sup>131</sup>

Sementara itu, *ta'zîr* dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu:

- a. *Ta'zîr* terhadap maksiat yaitu maksiat yang termaktub dalam Alquran yang tidak ada *had*-nya.
- b. *Ta'zîr* terhadap maslahat umum yaitu *ta'zîr* yang berada dalam sangsi undang-undang atau peraturan-peraturan umum dalam masyarakat. Biasanya, *ta'zîr* ini berasal dari ketentuan pemerintah setempat.
- c. *Ta'zîr* terhadap pertentangan-pertentangan lain yaitu sesuatu yang lebih sedikit derajat kemaksiatannya yang tercakup dalam hal-hal mengerjakan yang *makrûh* dan meninggalkan yang *sunat*.<sup>132</sup>

'Abd al-Qâdir al-'Audah memerinci ketiga macam *ta'zîr* di atas dengan menyebutkan bahwa:

- a. Biasanya berbentuk larangan-larangan yang ada dalam Alquran seperti pengharaman sebagian makanan, mengkhianati amanah, menipu dalam timbangan, saksi palsu, makan *ribâ*, mencaci-maki, suap, memasuki rumah orang-orang miskin tanpa *haq*, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Kesemuanya merupakan larangan Alquran, tetapi tidak ada hukumannya secara keduniaan disana.
- b. Jika perbuatan atau sesuatu kondisi yang diciptakan seseorang



mengganggu kemaslahatan atau aturan umum, perlu diberikan hukuman *ta'zîr* seperti menertibkan para bencong yang mengganggu ketertiban umum. Biasanya kondisi ini ditangani oleh peraturan-peraturan pemerintah setempat.

- c. Bagian ketiga ini masih diperselisihkan *fuqahâ'* seperti apakah orang-orang yang mengerjakan yang *makrûh* atau meninggalkan yang sunat perlu di-*ta'zîr* atau tidak? Kelompok pertama mengatakan bahwa tidak ada hukumannya sebab *makrûh* bukanlah larangan dan *mandûb* bukanlah perintah sehingga bukan merupakan *ta'klîf* (beban hukum). Tidak ada hukuman bagi orang yang tidak ada *ta'klîf*-nya. Kelompok kedua mengatakan bahwa ada hukumannya sebab *makrûh* adalah larangan dan sunat adalah perintah. Orang yang melanggarnya perlu di-*ta'zîr*, tetapi mereka tidak mengatakan hal itu maksiat tetapi *mukhâlafah* (saling bertentangan) dan merupakan sikap tercela. Begitupun, mereka mensyaratkan *ta'zîr* dapat dilakukan jika perbuatan yang *makrûh* dan meninggalkan yang sunat selalu dilakukan berulang-ulang atau bukan sekali saja.<sup>133</sup>

Demikianlah, sekilas-lintas mengenai pengertian maksiat dan sejenisnya dari *fuqahâ'* yang dapat dihukum *ta'zîr* sehingga dapat dirangkumkan bahwa seluruh kategori maksiat dapat dijatuhkan *ta'zîr* melalui keputusan *imâm*.

#### b. Bentuk-bentuk Hukuman *Ta'zîr*.

Pada dasarnya hukuman *ta'zîr* diterapkan adalah untuk penegakkan kemaslahatan umum sehingga keberadaannya merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan demi terciptanya keamanan masyarakat.<sup>134</sup>

Oleh karena itu, asy-Syaukânî berpendapat bahwa *ta'zîr* berlaku pada setiap pemerintahan yaitu berbentuk pemenjaraan, mencela wibawanya, ataupun memukulnya.<sup>135</sup> Hal yang sama juga dikemukakan Ibnu 'Imâd al-Aqfahî bahwa hukuman *ta'zîr* dalam dilakukan dengan memukul atau memenjarakan pelakunya.<sup>136</sup>

Muhammad Salîm al-Awwâ melengkapinya dengan menyatakan bahwa hukuman *ta'zîr* dapat berbentuk menasihati, mencela atau menegur, pengasingan, mengancam, publikasi kepada khalayak ramai tentang kejahatannya, penyitaan harta, penjara, cambuk, dan hukuman mati.<sup>137</sup>



Muhammad Rawwâs Qal'ahjih mengemukakan hukuman *ta'zîr* sepanjang masa kekhalifahan 'Umar yaitu: ancaman, cambuk, memperjelek penampilannya, mengarak keliling kampung, pengasingan, pengucilan, penjara, melarang menikah, menjatuhkan cerai antara suami dan isteri, penyitaan dan pemusnahan harta, hukuman mati.<sup>138</sup>

Menurut 'Abd al-'Azîz 'Amîr, hukuman *ta'zîr* dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk. *Pertama*, nasihat yaitu dengan memberikan kalimat-kalimat yang menggugah jiwanya sehingga menyadari kekeliruan-nya dan biasanya kejahatan ini masih katagori ringan. *Kedua*, ancaman, memberikan kalimat-kalimat ancaman sehingga menimbulkan rasa takut dalam dirinya yang akhirnya tidak akan melakukan kejahatan kembali. *Ketiga*, pengasingan yaitu dengan menjauhkan dirinya dari tempat-tempat kejahatan yang dapat memberi kesempatannya untuk melakukan kejahatan kembali. *Keempat*, cambuk yaitu dengan memberikan cambukan beberapa kali pada sekitar anggota tubuhnya kecuali wajah dan kemaluan. *Kelima*, penjara yaitu dengan mengekang kebebasan dirinya sembari mengadakan pengawasan. Dalam konteks Islam penjara bukanlah tempat yang sempit atau sel tahanan, tetapi suatu tempat yang berbentuk rumah, masjid, atau tempat-tempat lainnya yang dapat menahan kebebasannya kecuali salat, menerima pendidikan agama, dan sebagainya. Model penjara ada dua macam yaitu penjara yang terbatas waktunya dan penjara yang tidak terbatas waktunya. Penjara yang terbatas waktunya hanya sementara waktu bisa perhari ataupun perbulan dengan mempertimbangkan pelaku kejahatan tersebut misalnya menjual khamar dan makan *ribâ*, sedangkan penjara yang tidak terbatas waktunya sampai menanti taubat pelaku terkadang menemui kematiannya. *Keenam*, hukuman mati yaitu menghilangkan nyawa terhukum seperti pemuda atau pemudi yang berulang-ulang melakukan perzinahan. Namun, sebagian ulama membantah adanya hukuman mati dalam *ta'zîr* sebab sesuai dengan pernyataan *Rasulullah saw.* bahwa yang halal ditumpahkan darahnya (dibunuh) adalah orang yang membunuh muslim lain, pezina *muhsan*, dan orang yang keluar dari agamanya (keluar dari jema'ah).<sup>139</sup>

Kalau di atas dijelaskan hukuman *ta'zîr* yang tersendiri pelaksanaannya, tetapi *ta'zîr* dapat juga berdampingan dengan *qisâs*, *had*, ataupun *kaffârah* berdasarkan kejahatan yang dilakukan pelakunya seperti:



- 1). *Ta'zîr* dapat berdampingan dengan *qisâs* seperti menambah hukuman *ta'zîr* kepada orang yang memotong anggota tubuh seseorang dengan sengaja. Misalnya, dengan memenjarakannya. Sikap kesengajaan dapat ditambah dengan *ta'zîr*, sedangkan pemotongan anggota tubuh orang lain dihukum *qisâs* dengan memotong anggota tubuh yang sama bagi orang yang melakukannya. Hal ini merupakan hukum *qisâs* bagi pelukaan tubuh bukan *qisâs* yang bersangkutan dengan jiwa yaitu membunuh.
- 2). *Ta'zîr* dapat berdampingan dengan *hudûd* seperti bentuk pengasingan yang terdapat pada hukuman pezina *gair muhsan* setelah mendapat hukuman *jilid* seratus kali dalam Alquran.
- 3). *Ta'zîr* dapat berdampingan dengan *kaffârah* seperti orang yang menyengaja bersetubuh dengan isterinya pada siang hari bulan Ramadan. Penyengajaannya itu dapat ditambah dengan *ta'zîr*, sedangkan bersetubuh dengan isterinya pada siang hari bulan Ramadan dihukum dengan *kaffârah*.<sup>140</sup>

Demikianlah, beberapa jumlah hukuman *ta'zîr* yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan jenis kejahatannya. Namun begitupun, semuanya tergantung pada kebijakan *imâm*.

Untuk itulah, hal ini mengacu pada *qa'idah* fikih:

التَّعْزِيرُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عَظَمِ الْجَرَمِ وَصِغَرِهِ

Artinya: "*Ta'zîr* itu bergantung pada kebijakan *imâm* atas ukuran besar atau kecilnya kejahatan tersebut".<sup>141</sup>

Sekalipun *imâm* mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan hukuman *ta'zîr*, tetapi *imâm* harus mempertimbangan tuntutan kemaslahatan umum atau aturan umum agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Kewenangan tersebut bukanlah kewenangan mutlak, melainkan diikat dengan ketentuan syari'ah.<sup>142</sup>

### c. Syarat-syarat orang yang diberlakukan Hukuman *Ta'zîr*.

Menurut Wahbah az-Zuhailî, syarat-syarat yang dapat diberlakukan hukuman *ta'zîr* kepada pelaku kejahatan adalah orang yang berakal

baik laki-laki maupun perempuan, muslim atau *kâfir*, ataupun *bâlig*. Jika mereka melakukan kejahatan baik bersifat perkataan, perbuatan, ataupun isyarat saja pun, *imâm* dapat menjatuhkan *ta'zîr*.<sup>143</sup>

Begitu juga menurut 'Atiyyah Musyarafah, muslim ataupun *kâfir* tetap dijatuhkan *ta'zîr* jika melakukan kejahatan dalam bentuk perkataan, perbuatan, ataupun isyarat saja seperti meninggalkan salat, meninggalkan puasa, dan meninggalkan atau melanggar kewajiban-kewajiban agama.<sup>144</sup> Bahkan, menurut al-Marginânî, siapapun orangnya yang menjadi subjek dari perbuatan *ta'zîr* baik itu anak-anak yang *bâlig*, budak atau merdeka, muslim atau *kâfir* dan lain-lain akan dijatuhkan hukuman *ta'zîr* juga.<sup>145</sup> Jika anak-anak yang belum *bâlig* atau gila melakukan maksiat *ta'zîr* seperti yang dilakukan oleh orang-orang *bâlig* dan sehat akalnya, maka mereka tidak di-*ta'zîr*.<sup>146</sup> Namun, menurut 'Abd al-'Azîz 'Amîr, jika seorang anak-anak yang belum *bâlig* dan orang gila melakukan kejahatan *ta'zîr* seperti "Wahai pezina!" kepada seseorang, maka mereka dapat di-*ta'zîr* dengan pukulan sekedarnya untuk tidak mengulangnya kembali.<sup>147</sup>

Tidak ada perbedaan *fuqahâ'* mengenai pelaku kejahatan apakah muslim atau non-muslim karena kedua golongan ini jika melakukan kejahatan *ta'zîr* tetap akan mendapatkan hukuman dari imam. Namun, *fuqahâ'* berpendangan bahwa sesuatu yang tidak menyangkut hak Allâh Swt. seperti melaksanakan salat dan puasa tidak menjadi tuntutan pada non-muslim untuk mengerjakannya. Jika salat dan puasa ini ditinggalkan muslim, maka muslim tersebut dikenakan *ta'zîr*. Jika muslim dan non-muslim melakukan kejahatan yang bersifat hak *adamî* (bersifat kemanusiaan) seperti mencela dan memukul orang lain, maka dikenakan *ta'zîr*.

#### d. Berakhirnya hukuman *ta'zîr*.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukuman *ta'zîr* berakhir dengan bertaubatnya pelaku kejahatan ketika menjalani hukumannya. Ibnu Najîm berpendapat bahwa hukuman *ta'zîr* tidak berakhir dengan bertaubatnya pelaku kejahatan. Alasannya, taubat yang dilakukan pelakunya tidak murni sebab telah dicampuri unsur-unsur keinginan untuk cepat bebas dari hukuman sehingga terkesan berpura-pura. Misalnya, seseorang yang mendakwakan (menuduh) seseorang, tetapi tidak dapat dibuktikannya di sidang pengadilan. Kalau dilepas, ia akan melakukan hal



yang sama kepada orang lain. Untuk itu, ia harus dipukul dan dipenjarakan sebab dapat menghindari terjadinya penuduhan kembali kepada orang lain.<sup>148</sup>

Ibnu Farhûn mengatakan bahwa taubatnya pelaku kejahatan *ta'zîr* merupakan akhir hukumannya jika ia dipenjara.<sup>149</sup> Hal yang sama juga dikatakan oleh 'Abd al-'Azîz 'Amîr bahwa taubat merupakan akhir dari hukuman *ta'zîr*. Namun, ia menambahkan bahwa selain taubat, kematian terhukum, dima'afkan *imâm*, dan *at-Taqaddum*. *At-taqaddum* adalah pelaku kejahatan yang telah dijatuhkan vonis hukuman, tetapi hukuman *ta'zîr* belum dilaksanakan. *Imâm* membatalkan dan membebaskan terhukum dari hukuman karena melihat ada kemaslahatannya di dalamnya. Pembatalan tersebut bukan dimasuki unsur-unsur pribadi antara terhukum dengan *imâm*, tetapi memang didasari kemaslahatan tertentu sehingga *imâm* membebaskan terhukum dari tuntutan hukumannya.<sup>150</sup>

Penulis lebih cenderung berpendapat bahwa taubat merupakan akhir dari hukuman *ta'zîr* ini jika ditilik dari surat at-Tahrîm ayat 8 yang berbunyi;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُكْفِرَ عَنْكُمْ  
سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهٰرُ يَوْمَ لَا تَخْزٰى اِلٰهَ النَّبِىِّ  
وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعٰى يَبِيْنَ اَيْدِيْهِمْ وِبِأَيْمٰنِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا  
نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٨﴾

Artinya: 'Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb Kami, sempurnakanlah bagi Kami cahaya Kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

At-Tabarî menafsirkan kalimat taubat di atas dengan kembali dari dosa-dosa mereka menuju ketaatan kepada Allâh Swt. dan melakukan sesuatu yang diridai-Nya.<sup>151</sup> Taubah *nasûhâ* juga diartikan sebagai

penyesalan  
dan tidak  
juga dik  
bertaubat  
mengul  
dimaksi  
bertaubat  
De  
berbeda  
ayat di  
sesuatu  
kekaw  
taubat  
berarti

Se  
berimb  
taubat  
taubat  
mana p  
194 ya  
termas

Se  
kesemp  
baik de  
perbu  
wajar  
ta'zîr.  
dibeba  
meng

T  
menye  
kejah  
paut d  
atau m  
terliha  
perub



penyesalan dari perbuatan maksiat yang khawatir akan siksaan neraka dan tidak akan mengulangi kembali kemaksiatannya.<sup>152</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh ar-Râzî bahwa *nasûhâ* adalah sifat taubat yaitu bertaubat dari keburukan menuju penyesalan dari kejahatan dan tidak mengulangi kembali.<sup>153</sup> 'Umar sendiri ketika ditanya apakah yang dimaksud *taubah nasûhâ* ? ia menjawab *taubah nasûhâ* adalah engkau bertaubat dari dosa kemudian tidak ingin mengulanginya kembali.<sup>154</sup>

Dengan demikian, taubat dalam konsep *ta'zîr* di sini tidak jauh berbeda dengan konsep *taubah nasûhâ* secara umum. Apalagi dalam ayat di atas digunakan kata '*asâ*' yang ditafsirkan oleh Al-Marâgî adalah sesuatu yang menunjukkan keinginan agar dima'afkan dosanya. Adanya kekhawatiran taubat tidak diterima dan bercampur-aduk dengan harapan taubat diterima Allâh Swt. merupakan makna dari kata '*asâ*' ini yang berarti semoga atau mudah-mudahan.<sup>155</sup>

Sekalipun diartikan sebagai semoga atau mudah-mudahan yang berimbas pada kekhawatiran jiwa muslim antara harapan dan cemas taubatnya diterima atau tidak diterima oleh Allâh Swt., tetapi kepastian taubatnya diterima dan diampuni dosanya merupakan janji-Nya (sebagaimana pernyataan-Nya yang lain dalam Alquran surat 'Alî 'Imrân surat 194 yang menyatakan bahwa Dia tidak pernah mengingkari janjinya, termasuk apabila manusia meminta ampun dari dosa-dosanya).

Selanjutnya, setelah bertaubat dari dosa-dosa, manusia itu diberi kesempatan untuk mengubah perilakunya kembali ke arah yang lebih baik dengan cara mengimbangi dan memperbanyak melakukan perbuatan-perbuatan dengan nuansa '*ibâdah*' yang signifikan. Oleh karena itu, wajar kiranya kenyataan itu dapat diterapkan dalam bentuk hukuman *ta'zîr*. Pelakunya yang telah bertaubat dengan sebenar-benarnya dapat dibebaskan dari hukuman *ta'zîr* dan dapat diberi kesempatan untuk mengubah perlakunya ke arah yang lebih baik.

Taubat dalam *ta'zîr* juga bermakna supaya pelaku kejahatan menyesali, berniat menjauhi, dan berjanji tidak mengulangi kembali kejahatannya jika bersangkut-paut dengan hak Allâh. Jika bersangkut-paut dengan hak *adamî*, maka secara nyata ter hukum harus dapat keluar atau menjauhi faktor-faktor yang dapat mengundang kejahatannya dan terlihat dari ini dapat dilihat pada tanda-tanda awalnya yaitu terjadinya perubahan tingkah-lakunya.<sup>156</sup>



Namun, timbul suatu pertanyaan apakah taubat dapat menggugurkan hukuman *ta'zîr* ? Hal ini dapat dijawab dari dua sisi, yaitu:

1. Jika taubat yang dilakukan berkenaan dengan kejahatan *hudûd*, maka taubat tidak menjadi alasan hukuman dapat dihapuskan. Hal ini dapat dilihat pada kasus sebagaimana hadis di bawah ini:

و حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَحَتَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولًا فَكُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقْتُهُ الْحِجَارَةَ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلٌ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ

وَايَةِ

Art  
dari ora  
beliau, Y  
berpalin  
berkata  
saw. ber  
berlangs  
Rasûlull  
Lelaki it  
pernah k  
'Pergilah  
kanlah k  
'Aku ora  
Ketika d  
menaha  
(H.R. S

Lel  
Penulis  
keingin  
kata lai  
nya, tet  
muhsan  
ruang li  
memba  
Allâh S  
itu berl

Ha  
hadis d

مُحَمَّدُ

شَيْخُ بْنُ

أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ رِوَايَةِ  
عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya: "Dari Abû Hurairah bahwasanya ia berkata, 'Seorang lelaki dari orang-orang muslim menemui Rasûlullâh saw. di masjid dan memanggil beliau, 'Ya, Rasûlullâh! Sesungguhnya aku telah berzina!'. Rasûlullâh saw. berpaling dan menghindari dari bertemu wajah dengannya. Lelaki itu berkata lagi, 'Ya Rasûlullâh! Sesungguhnya aku telah berzina!' Rasûlullâh saw. berpaling untuk kedua kalinya sampai empat kali (kejadian tersebut berlangsung). Ketika lelaki itu mengakui perziniaannya sampai empat kali, Rasûlullâh saw. memanggilnya dan berkata, 'Apakah engkau orang gila?'. Lelaki itu menjawab, 'Tidak!'. Rasûlullâh saw. bertanya lagi, 'Apakah engkau pernah kawin?'. Lelaki itu menjawab, 'Benar!'. Lalu, Rasûlullâh saw. berkata, 'Pergilah kalian dengannya dan rajam dia!'. Ibnu Syihâb berkata, 'Beritahukanlah kepadaku orang yang mendengar Jâbir ibn 'Abdillâh yang berkata, 'Aku orang yang termasuk merajamnya. Kami merajamnya di musallâ. Ketika dilempari dengan batu, lelaki itu melarikan diri karena tidak mampu menahan siksaan tersebut. Lalu, kami (tangkap dia dan) rajam dia kembali". (H.R. Shahih Muslim Kitab al-Hudud no. 3202).<sup>157</sup>

Lelaki yang mengaku telah berzina tersebut adalah Mâ'iz bin Mâlik.<sup>158</sup> Penulis dapat menebak bahwa pengakuannya tersebut merupakan keinginannya agar dirinya dapat dibersihkan dari dosanya itu. Dengan kata lain, Mâ'iz telah bertaubat dari perbuatan zina yang telah dilakukannya, tetapi ia tetap harus dihukum rajam (hukuman mati) karena seorang muhsan (orang yang telah pernah menikah). Perbuatan zina termasuk ruang lingkup hudûd dan Rasûlullâh saw. sendiri tidak berwenang untuk membatalkan hukuman tersebut sebab merupakan ketentuan dari Allâh Swt. Jadi, taubat tidak dapat menghapuskan hukuman jika hal itu berkenaan dengan hudûd.

Hal yang sama juga terjadi pada Al-Gâmidīyyah sebagaimana kasus hadis di bawah ini:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ ثُمَيْرٍ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ



الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ أَتَعْلَمُونَ بَعْقِلَهُ بِأَسَا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِي الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَ فِيمَا نُرَى فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بَعْقِلَهُ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ قَالَ فَجَاءَتِ الْغَامِذِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَيْتُ فَطَهَّرَنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْعَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تُرَدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تُرَدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ قَالَ اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ خُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

Artinya: "Abdullâh ibn Barîdah menceritakan kepada kami, dari ayahnya berkata, 'Al-Gâmidiyyah datang dan berkata kepada Rasûlullâh saw., 'Ya Rasûlullâh! Aku telah berzina dan ingin membersihkan diriku!'. Rasûlullâh saw. berpaling darinya. Ketika keesokan harinya ia berkata kembali, 'Ya Rasûlullâh! Mengapa engkau berpaling dariku? Semoga engkau berpaling dariku sebagaimana engkau telah pernah berpaling terhadap

Mâ'iz. L  
'Oleh k  
Ketika  
berkata  
lagi, 'Pe  
Ketika  
dan sep  
dan me  
lelaki n  
sampai  
saw. m  
mengar  
Khâlid  
kepada  
Nya, s  
bertaul  
saw. m  
(H.R S

Al  
perzin  
dan Ra  
bertau

2. Jil  
m  
ba  
at  
in  
tic  
ol  
sy  
pe  
pe  
pe  
te

*Mâ'iz. Demi Allah, Sesungguhnya aku telah hamil!'. Rasûlullâh saw. berkata, 'Oleh karena itu, pergilah dulu sampai engkau melahirkan anakmu!'. Ketika telah melahirkan seorang anak lelaki dalam selimutan kain, ia berkata, 'Inilah anak yang telah aku lahirkan!'. Rasûlullâh saw. berkata lagi, 'Pergilah dan pelihara dia sampai masa penyusuannya (penyapihan)!'. Ketika masa penyusuan, dia datang bersama dengan anak di tangannya dan sepotong roti dan berkata, 'Ya Nabi Allâh, sungguh aku telah menyusui dan memberi makan kepadanya'. Lalu, anak itu diserahkan kepada seorang lelaki muslim dan (para sahabat) diperintahkan untuk menggali tanah sampai dada dan wanita itu diperintahkan masuk ke dalamnya. Rasûlullâh saw. memerintahkan orang-orang untuk merajamnya. Khâlid ibn al-Walîd mengambil batu dan melempar kepalanya dan mengalir darah dari wajahnya. Khâlid mencaci-makinya dan Nabi Allâh saw. mendengar cacian yang ditujukan kepada wanita itu dan berkata, 'Tenang Ya Khâlid! Demi diriku di tangan-Nya, sungguh dia telah bertaubat sebenar-benarnya seandainya seorang bertaubat dengan sebenarnya pasti diampuni dosanya'. Kemudian, Rasûlullâh saw. memerintahkan supaya wanita itu disalatkan dan dikebumikan". (H.R Shahih Muslim Kitab al-Hudud no. 3208).<sup>159</sup>*

Al-Gâmidīyyah juga mendapat hukuman rajam yang sama dari perzinanya. Sekalipun bermaksud membersihkan dirinya dari dosa dan *Rasûlullâh saw.* sendiri menegaskan bahwa Al-Gâmidīyyah sudah bertaubat, tetapi hukuman *hudûd* ini harus juga dijalannya.

2. Jika taubat yang dilakukan berkenaan dengan kejahatan *ta'zîr*, maka *imâm* (penguasa negara) dapat mengambil keputusan membatalkan hukuman *ta'zîr* (dengan jalan mema'afkan terpidana) ataupun tetap menjalani hukumannya (tidak mema'afkannya). Hal ini dikarenakan hukuman *ta'zîr* adalah kebijakan *imâm*. Ada atau tidaknya dan berlaku atau tidaknya hukuman *ta'zîr* sangat ditentukan oleh kebijakan *imâm* yang telah diserahkan wewenangnya oleh syara'. Penghapusan hukuman *ta'zîr* itu sendiri karena taubatnya pelaku kejahatan oleh *imâm* karena mempertimbangkan kondisi pelakunya, tujuan dari hukuman tersebut, dan lingkungan tempat pelaku menjalani hukumannya. Wewenang untuk mema'afkan tersebut dapat terlihat dalam hadis *Rasûlullâh saw.* di bawah ini:



حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرَعُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلَمْ يَرْفَعَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ وَرَوَايَةٌ وَكِيعٌ أَصَحُّ وَقَدْ رَوَى نَحْنُ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَيَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ

Artinya: 'Hindarkanlah hudud tersebut dari kaum muslimin sebagaimana kamu mampu melakukannya. Lalu, jika dia mempunyai jalan keluar, maka berilah kesempatan. Sesungguhnya Imam salah dalam memaafkan orang lain lebih baik daripada salah menghukum' (H.R. Sunan Tirmizi Kitab al-Hudud 'an Rasulillah no. 1344).

Hadis di atas mengindikasikan agar *imâm* lebih baik memberikan ma'af kepada ter hukum daripada harus salah dalam menjatuhkan hukuman. *Imâm* mempunyai wewenang untuk membatalkan hukuman atau meneruskan hukuman jika hal itu bersangkutan paut dengan *ta'zîr*. Dengan demikian, *imâm* dapat menghindarkan terjadinya kejahatan *hudûd* di kalangan orang-orang muslim dengan seringnya melaksanakan *ta'zîr*. Bukankah, hukuman *ta'zîr* merupakan tindakan dini untuk menghindarkan terjadinya kejahatan pada tingkat yang lebih parah yaitu *hudûd*.

Selain taubat merupakan dasar berakhirnya hukuman *ta'zîr*, kematian

juga adalah di setiap be yang hidup ter hukumnya

Semen hukuman d penentu be kiranya, ke ta'zîr terh

juga adalah alasan yang sangat kuat berakhirnya hukuman ini (bahkan, di setiap bentuk hukuman) sebab objek manusia sebagai terhukum yang hidup sudah berakhir. Siapa lagi yang akan dihukum, sedangkan terhukumnya sendiri sudah tiada.

Sementara itu, *imâm* juga dapat mema'afkan terhukum sebelum hukuman divonis. Hal ini disebabkan *imâm* adalah penguasa *ta'zîr*, penentu berlaku atau tidaknya hukuman itu. Oleh karena itu, wajar kiranya, kema'afan dari *imâm* salah satu bentuk mengakhiri hukuman *ta'zîr* terhukum.



## Catatan:

- <sup>1</sup>Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 234.
- <sup>2</sup>M. Abdul Mujib, Et al., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 141.
- <sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 269.
- <sup>4</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994). Hal.
- <sup>5</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999). Hal 472
- <sup>6</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, Hal. 473.
- <sup>7</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, hal 55.
- <sup>8</sup>*Ibid.*, Unsur-unsur pemberontakan yang pokok adalah keluar dari imam (penguasa negara) dengan terang-terangan dan ada maksud tidak baik seperti menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau tidak mentaatinya. A. Djazuli, *Fikih Jinayah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 107 dan 110.
- <sup>9</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, hal. 55.
- <sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid ke-2, h. 393.
- <sup>11</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, hal. 156.
- <sup>12</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, hal. 157.
- <sup>13</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 320.
- <sup>14</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, hal. 692.
- <sup>15</sup>A. Djazuli, *Fikih Jinayah*, op.cit, h. 36.
- <sup>16</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, hal. 692.
- <sup>17</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, hal. 692.
- <sup>18</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, hal. 697.
- <sup>19</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, hal. 96.
- <sup>20</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, hal. 449.
- <sup>21</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Eksiklopedi*, hal. 450.
- <sup>22</sup>Shalih ibn Abd al-Aziz ibn Ibrahim Ali Mansur, *Manjif al-Islam min al-Khamar* (Kairo: Mathbah al-Madani, 1394), h. 9.
- <sup>23</sup>Barus al-Bustani, *Qatr al-Muhit* (Beirut: Sahat Riyah as-Salih, 1869). Jilid 1, h. 754.
- <sup>24</sup>Ibn Fadl Jamaluddin Muhammad bin Muharram bin Manzur al-Afriqi, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Sadar, tth.), Jilid 4, h. 256.
- <sup>25</sup>Muhammad ar-Razi Fakhruddin bin Alamah Diyauddin 'Umar, *Tafsir al-Fakhruddin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Jilid 11, h. 84.
- <sup>26</sup>Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah 'an as-Syari'ah 'an al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Jilid 7, h. 37.
- <sup>27</sup>Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahli 'an Alquran* (Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1952), Jilid 3, h. 51.
- <sup>28</sup>Sa'id Muhammad Hasan at-Tabataba'i, *Al-Mizan fi Tafsir Alquran* (Qum al-Mufardasah: jama'aj al-madrasiyin fi Hamzah, tth.), Juz 5, h. 15.
- <sup>29</sup>Al-Qurtubi, *Al-jami'*, 295.
- <sup>30</sup>Sunan an-Nasa'I, h. 294.
- <sup>31</sup>*Ibid.*, h. 295.

<sup>32</sup>Muha  
al-'Arabiyah  
<sup>33</sup> Add  
(Kairo: Al-F  
<sup>34</sup> Muh  
<sup>35</sup> Muh  
<sup>36</sup> Mans  
(Beirut: Dâr  
<sup>37</sup> Khali  
al-Fikr, 199  
<sup>38</sup> Mans  
op.cit., h. 5  
<sup>39</sup> Muha  
(tt.: Dâr as-  
<sup>40</sup> Burh  
*Usûl al-Aqd*  
Juz 2, h. 21  
<sup>41</sup> Abû M  
li ibn Qudâ  
<sup>42</sup> Muha  
*Usûluh* (Be  
<sup>43</sup> Abdul  
Ichtiar Baru  
<sup>44</sup> Abû I  
Dâr al-Fikr,  
<sup>45</sup> Abû 'I  
*Majâh* (Ind  
<sup>46</sup> Ahma  
Kutub al-'Il  
<sup>47</sup> Abû 'A  
(Beirut: Dâr  
<sup>48</sup> Abû 'A  
*Majâh*, op.ci  
<sup>49</sup> Yahya  
*Muslim bi S*  
<sup>50</sup> Ahma  
(Kairo: Dâr  
<sup>51</sup> Badr a  
*Sahîh al-Buk*  
<sup>52</sup> Abû B  
fi al-Ahâdis  
<sup>53</sup> *Ibid.*,  
<sup>54</sup> Ahma  
op.cit., Juz 1  
<sup>55</sup> Abû D  
Juz 2, h. 36  
<sup>56</sup> Abû 'A  
*Mâjah*, op.ci



- <sup>32</sup>Muhammad Ahmad Farj as-Sanhiriyy, *al-Muskilat* (Mesir: Dar an-Nahdah al-‘Arabiyah, 1978), h. 101 dan 102.
- <sup>33</sup>Adb al-Fath Muhammad Abu al-Ayanin, *‘Uqubah as-Sirqah Fiqh al-Islam* (Kairo: Al-Farmawi, 1983), h. 21.
- <sup>34</sup>Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi*, hal. 548.
- <sup>35</sup>Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi*, hal. 548.
- <sup>36</sup>Mansûr ibn Yûnus al-Bahûtî, *Ar-Raud al-Murbi’ bi Syarh Zâd al-Mustaqni’* (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1996), h. 511.
- <sup>37</sup>Khalîl al-Mais, *Murqâh al-Mafâtîh Syarh Misykâh al-Masâbîh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), Juz 7, h. 220.
- <sup>38</sup>Mansûr ibn Yûnus al-Bahûtî, *Ar-Raud al-Murbi’ bi Syarh Zad al-Mustaqni’*, op.cit., h. 512.
- <sup>39</sup>Muhammad ‘Abdullâh al-Jardânî, *Fath al-‘Allâm bi Syarh Mursyid al-Anâm* (tt.: Dâr as-Salâm, 1990), Juz 4, h. 543.
- <sup>40</sup>Burhân ad-Dîn Abû ar-Rifâ’ Ibrâhîm ibn Farhûn, *Tabsirah al-Hukkâm fî Usûl al-Aqdiyah wa Manâhij al-Ahkâm* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), Juz 2, h. 217.
- <sup>41</sup>Abû Muhammad ‘Abdullâh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudâmah, *Al-Mugni li ibn Qudâmah* (Riyâd: Maktabah ar-Riyâd al-Hadîsah, tth.), Juz 8, h. 324.
- <sup>42</sup>Muhammad Fathî ad-Durainî, *Buhûû Muqâranah fî al-Fiqh al-Islâmî wa Usûluh* (Beirut: Mu’assasah ar-Risâlah, 1994), Juz 2, h. 85.
- <sup>43</sup>Abdul Azis Dahlan, (ed.), “Jarimah”, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid 3, h. 807.
- <sup>44</sup>Abû Dâud Sulaimân ibn al-Asy’ab as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâud* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), Juz 2, h. 368.
- <sup>45</sup>Abû ‘Abdillâh Muhammad ibn Yâzid al-Qazwinî ibn Mâjah, *Sunan Ibnu Majâh* (Indonesia: Maktabah Dahlân, tth.), Juz 2, h. 867.
- <sup>46</sup>Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), Juz 3, h. 567.
- <sup>47</sup>Abû ‘Abd ar-Rahmân Ahmad ibn Syu’aib an-Nasâ’î, *Kitâb as-Sunan al-Kubrâ* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), Juz 4, h. 320.
- <sup>48</sup>Abû ‘Abdillâh Muhammad ibn Yâzid al-Qazwinî ibn Mâjah, *Sunan Ibnu Majâh*, op.cit., Juz 2, h. 867—868.
- <sup>49</sup>Yahyâ ibn Syarf ibn Mûrî Hasan ibn Husain ibn Hazm an-Nawawî, *Sahîh Muslim bi Syarh an-Nawawî* (Kairo: Dâr asy-Sya’b, tth.), Juz 4, h. 295.
- <sup>50</sup>Ahmad ibn ‘Alî ibn Hajar al-‘Asqalânî, *Fath al-Bârî bi Syarh Sahîh al-Bukhârî* (Kairo: Dâr al-Adyân li Turâs, 1987), Juz 12, h. 140.
- <sup>51</sup>Badr ad-Dîn Citin Ar, *Mausû’ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syurûhuha, Sahîh al-Bukhârî Juz 7-8* (Istanbul: Cagri Yayinlari, 1992), Juz 3, h. 28.
- <sup>52</sup>Abû Bakr ‘Abdullâh ibn Muhammad ibn Abî Syaibah, *Al-Kitâb al-Musannaf fî al-Ahâdîs wa al-Asâr* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), Juz 5, h. 536.
- <sup>53</sup>*Ibid.*, h. 537.
- <sup>54</sup>Ahmad ibn ‘Alî ibn Hajar al-‘Asqalânî, *Fath al-Bârî bi Syarh Sahîh al-Bukhârî* op.cit., Juz 12, h. 165.
- <sup>55</sup>Abû Dâud Sulaimân ibn al-Asy’ab as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâud*, op.cit., Juz 2, h. 368.
- <sup>56</sup>Abû ‘Abdillâh Muhammad ibn Yâzid al-Qazwinî ibn Mâjah, *Sunan Ibnu Majâh*, op.cit., Juz 2, h. 857—858.



<sup>57</sup>Muhammad 'Abdullâh al-Jardânî, *Fath al-Allâm bi Syarh Mursyid al-Anâm*, op.cit., Juz 4, h. 546.

<sup>58</sup>Muhammad Fathî ad-Durainî, *Buhûû Muqâranân fî al-Fiqh al-Islâmî wa Usûluh*, op.cit., Juz 2, h. 90—91.

<sup>59</sup>Abû Muhammad 'Abdullâh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudâmah, *Al-Mugnî li ibn Qudâmah*, op.cit., Juz 8, h. 326.

<sup>60</sup>Syams ad-Dîn ibn Qayyim al-Jauziyah, *'Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abû Dâud* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Jilid 6/12, h. 131.

<sup>61</sup>Ahmad ibn 'Alî ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî bi Syarh Sahîh al-Bukhârî*, op.cit., Juz 12, h. 66.

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 67.

<sup>63</sup>Abû Dâud Sulaimân ibn al-Asy'ab as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâud*, op.cit., Juz 2, h. 364.

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 365.

<sup>65</sup>Muhammad Fathî ad-Durainî, *Buhûû Muqâranân fî al-Fiqh al-Islâmî wa Usûluh*, op.cit., Juz 2, h. 92.

<sup>66</sup>Muhammad 'Abdullâh al-Jardânî, *Fath al-Allâm bi Syarh Mursyid al-Anâm*, op.cit., Juz 4, h. 543.

<sup>67</sup>Abû Bakr Jâbir al-Jazâ'irî, *Al-Minhâj al-Muslim* (Jeddah: Dâr asy-Syurûq, 1987), h. 682.

<sup>68</sup>Abû Muhammad 'Abdullâh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudâmah, *Al-Mugnî li ibn Qudâmah*, op.cit., Juz 8, h. 326.

<sup>69</sup>Syahâb ad-Dîn Ahmad ibn Hajar al-Hainâmî, *Hawâsyî Syekh 'Abd al-Hamîd asy-Syarwânî wa Syekh Ahmad ibn Qasîm al-'Âbadî 'alâ Tuhfah li al-Muhtâj Syarh al-Minhâj* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), Juz 9, h.211 – 212.

<sup>70</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 227.

<sup>71</sup>Burhân ad-Dîn Abû ar-Rifâ' Ibrâhîm ibn Farhûn, *Tabsirah al-Hukkâm fî Usûl al-Aqdiyah wa Manâhij al-Ahkâm*, op.cit., h. 219.

<sup>72</sup>Abû Muhammad Abî ibn Ahmad ibn Sa'îd ibn Hazm, *Al-Muhallâ* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth.), Juz 12, h. 321.

<sup>73</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 26.

<sup>74</sup>Abd al-Karîm Zaidân, *Al-Wajîz fî Usûl al-Fiqh* (Bagdad: Dâr at-Tauzî' wa an-Nasyr al-Islâmiyyah, 1993), h. 236.

<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 27.

<sup>76</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 225.

<sup>77</sup>Syams ad-Dîn ibn Qayyim al-Jauziyah, *'Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abû Dâud*, op.cit., Juz 6/12, h. 130.

<sup>78</sup>Muhammad Fathî ad-Durainî, *Buhûû Muqâranah fî al-Fiqh al-Islâmî wa Usûluh*, op.cit., h. 89.

<sup>79</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, op. cit., h.186.

<sup>80</sup>Muhammad Salîm al-Awwâ, *Fî Usûl an-Nizâm al-Janâ'î al-Islâm* (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1983), h. 285.

<sup>81</sup>Abdul Azis Dahlan (ed.), "Jarimah Ta'zîr", *Ensiklopedi Hukum Islam*, op.cit., Juz 3, h. 803.

<sup>82</sup>Ahm  
(Kairo: Dâ

<sup>83</sup>Abd  
al-'Arabî, 1

<sup>84</sup>Muh  
(Beirut: Dâ

<sup>85</sup>Ibrâh

<sup>86</sup>Abd

<sup>87</sup>Alî

Fikr, 1994

<sup>88</sup>Dew

Baru van

<sup>89</sup>Wah

1989), Juz

<sup>90</sup>Râsy

al-Misriyya

<sup>91</sup>Abd

1980), h.

<sup>92</sup>Will

Britain, N

<sup>93</sup>Mul

<sup>94</sup>Mul

Nasr (Pak

<sup>95</sup>Sye

<sup>96</sup>Mu

(Jakarta:

<sup>97</sup>Har

1984), Jil

<sup>98</sup>Ba

1, h. 36.

<sup>99</sup>Ma

h. 556.

<sup>100</sup>A

1967), h

<sup>101</sup>H

Baru van

<sup>102</sup>T

Nasional

<sup>103</sup>H

<sup>104</sup>B

Insani P

<sup>105</sup>M

dan tant

<sup>106</sup>M

Konsep-k

<sup>107</sup>A

Sultaniyy

<sup>108</sup>V

- <sup>82</sup>Ahmad Fathî al-Bahnîsî, *As-Siyâsah al-Janâ'iyah fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Kairo: Dâr al-'Urûbah, 1965), h. 518.
- <sup>83</sup>Abd al-Azîz 'Amîr, *At-Ta'zîr fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (tt.: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1976), h. 293.
- <sup>84</sup>Muhammad ibn Abî Bakr ibn 'Abd al-Qadr ar-Râzî, *Mukhtâr as-Sahâh* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 226.
- <sup>85</sup>Ibrâhîm Anîs, *Al-Mu'jam al-Wasît* (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1973), h. 598.
- <sup>86</sup>Abd al-'Azîz 'Amîr, *At-Ta'zîr fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, op.cit., h. 292.
- <sup>87</sup>Alî Ahmad al-Jarjawî, *Hikmah at-Tasyrî' wa Falsafatuh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), Juz 2, h. 198.
- <sup>88</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Imam", *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), Jilid 3, h. 205.
- <sup>89</sup>Wahbah az-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* (Damsyîq: Dâr al-Fikr, 1989), Juz 2, h. 173.
- <sup>90</sup>Râsyid Ridâ, *Al-Khilâfah al-Imâmah al-'Uzmâ'* (Kairo: Matba'ah al-Manâr al-Misriyyah, 1341 H), h. 27.
- <sup>91</sup>Abd ar-Rahmân ibn Khaldûn, *Muqaddimah ibn Khaldûn* (Magribî: Dâr al-Fikr, 1980), h. 19.
- <sup>92</sup>William C. Chittick, *A Shiite Anthology* (London: Muhammad Trust of Griat Britain, Northern Ireland, 1980), h. 6.
- <sup>93</sup>Muhammad Qutb, *Islâm wa Daulah* (Araman: tnp., 1982), h. 208.
- <sup>94</sup>Muhammad Husayn Tabattaba'i, *Shi'ite Islam; Translated by Sayyid Husayn Nasr* (Pakistan: Shi'a Institute of Pakistan, tth.), h. 210.
- <sup>95</sup>Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam* (Delhi: Idarah al-Adabiyah, 1978), h. 323.
- <sup>96</sup>Muslim Fathoni, *Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 38.
- <sup>97</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1984), Jilid 1, h. 102.
- <sup>98</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), Bagian 1, h. 36.
- <sup>99</sup>Mahmûd Syaltût, *Al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah* (tt.: Dâr al-Qalam, 1966), h. 556.
- <sup>100</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Ibntang, 1967), h. 10.
- <sup>101</sup>Hasan Shadily, (ed.), "Arab Saudi", *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1992), Jilid 1, h. 253.
- <sup>102</sup>Tim Redaksi Ensiklopedi Nasional Indonesia, "Pakistan", *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: Delta Pamungkas, 1997), Jilid 12, h. 39.
- <sup>103</sup>Hasan Shadily, (ed.), "Indonesia", *Ensiklopedi Indonesia*, op.cit., h. 74.
- <sup>104</sup>Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 57.
- <sup>105</sup>Muhammad Amin Suma, et.al., *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek, dan tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 218.
- <sup>106</sup>M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Alquran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 465.
- <sup>107</sup>Abû al-Hasan 'Alî ibn Muhammad ibn Habîb al-Mawardî, *Al-Ahkâm as-Sultaniyyah wa al-Wilâyah ad-Dîniyyah* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), h. 6.
- <sup>108</sup>Wahbah az-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, op.cit., h. 173.



<sup>109</sup>Abû al-Hasan 'Alî ibn Ismâ'îl al-Asy'arî, *Maqâlât al-Islâmiyyîn wa ikhtilâf al-Musallîn* (Mesir: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1969), Juz 2, h. 151.

<sup>110</sup>Muhammad Rawwâs Qal'ahjih, *Mausû'ah Fiqh 'Umar ibn al-Khattâb Radiyallâh 'anh* (tt.: tpn., 1981), h. 99.

<sup>111</sup>Muhammad Idrîs asy-Syâfi', *Ar-Risâlah* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1309 H), h.79.

<sup>112</sup>*Ibid.*, h. 71.

<sup>113</sup>Abû Ja'far Muhammad ibn Jarîr at-Tabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl ayy al-Qurân*, op.cit., Juz 4, h. 151.

<sup>114</sup>Sidiqî Muhammad Jamîl, *Hâsiyyah as-Sâwî 'an Tafsîr al-Jalâlain* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2002), Juz 1, h. 299.

<sup>115</sup>Ahmad Mustafâ al-Marâgî, *Tafsîr al-Marâgî* (Beirut: Dâr al-Fikr, tth.), Juz 2, h. 72.

<sup>116</sup>Abû Ja'far Muhammad ibn Jarîr at-Tabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl ayy al-Qurân*, op.cit., Jilid 4, h. 335.

<sup>117</sup>Sidiqî Muhammad Jamîl, *Hâsiyyah as-Sâwî 'an Tafsîr al-Jalâlain*, op.cit., Juz 1, h. 336.

<sup>118</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, op.cit., h. 9.

<sup>119</sup>Sa'id Hawwâ, *Al-Islâm* (Azhar: Dâr as-Salâm, 1993), h. 629.

<sup>120</sup>Abd al-Qâdir al-'Audah, *At-Tasyrî' al-Janâ'î al-Islâmî*, op.cit., Juz 1, h. 81.

<sup>121</sup>Abû Muhammad 'Abdullâh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudâmah, *Al-Mugnî li ibn Qudâmah*, op.cit., Juz 7, h. 833.

<sup>122</sup>Nasr ibn 'Aqîl ibn Jâr at-Tarîfî, *Al-Qadâ' fî 'Ahdi 'Umar ibn al-Khattâb*, (Riyâd: tpn., 1405 H), h. 534.

<sup>123</sup>Muhammad Salâm Madkûr, *Al-Qadâ' fî Al-Islâm* (Kairo: Dâr an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1964), h. 37.

<sup>124</sup>Nasr ibn 'Aqîl ibn Jâr at-Tarîfî, *Al-Qadâ' fî 'Ahdi 'Umar ibn al-Khattâb*, op.cit., h. 204.

<sup>125</sup>Abû Dâud Sulaimân ibn al-Asy'ab as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâud*, op.cit., Juz 2, h. 164.

<sup>126</sup>Abdul Azis Dahlan (ed.), "Maksiat", *Ensiklopedi Hukum Islam*, op.cit., Jilid 3, h. 1088.

<sup>127</sup>Abd al-Qâdir al-'Audah, *At-Tasyrî' al-Janâ'î al-Islâmî*, op.cit., h. 66.

<sup>128</sup>Abd al-Azîz 'Amîr, *At-Ta'zîr fî asy-Syari'ah al-Islâmiyyah*, op.cit., h. 83.

<sup>129</sup>Muhammad Rawwâs Qal'ahjih, *Mausû'ah Fiqh 'Umar ibn al-Khattâb Radiyallâh 'anh*, op.cit., h. 491.

<sup>130</sup>Mahmûd ibn 'Alî asy-Syaukânî, *Kitâb as-Sail al-Jarâr al-Mutadâfiq 'alâ Hadâ'iq al-Azhâr* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth.), Juz 4, h. 376.

<sup>131</sup>Muhammad Fathî ad-Durainî, *Buhûs Muqarânah fî al-Fiqh al-Islâmî wa Usûluh*, Juz 2, op.cit., h. 86.

<sup>132</sup>Abd ar-Rahîm Sidiqî, *Al-Jarîmah wa al-'Uqûbah fî asy-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1987), h. 211.

<sup>133</sup>Abd al-Qâdir al-'Audah, *At-Tasyrî' al-Janâ'î al-Islâmî*, op.cit., Jilid 1, h. 128.

<sup>134</sup>Muhammad Salîm al-Awwâ, *Fî Usûl an-Nizâm al-Janâ'î al-Islâm*, op.cit., h. 294.

<sup>135</sup>Mahmûd ibn 'Alî asy-Syaukânî, *Kitâb as-Sail al-Jarâr al-Mutadâfiq 'alâ Hadâ'iq al-Azhâr*, op.cit., h. 375.

<sup>136</sup>Ibnu 'Imâd al-Aqfahî, *Al-Irsyâd ilâ mâ Waqa'a fî al-Fiqh wa Gairihi min al-A'dâd* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), Jilid 2, h. 213.

- <sup>137</sup>Muhammad Salīm al-Awwā, *Fī Usūl an-Nizām al-Janā'ī al-Islām*, op.cit., h. 285.
- <sup>138</sup>Muhammad Rawwās Qal'ahjih, *Mausū'ah Fiqh 'Umar ibn al-Khattāb Radiyallāh 'anh*, op. cit., h. 183.
- <sup>139</sup>'Abd al-'Azīz 'Amīr, *At-Ta'zīr fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, op.cit., h. 205.
- <sup>140</sup>*Ibid.*, h. 53.
- <sup>141</sup>Alī Ahmad an-Nadwī, *Al-Qawā'id al-Fiqiyyah* (Damsyiq: Dār al-Qalam, 1994), h. 94.
- <sup>142</sup>'Abd al-Qādir al-'Audah, *At-Tasyrī' al-Janā'ī al-Islāmī*, op.cit., Jilid 1, h. 148.
- <sup>143</sup>Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, op.cit., Juz 5, h. 205.
- <sup>144</sup>Atiyyah Musyarafah, *Al-Qādī fī Islāmī* (tt.: Syarākāh asy-Syarīq al-Ausāt, 1966), h. 149.
- <sup>145</sup>Burhān ad-Dīn 'Alī ibn Abī Bakr al-Marginānī, *Syarah Fath al-Qādir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), Juz 5, h. 332.
- <sup>146</sup>Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān ibn Abī Bakr as-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir fī al-Furū'* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 275.
- <sup>147</sup>'Abd al-'Azīz 'Amīr, *At-Ta'zīr fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, op.cit., h. 333.
- <sup>148</sup>Zain al-'Ābidīn ibn Ibrāhīm ibn Najīm, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir 'alā Mazhab Abī Hanīfah an-Nu'mān* (Kairo: Mu'assasah al-Halbī wa Syurākāh li an-Nasr wa at-Tauzī', 1968), h. 188.
- <sup>149</sup>Burhān ad-Dīn Abī ar-Rifā' Ibrāhīm ibn Farhūn, *Tabsirah al-Hukkām fī Usūl al-Aqdiyah wa Mandhij al-Ahkām*, op.cit., Juz 2, h. 222.
- <sup>150</sup>'Abd al-'Azīz 'Amīr, *At-Ta'zīr fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, op.cit., h. 522.
- <sup>151</sup>Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr at-Tabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ayy al-Qurān*, op.cit., Juz 12, h. 158.
- <sup>152</sup>Syahāb ad-Dīn as-Sa'īd Mahmūd al-Alūsī, *Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīral-Qurān al-'Azīm wa as-Sabā' al-Masānī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), Juz 14, h. 353.
- <sup>153</sup>Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī, *At-Tafsīr al-Kabīr au Mafātīh al-Gaib* (Beirut: Dār al-Kutub, 1990), Jilid 30, h. 42.
- <sup>154</sup>Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr at-Tabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ayy al-Qurān*, op.cit., h. 159.
- <sup>155</sup>Ahmad Mustafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī* (Beirut: Dār al-Fikr, tth.), Jilid 10, h. 164.
- <sup>156</sup>'Abd al-'Azīz 'Amīr, *At-Ta'zīr fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, op.cit., h. 379.
- <sup>157</sup>Muslim ibn al-Hujāj ibn Muslim al-Qusyairī an-Naisabūri, *Sahīh Muslim bi Syarh an-Nawawī* (Kairo: Dār asy-Sya'b, tth.), Juz 4, h. 269.
- <sup>158</sup>Ahmad ibn 'Alī bin Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarh Sahīh al-Bukhārī* (Kairo: Dār al-Adyān li Turās, 1987), Juz 12, h. 138.
- <sup>159</sup>Muslim ibn al-Hujāj ibn Muslim al-Qusyairī an-Naisabūri, *Sahīh Muslim bi Syarh an-Nawawī*, op.cit., Juz 4, h. 296.



# BAB V I

## FIKIH SIYASAH

### A. Pengertian, Dalil Hukum, dan Ruang Lingkup

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah dapat juga diartikan sebagai pemerintahan dan politik, atau membuat kebijakan. Fikih *siyasah* atau *siyasah syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari *hal ihwal* dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran atau *ruh syariat* untuk mewujudkan ke-maslahat-an umat. Dengan kata lain, fikih *siyasah* adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam dikelompokkan ke dalam pranata sosial Islam.<sup>1</sup>

Beberapa ulama memberikan pengertiannya masing-masing tentang *siyasah syar'iyah* ini sebagai berikut:

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf, '*Keputusan dan langkah kebijakan yang diambil oleh pemimpin dan ulil amri dalam permasalahan yang tidak diatur secara spesifik oleh syariat*'.
2. Ibu Qayyim berpendapat bahwa *siyasah syar'iyah* tidak harus berarti sesuai dengan ketentuan eksplisit syariat. Setiap langkah yang secara aktual membawa manusia dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan merupakan bagian dari *siyasah* yang adil walaupun hal itu tidak disuruh langsung oleh Nabi saw. dan tidak diatur wahyu. Siapapun yang mengatakan bahwa tidak ada *siyasah syar'iyah* dalam kasus yang diatur secara eksplisit oleh syariat adalah keliru dalam memahami para sahabat.
3. Menurut Ibnu Khaldun, '*Khalifah adalah wakil dari pemilik syari'ah (Rasulullah saw) dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. Kedudukan ini disebut dengan khilafah atau imamah dan orang yang melaksanakannya adalah khalifah atau imam*'.<sup>2</sup>

4. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *'Khilafah atau imamah atau imarah al-Mukminin adalah sistem berdasarkan musyawarah yang menghimpun kemaslahatan dunia dan akhirat yang semuanya mempunyai pengertian yang sama'*.<sup>3</sup>

Berdasarkan pemikiran keempat tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah:

1. Keputusan dan langkah kebijakan dari pemimpin pemerintahan/negara.
2. Kebijakan yang ditempuh harus pada prinsip musyawarah (*syura*).
3. Pemimpin negara tersebut mengemban amanah untuk mengatur kemaslahatan hidup dunia dan akhirat dari umat yang bertujuan membawa manusia dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan.

*Siyasah Syar'iyah* atau *fikih siyasah* ini bertugas mempelajari segala persoalan yang berkaitan erat dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. *Fikih siyasah* ini juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan menurut Islam. Kondisi ini memerlukan pelacakan terhadap segala fakta, data, peristiwa dan fenomena-fenomena historis dari segala sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran syariat yang memengaruhinya yang disertai dengan apresiasi dan analisis yang mendalam.<sup>4</sup>

*Fikih siyasah* merupakan bagian dari keputusan politik. Keputusan itu antara lain berisi ketentuan tentang pertanyaan; Siapakah yang menjadi sumber kekuasaan? Siapa pelaksananya? Apa dasar dan bagaimana cara ia melaksanakan kekuasaan itu? Dan kepada siapa kekuasaan tersebut dipertanggung-jawabkan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dilakukan di dalam tulisan ini karena keterbatasan ruang dan kajiannya. Penulis menyilahkan pembaca untuk mereferensi buku-buku tentang Politik Islam yang sudah banyak beredar di toko buku dan perpustakaan.

Memang, dalam Alquran dan hadis tidak ditemukan secara terperinci tentang keharusan mendirikan suatu negara atau bentuk negara. Namun, hanya dikemukakan beberapa prinsip umum saja sebagai landasan dalam bermasyarakat dan bernegara:



1. Dalam Alquran ditemukan, antara lain berbunyi sebagai berikut:
  - a. Allah Swt. menciptakan manusia sebagai pemimpin (*khalifah*) untuk mengatur dan mengendalikan alam seperti;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: 'Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah: 30).

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٠٧﴾

Artinya: 'Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku.

dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik (Q.S An-Nur: 55).

أَمِنْ تُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: 'Atau siapakah yang memperkenalkan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi ? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya) (Q.S. An-Naml: 62).

- b. Kewajiban menegakkan hukum dan keadilan terhadap siapa pun berbunyi sebagai berikut;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: 'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat' (Q.S. An-Nisa': 58).

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنِ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴾

Artinya: 'Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat' (Q.S. An-Nisa': 105).

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ



أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: 'Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (Q.S. An-Nisa': 135).

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٦﴾

Artinya: 'Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal' (Q.S. Al-Hujurat: 13).

- c. Kewajiban mentaati pemimpin demi menjaga persatuan dan kesatuan umat seperti;

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٣٧﴾

Artinya: 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar

kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya' (Q.S.Ali Imran:118).

- d. Ajakan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama yang berbunyi;

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا  
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ  
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٦٩﴾

Artinya: 'Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya' (Q.S. Ali Imran: 159).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: 'Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka' (Q.S. 42: 38).

- e. Persamaan dan rasa tolong-menolong antara satu dengan yang lain berbunyi sebagai berikut;

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا



زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: 'Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu' (Q.S. An-Nisa': 1).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



Artinya: 'Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat' (Q.S.:Al-Hujurat: 10).

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقُلْتَبَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

Artinya: 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan

janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya' (Q.S.Al-Maidah: 2).

- f. Membela negara melalui peperangan atau berupaya mewujudkan persamaan dengan dunia internasional dan dalam negeri sendiri yang berbunyi;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ

Artinya: 'Hai orang-orang yang beriman, Apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit. 39. jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu' (Q.S. At-Taubah: 38-39).

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۚ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ



إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَتِّلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَتَلُوكُمْ ۚ فَإِنْ آعَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَتِّلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

Artinya: 'Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong (mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemukannya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong, 90. kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada Perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu Maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka' (Q.S. An-Nisa': 89-90).

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَتِّلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوهُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩١﴾

Artinya: 'Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil' (Q.S. 60: 8).

- g. Urusan perekonomian, administrasi, dan perdagangan yang berbunyi sebagai berikut;

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رِّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ

كُرُوهُ كَمَا

Artinya:  
hasil per  
dari Ar  
dzikir  
Nya ke  
Termasu

يَتَخَبَّطُهُ  
أَ وَأَحَلَّ  
فَلَمْ مَا  
هُمْ فِيهَا

Arti  
dapat b  
syaitan  
demikian  
Sesung  
mengh  
yang te  
berhem  
diambi  
(terser  
Maka  
di dal

مِّنَ إِلَهِ  
رَّانَ

مَنْ عَرَفْتِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: 'Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat' (Q.S. Al-Baqarah: 198).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: 'Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya' (Q.S. Al-Baqarah: 275).

وَالِإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُورِمَ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ



وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا  
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: 'Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-  
yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah  
Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya  
telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka  
sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu  
kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya,  
dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah  
Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika  
betul-betul kamu orang-orang yang beriman" (Q.S. Al-A'raf: 85).

- h. Hak azasi manusia yang mencakup hak untuk hidup, pemilikan  
harta, dan kebebasan beragama dan berserikat seperti;

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: 'Dan mereka berkata: "Hati Kami tertutup". tetapi  
sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka;  
Maka sedikit sekali mereka yang beriman' (Q.S. Al-Baqarah: 88).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَتْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling  
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan  
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara  
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya  
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu' (Q.S. An-Nisa': 29).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَلُّوْا اِلَى اللّٰهِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّ  
اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٠﴾

Arti

dikarun

sebah

dari po

ada bai

kepada

menget

فَرَقَ عِلْمِ

كَانُوا

Arti

yang m

Allah

Kami

kemud

memb

(Q.S.

Kemudia

kondisi ini, a

a. Kebutuha

terhadap

dan raky

Hadis Ras

sebagai

1. Jika

seora

عَنْ أَبِي

ثَلَاثَةً

Artinya: 'Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu' (Q.S.An-Nisa': 32).

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

Artinya: 'Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan' (Q.S. Al-An'am: 108).

Kemudian, hadis Rasulullah saw. juga mengemukakan tentang kondisi ini, antara lain;

- a. Kebutuhan terhadap seorang pemimpin, tanggungjawab pemimpin terhadap rakyatnya serta hubungan timbal-balik antara pemimpin dan rakyat atas dasar saling mencintai.

Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id r.a berbunyi sebagai berikut;

1. Jika ada tiga orang di antaramu, maka tunjukkanlah salah seorang menjadi pemimpin;

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَوْمَهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَوُهُمْ



Artinya: 'Jika ada tiga orang, maka pilihlah salah seorang menjadi pemimpin dan orang yang lebih berhak menjadi pemimpin adalah yang lebih bagus bacaannya' (H.R. Sunan an-Nasa'i Kitab al-Imamah no. 774).

2. Masing-masing kita adalah pemimpin dan masing-masing pemimpin itu bertanggung-jawab terhadap apa-apa yang dipimpinnya.

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمَعَ وَرُزَيْقُ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُزَيْقُ يَوْمِئِذٍ عَلَى أَيْلَةٍ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمَعَ يُخْبِرُهُ أَنْ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: 'Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Imam adalah pemimpin dan ditanyai tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Dan seorang isteri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Dan pelayan adalah pemimpin dalam harta majikannya dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya' (H.R. Shahih Bukhari Kitab al-Jum'ah no. 844).

3. Wajib untuk mentaati pemimpin, kecuali untuk tujuan maksiat.

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ  
الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ  
النَّارَ إِلَّا شَقِيٌّ قِيلَ وَمَنْ الشَّقِيُّ قَالَ الَّذِي لَا يَعْمَلُ بِطَاعَةٍ وَلَا يَتْرُكُ لِلَّهِ  
مَعْصِيَةً

Artinya: 'Tidak masuk ke dalam Neraka kecuali orang yang celaka'. Ditanya orang, 'Dan siapa orang yang celaka itu?' Beliau bersabda, 'Orang yang tidak mengerjakan kecuali ketaatan dan tidak meninggalkan kemaksiatan kepada Allah' (H.R. Musnad Ahnaf Kitab Baqi Musnad al-Mukassirin no. 8239).

- b. Prinsip saling mencintai antar sesama sebagaimana Rasulullah saw. di bawah ini;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ  
أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ  
لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya: 'Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri' (H.R. Shahih Bukhari Kitab al-Iman no. 12).

- c. Penegakan kebaikan dan pencegahan keburukan yang terjadi di tengah-tengah umat yang berbunyi;

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ  
قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ  
خَالَفْتَ السُّنَّةَ قَالَ تَرَكْتُ مَا هُنَاكَ يَا أَبَا فَلَانٍ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ  
قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى  
مِنْكُمْ مَنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ  
وَذَلِكَ أَوْفَى الْإِيمَانِ



Artinya: 'Barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika ia tidak mampu dengan hatinya. Itulah, selema-lemah iman' (H.R. Musnad Ahmad Kitab Baqi Musnad al-Mukassirin no. 11034).

- d. Prinsip sama di depan hukum. Sebagaimana sabda Rasulullah saw di bawah ini;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: 'Apakah kamu membantu dalam had dari hudud Allah ? Kemudian, beliau berdiri dan berkhotbah, 'Sesungguhnya celakalah orang-orang sebelum kamu bahwa Jika seorang terpandang (di masyarakat) melakukan pencurian, maka hukuman ditinggalkan (ditiadakan). Namun, Apabila seorang lemah (kedudukannya) melakukan pencurian, maka dikenakan had kepadanya. Dan demi Allah, seandainya Fathimah bin Muhammad melakukan pencurian, pasti aku telah memotong tangannya' (H.R. Shahih Bukhari Kitab Ahadis al-Anbiya' no. 3216).

Termasuk dalam hal-hal mengenai prinsip menyangkut pengangkatan pejabat berdasarkan kemampuannya, bukan atas dasar keinginannya sebagaimana yang dikatakan Rasulullah saw. bahwa siapa yang memberikan jabatan kepada seseorang, padahal ia mengetahui ada yang lebih ahli darinya, berarti ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, hal mengenai prinsip musyawarah dan persaudaraan. Hadis

Nabi s  
lainny

P  
kebutu  
oleh A  
yang s  
baik d  
rapi it  
adaan  
dari t  
umat

sang

ciri k

1. K
2. K
3. K
4. K
5. K

neg  
ben  
zam  
berl  
etni  
apa  
itu,  
dib  
dal  
kep  
pel

- 1.

Nabi saw. mengatakan bahwa seorang muslim adalah saudara yang lainnya.<sup>5</sup>

Pelaksanaan kebaikan dan pencegahan keburukan dan pengaturan kebutuhan umat/rakyat sehari-hari sebagaimana yang dikemukakan oleh Alquran dan sunnah/hadis di atas, tentunya memerlukan wadah yang sangat besar dan terorganisir dengan sangat rapi agar tertata dengan baik dan sempurna. Wadah yang sangat besar dan organisasi yang sangat rapi itulah yang disebut dengan negara (konteks masa kini). Jadi. Keberadaan suatu negara adalah wajib bagi umat/rakyat sebagai konsekwensi dari tuntutan Allah Swt dan Rasulullah saw untuk mengatur dan membina umat.

Dengan demikian, keberadaan negara dalam suatu kondisi apapun sangat diperlukan sekarang ini. Untuk itu, negara harus memiliki ciri-ciri khusus seperti;

1. Keharusan adanya pemimpin.
2. Keharusan adanya rakyat.
3. Keharusan adanya Undang-undang/ideologi.
4. Keharusan adanya wilayah.
5. Keharusan adanya pengakuan dari negara lain.

Namun, bentuk negara yang menjadi keputusan politik dalam suatu negara tidak pernah disebut-sebut dalam Alquran dan Sunnah. Wajar bentuk pemerintahan zaman Rasulullah saw, zaman Khulafa' ar-Rasyidin, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, dan dinasti-dinasti lain berbeda satu dengan yang lainnya. Selain faktor intern kelompok dan etnis, faktor ekstren juga turut mempengaruhi bentuk negara tersebut, apakah lingkungan atau suasana saat itu berlangsung. Oleh karena itu, kewajaran tersebut menjadi semakin penting ketika negara sangat dibutuhkan untuk penegakan ideologi, keadilan dan kemanusiaan dalam konteks kekinian. Hal ini juga menunjukkan bahwa seolah-olah keputusan politik tentang bentuk negara ini diserahkan kepada pelaku-pelakunya yang ada di dalam negara tersebut.

Selanjutnya, ruang lingkup fikih *siyasah* ini terdiri dari empat bagian,

1. Politik perundang-undangan yang mencakup politik penetapan hukum, peradilan, administrasi dan pelaksanaan undang-undang/hukum. Politik perundang-undangan ini berkaitan dengan peraturan



dasar bernegara, bentuk dan batas-batas kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, kewajiban individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

2. Politik luar negeri dalam bentuk hubungan antar negara Islam dan non- Islam, tata cara pergaulan warga negara muslim dan non-muslim di negara Islam, dan hubungan antarnegara Islam dan negara lain, dalam keadaan perang dan damai.
3. Politik moneter atau keuangan yang mengatur keuangan negara, perdagangan, kepentingan orang banyak, sumber-sumber vital negara, dan perbankan.
4. Politik perang serta taktik untuk menghadapi peperangan, termasuk juga jaminan keamanan terhadap tawanan perang dan harta rampasan perang serta usaha menuju perdamaian.<sup>6</sup>

## B. Imamah.

*Imamah* artinya kepemimpinan dan seseorang yang diangkat menjadi pemimpin disebut imam.<sup>7</sup> Dalam bidang politik, imam berarti kepala pemerintahan/ ketua agama yang harus diikuti dan dipatuhi perintahnya selama tidak menyeleweng dari hukum Islam.<sup>8</sup>

Secara definitif *imamah* adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan keduniaan sebagai pengganti fungsi Rasulullah saw. Definisi Ali 'Abd ar-Raziq ini senada dengan definisi yang diberikan oleh at-Taftazami yaitu *imamah* adalah kepemimpinan umum dalam urusan keagamaan dan urusan keduniaan yakni suatu khalifah yang diwarisi dari Nabi.<sup>9</sup>

Dari definisi di atas, dapat ditarik dua macam poin penting bahwa status imam adalah sebagai pengganti Rasulullah saw. dan bertugas memimpin dan mengatur urusan keagamaan dan urusan keduniaan rakyat yang dipimpinnya.

Sebagai pengganti (*khalifah*) Rasulullah saw., maka kepemimpinan seorang imam harus dan paling tidak mendekati cara, model, dan kebijaksanaan umum Rasulullah saw. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar ibn al-Khattab, Khalifah Usman ibn 'Affan, dan Khalifah Ali ibn Abi Talib yang banyak mengikuti kepemimpinan Nabi saw. Meskipun pada masa kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abbas, corak pemerintahan berubah

bentuk d  
monarch  
Rasulu

Dal  
sejajarka  
pada sis  
dan per  
jalannya  
daya ko

Di  
beragam  
berada d  
Untuk i  
politik

Se  
lifahan  
sekali t  
rakatan  
wajib d  
masa m  
Islam y

Pe  
Haikal  
dapat s  
anut si  
persam  
lengga  
moral  
'Imama  
urusan  
adalah

Se  
diken  
lihar  
kepem  
(terlep



bentuk dari sistem pemilihan melalui *bai'ah* dari umat menjadi sistem *monarchi*, kepemimpinan mereka juga dianggap sebagai pengganti Rasulullah saw.

Dalam konsep *imamah* ini juga, seorang imam harus dapat men-sejajarkan antara '*memelihara agama*' di satu sisi dengan mengatur dunia pada sisi lainnya. Artinya, tidak terjadi pemisahan antara peran agama dan peran politik pemerintahan. Agama turut campur dalam proses jalannya pemerintahan sehingga terlihat berjalan seimbang dan sebagai daya kontrol yang ampuh terhadap roda jalannya suatu pemerintahan.

Di kalangan sunni eksistensi *imamah* mempunyai pemikiran yang beragam. Misalnya Abu al-Ala al-Maududi menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan, sedangkan manusia hanya khalifah dan pelaksana. Untuk itu, Islam tidak membedakan antara agama dan politik, serta politik Islam itu bersifat universal yaitu tidak mengenal batas geografis.<sup>10</sup>

Sementara itu, Ali 'Abd ar-Raziq mengatakan bahwa doktrin kekhalifahan sama sekali tidak memiliki dasar dalam agama dan Islam sama sekali tidak ada hubungannya dengan persoalan pemerintahan, kemasyarakatan maupun kehidupan duniawi. Oleh karena itu, sistem kekhalifahan wajib dihapuskan dari sejarah umat Islam dan tidak perlu dibentuk di masa mendatang. Karena sistem itu merupakan bencana bagi umat Islam yang selalu menimbulkan kelalaian, keburukan, dan kerusakan.<sup>11</sup>

Pendapat ar-Raziq yang ekstrim ini disikapi oleh Muhammad Husain Haikal dengan berpendapat bahwa memang di dalam Islam tidak terdapat sistem pemerintahan yang pasti, tetapi Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan apapun asalkan sistem tersebut menjamin persamaan hak antara warga negara, pengelolaan urusan negara diselenggarakan atas prinsip musyawarah, serta berpegang pada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam.<sup>12</sup> Al-Iji menambahkan bahwa '*Imamah* adalah kepemimpinan negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia, tetapi lebih tepat jika dikatakan bahwa *imamah* adalah pengganti Nabi di dalam menegakkan agama.<sup>13</sup>

Sementara itu, di kalangan Syi'ah, eksistensi khalifah ini tidak dikenal dan tidak dianut sampai sekarang. Kaum Syi'ah hanya memelihara konsep dasar yang fundamental tentang doktrin *imamah* sebagai kepemimpinan yang berdimensi spritual dan politis. Imam adalah *ma'sum* (terlepas dari dosa) sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik bagi



komunitas muslim. Orang yang berhak sebenarnya memegang otoritas spritual dan politis setelah Nabi saw. wafat adalah Ali ibn Abi Talib dan keturunannya.<sup>14</sup>

Sampai sekarang umat Islam hidup di bawah berbagai bentuk pemerintahan yang merdeka berdaulat. Bentuk kerajaan atau monarki, seperti Arab Saudi, Jordania, dan Maroko. Bentuk keamiran seperti negara *Quwait*. Bentuk republik seperti *Iraq, Pakistan, Indonesia, dan sebagainya*. Dengan demikian, umat Islam di dunia ini tidak lagi memiliki supremasi politik dan simbol kesatuan model khalifah. Saat ini hanya ada Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang menghimpun beberapa negara Islam atau Muslim dan bukan sebagai suatu negara, melainkan sebagai suatu organisasi yang berupaya memfasilitasi dan melakukan mediasi antara negara-negara Muslim yang menjadi anggotanya.

Al-Mawardi menyebutkan ada dua hak imam yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, jika dipelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *bait al-mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara pantas sesuai kedudukannya sebagai imam.<sup>15</sup> Hak ketiga ini pada masa Abu Bakar diriwayatkan bahwa enam bulan setelah diangkat menjadi Khalifah, Abu Bakar pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian, para sahabat bermusyawarah karena tidak mungkin seorang Khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya.<sup>16</sup> Menurut riwayat lain Abu Bakar digaji negara dengan 200 sampai 2500 dirham.<sup>17</sup>

Hak-hak imam ini erat kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk di taati dan dibantu adalah kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantunya.

Di samping hak yang mereka miliki, imam juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya sebagaimana yang dipaparkan Al-Mawardi dalam *Ahkam as-Sultaniyah*-nya, yaitu antara lain:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat *salaf*.
2. *Mentanfizkan* (menguraikan dan melaksanakan) hukum-hukum di antara orang-orang yang bersaing ketat dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum.

3. Menjaga dan memelihara keamanan.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah.
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup.
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukannya da'wah dengan baik-baik, tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi *kafir zimmi*.
7. Memungut *fa'i* atau sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'* atas dasar *nas* atau *ijtihad* tanpa ragu-ragu.
8. Memberikan gaji kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara wajar dan pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta dan menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugas langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.
11. Berkewajiban menyebarkanluaskan ilmu dan pengetahuan karena kemajuan umat sangat tergantung pada ilmu-ilmu.

Jelasnya, imam harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak-hak azasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, dan hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui jalan yang halal, hak beragama yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

### C. *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*.

*Ahl al-hall wa al-ahkam al-jinayah 'aqd* secara bahasa adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (*Ahlu* adalah orang yang berhak (yang memiliki, *hallu* adalah melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan *aqdi* adalah mengikat, mengadakan transaksi, dan membentuk). Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat (misalnya di parlemen) untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain, memilih Khalifah, Imam, Kepala Negara secara langsung dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.<sup>18</sup>



Dengan kata lain, *ahlu al-halli wa al-aqdi* adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu secara ikhlas, konsekwen, taqwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.<sup>19</sup>

*Ahl al-hall wa al-'aqd* ini merupakan suatu lembaga pemilihan. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Pembentukan *Ahl al-hall wa al-'aqdi* ini dipandang perlu dalam pemerintahan Islam karena banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang cerdas dan tajam sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam yang baik.

Dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga *Ahl al-Hall wa al-Aqdi* pertama sekali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia (Spanyol), Khalifah al-Hakam II (961 - 976 M) membentuk *Majelis Asy-Syurah* yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan Majelis Syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu Khalifah melaksanakan pemerintahan negara.<sup>20</sup>

Alasan terbentuknya *Ahl al-Hall wa al-Aqdi* dikarenakan sebagai berikut, yaitu;

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya, maka harus ada kelompok masyarakat yang dapat diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan perundangan-undangan.
2. Rakyat secara individu tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak berpikir kritis. Tentunya, mereka tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
3. Musyawarah harus bisa dilakukan jika jumlah pesertanya terbatas sebab kalau seluruh rakyat dikumpulkan disuatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak terlaksana.

4. Kew  
ada

pee

5. Kew  
dipi

6. Aja  
Per  
aya

هم

ser

(di

ka

Su

من

كل

le

be

ka

da

ap

Al

ka

A

berpe

al-ikh

calon



4. Kewajiban *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* hanya bisa dilakukan jika ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
5. Kewajiban taat kepada *ulul amri* baru mengikat jika pemimpin itu dipilih lembaga musyawarah.
6. Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan Lembaga Permusyawaratan sebagaimana terdapat dalam surat As-Syura ayat 38 dan Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi;<sup>21</sup>

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

﴿٣٨﴾

Artinya: 38. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ فُظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوهُ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

﴿١٥٩﴾

Artinya: 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Al-Mawardi dalam kitab *Magnum Opusnya Ahkam as-Sultaniyah* berpendapat bahwa sebutan lain dari *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah *ahl al-ikhtiyar* yaitu orang-orang yang berwenang memilih imam dari sejumlah calon imam yang memenuhi persyaratan. Anggota *ahl al-ikhtiyar* ini



yang tidak ditentukan berapa besar jumlahnya, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan:

1. Adil.
2. Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkannya untuk mengetahui siapa yang memenuhi syarat menjadi imam.
3. Mempunyai kearifan dan wawasan yang luas sehingga memungkinkan memilih siapa yang dipandang paling tepat untuk menjadi imam.<sup>22</sup>

Adapun *hak ahl halli wa al-aqdi* ini adalah:

1. Dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat, ia mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.
2. Dalam kedudukannya sebagai anggota majelis, ia mendapatkan hak-hak tertentu, antara lain:
  - a. Mendapatkan fasilitas yang wajar sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota majelis. Misalnya, menempati majelis, rumah jabatan yang dekat dengan tempat bertugas, alat transportasi yang mempercepat sampai ke tempat tugas dan lain-lain.
  - b. Mendapatkan jasa penghidupan dari majelis karena mustahil dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika ia tidak mendapatkan apa-apa dari majelis.
  - c. Mendapatkan pengamanan dari negara karena ia adalah orang penting yang melaksanakan aspirasi rakyat.<sup>23</sup>

Setelah mengetahui hak dari majelis ini, maka mereka juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mengangkat dan memberhentikan khalifah (kepala negara).
2. Mengemban amanat seluruh rakyat, menghasilkan beberapa aspek positif yang bermanfaat bagi penguasa dan rakyat itu sendiri.
3. Bersama khalifah membuat undang-undang yang berisikan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* bagi semua pihak dan menitikberatkan pada *mashlahat* umat.
4. Menetapkan anggaran belanja negara dengan lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Sebagai bahan pertimbangan rancangan anggaran belanja itu diajukan oleh khalifah.

5. Merumuskan kebijakan bernegara
  6. Mengorganisir rakyat
  7. Menetapkan kebijakan dilaksan
  8. Hadir
  9. Turun
  10. Meng
- Setelah
- umum, ma
- ini di sua
1. Dapa
  2. Dapa
  3. Men
  4. Dapa
  5. Men
  6. Dapa
  7. Dapa
  8. Da
  9. Da



5. Merumuskan gagasan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan bernegara sambil menjalankan fungsi pengawasan sosial terhadap penguasa.
6. Mengolah data-data, baik dari petugas khusus atau langsung dari rakyat sendiri. Setiap kasus dan keluhan rakyat harus segera ditanggapi dan ditangani secara khusus.
7. Menetapkan/merumuskan garis-garis besar program yang akan dilaksanakan khalifah.
8. Hadir pada setiap saat dilaksanakannya sidang.
9. Turun ke daerah-daerah untuk meninjau pelaksanaan program pemerintah dan mendapat data-data kehidupan yang sebenarnya pada rakyat banyak.
10. Mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>24</sup>

Setelah mengetahui hak dan kewajiban *ahl al-hall wa al-aqdi* secara umum, maka dapat diambil beberapa hikmah akan keberadaan lembaga ini di suatu negara, antara lain:

1. Dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, baik dalam merencanakan, merumuskan maupun melaksanakan sesuatu karena mendapat orang banyak lebih mendekati kebenaran daripada putusan perorangan.
2. Dapat memilih dan mengangkat pemimpin negara yang tepat dan sesuai dengan aspirasi rakyat.
3. Menghindari perpecahan, permusuhan, dan pertentangan dalam masyarakat.
4. Dapat menyadarkan manusia akan dirinya yang begitu lemah dan mempunyai sifat ketergantungan kepada orang lain.
5. Menghasilkan keputusan adil, lengkap, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
6. Dapat melaksanakan perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya mengenai musyawarah.
7. Dapat mengurangi atau menghilangkan keluhan-kesah yang mendorong pada penyelewengan akibat pikiran yang kurang jernih.
8. Dapat mengikat persatuan dan keadilan sebab di antara anggota majelis ada yang bersifat keras, lemah, emosional dan hati-hati.
9. Dapat melahirkan rasa tanggungjawab bersama.



Al-Mawardi menambahkan bahwa *ahl al-ikhtiyar* harus ini mengetahui dengan benar persyaratan calon imam agar tidak terjadi kekeliruan yaitu:

1. Bersifat adil dengan segala syarat yang berkaitan dengan itu.
2. Berpengetahuan luas yang memungkinkannya dapat mengadakan pertimbangan yang bijaksana dan berijtihad.
3. Sehat pendengaran, penglihatan, dan lisan.
4. Integritas organ fisik sehingga ia dapat bergerak dengan bebas dan tepat.
5. Wawasan yang memadai untuk mempelancar urusan kemasyarakatan.
6. Memiliki keberanian dan kekuatan agar dapat melindungi dan mempertahankan negara dan menyingkirkan musuh.
7. Berasal dari keturunan suku Arab Quraisy.<sup>25</sup>

Syarat terakhir (nomor tujuh) ini yang dikemukakan al-Mawardi ditolak oleh Ibnu Taimiyah sebab sangat bertentangan dengan semangat *egalitarian* (prinsip kesamaan) yang diajarkan Islam. Suatu doktrin bahwa seorang imam tersebut haruslah dari keturunan suku Quraisy hanya berlaku pada periode *Khulafa' ar-Rasyidin* yaitu Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, Khalifah 'Umar, Khalifah 'Usman, dan Khalifah 'Ali.<sup>26</sup>

Setelah terpilihnya imam dari berbagai macam proses seleksi ketat, maka diadakanlah *bai'ah*.<sup>27</sup> Artinya, dalam *bai'ah* terjadi penyerahan hak dan pernyataan ketaatan atau kewajiban pihak pertama secara sukarela kepada pihak kedua, pihak kedua juga punya hak dan kewajiban atas pihak pertama yang diterimanya. Jadi, pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua pihak berlangsung secara timbal balik.

*Bai'ah* tersebut dapat dianalogikan dengan teori '*kontrak sosial*' dalam ilmu politik. Teori ini menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok manusia menyerahkan hak kekuasaan dirinya kepada seseorang atau kepala lembaga yang disepakati. Implikasi teori ini adalah sumber kedaulatan negara berasal dari rakyat dan memperoleh legitimasi melalui kontrak sosial antara dua pihak.

## Catatan

- <sup>1</sup>J. S.
- Rajawali I
- <sup>2</sup>Abd
- Ahl as-Sun
- <sup>3</sup>Wa
- 8, h. 418
- <sup>4</sup>J. S
- Rajawali
- <sup>5</sup>Ibid
- <sup>6</sup>Abd
- van Hoev
- <sup>7</sup>Ibid
- <sup>8</sup>M. A
- Alquan se
- Q.S. 25:
- <sup>9</sup>J. S
- Kata sin
- <sup>10</sup>Ab
- <sup>11</sup>Ibi
- bentukan
- Mustafa
- dan dipu
- <sup>12</sup>Ibi
- <sup>13</sup>Q
- Anas Ma
- <sup>14</sup>J.
- ini dipe
- <sup>15</sup>A
- (Mesir: I
- <sup>16</sup>A
- al-Kutub
- <sup>17</sup>M
- 'Arabi, I
- <sup>18</sup>Ib
- <sup>19</sup>A
- Dalam I
- Oleh Ja
- <sup>20</sup>A
- <sup>21</sup>A
- IV, hal.
- <sup>22</sup>A
- <sup>23</sup>M
- 2006), I
- <sup>24</sup>T
- 1994), I
- <sup>25</sup>Ib

## Catatan:

<sup>1</sup>J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 26.

<sup>2</sup> Abdullah bin Umar bin Sulaiman ad-Dumaiji, *Al-Imamah al-'Uzma' 'inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* (tk.,tpn, 1987), h. 34.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (tt., tpn.:tth.), Jilid ke-8, h. 418).

<sup>4</sup>J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 26.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Abdul Azis Dahlan, Et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid 2, h. 366.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 705.

<sup>8</sup>M. Abdul Mujib, Et al., *Kamus Istilah Fiqih*, h. 120. Imam disebut juga dalam Alquran seperti Q.S.2: 124, Q.S.9: 12, Q.S.11: 17, Q.S. 15: 79, Q.S. 17: 71, Q.S. 21: 73, Q.S. 25: 74, Q.S.28: 41, Q.S. 32: 24, dan Q.S. 36: 12.

<sup>9</sup>J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 45. Kata sinonim dari imamah adalah khilafah dan imarah.

<sup>10</sup>Abdul Azis Dahlan, Et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, h. 369.

<sup>11</sup>*Ibid.* Sistem kekhalifahan berakhir pada tanggal 3 maret 1924 setelah pembentukan negara Nasional Sekuler Republik Turki pada bulan Oktober 1923 oleh Mustafa Kemal Attaturk. Kerena pendapat Ali Abd ar-Raziq tersebut, ia dikucilkan dan diputuskan keluar dari kalangan ulama serta diberhentikan dari jabatannya.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup> Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibnu Taimiyah*. Terjemahan oleh Anas Mahyudin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah* (Bandung: Pustaka, 1983), hal. 50.

<sup>14</sup>J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 47. Doktrin ini dipegang oleh Syiah Imamiyah atau Syi'ah Imam Duabelas (*Isna Asy'ariyah*).

<sup>15</sup> Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyah* (Mesir: Mustafa al-Halbiy, tt), hal. 5.

<sup>16</sup> Abdul Qadir Al-Audah, *Al-Islam wa Audhlu'una Asy-Siyasah* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1952), hal. 189.

<sup>17</sup> Moh. Yusuf Musa, *Nizam al-Hukmi fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1963), hal. 14

<sup>18</sup>*Ibid.* h. 66-67.

<sup>19</sup> Abdul Karim Zaidan, *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam*. Dalam Hamidullah dkk., *Politik Islam; Konsepsi dan Dokumentasi*. Terjemahan Oleh Jamaluddin Kafie (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). H. 147.

<sup>20</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, hal. 1063.

<sup>21</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Van Hoeve), Jilid IV, hal. 1063.

<sup>22</sup>Abdul Azis Dahlan, Et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, h. 205.

<sup>23</sup>M. Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh* (Semarang: Karya Toha Putra, 2006), h. 17.

<sup>24</sup>Tatang Ibrahim dan Muhammad Amrullah, *Fiqh* 3, (Bandung: Armico, 1994), h. 46.

<sup>25</sup>*Ibid.*



<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Bai'ah* adalah ungkapan perjanjian antara dua pihak (dalam hal ini imam dan *ahl al-ikhtiyar*) yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya dan kesetiannya kepada pihak kedua secara ikhlas dalam hal segala urusannya.

Alquran

Ali, Sye

Alusi, S

'Amir, 1

Anis, II

Ansari,

Ar, Ba

Arifin,

Asy'an

'Asqal

Awwa

Ayam

Bahn

Bahu

dua pihak (dalam hal ini imam  
menjual apa yang dimilikinya  
pihak kedua secara ikhlas dalam

## DAFTAR BACAAN

Alquranul Karim

Ali, Syed Ameer. *The Spirit of Islam* (Delhi: Idarah al-Adabiyah, 1978)

Alusi, Syahâb ad-Dîn as-Sa'îd Mahmûd al-. *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsrâ al-Qurân al-'Azîm wa as-Sabâ' al-Masânî* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994)

'Amir, 'Abd al-Azîz . *At-Ta'zîr fî asy-Syarf'ah al-Islâmiyyah* (tt.: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1976)

Anis, Ibrâhîm. *Al-Mu'jam al-Wasît* (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1973)

Ansari, Zakaria al-. *Asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir* (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa Syurahahu, tth.)

Ar, Badr ad-Dîn Citin. *Mausû'ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syurûhuhâ, Sahîh al-Bukhârî Juz 7-8* (Istanbul: Cagri Yayinlari, 1992)

Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Asy'ari, Abû al-Hasan 'Alî ibn Ismâ'îl al-. *Maqâlât al-Islâmiyyîn wa ikhtilâf al-Musallîn* (Mesir: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1969)

'Asqalani, Ahmad ibn 'Alî ibn Hajar al-. *Fath al-Bârî bi Syarh Sahîh al-Bukhârî* (Kairo: Dâr al-Adyân li Turâs, 1987)

Awwa, Muhammad Salîm al-. *Fî Usûl an-Nizâm al-Janâ'î al-Islâm* (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1983)

Ayanin, Adb al-Fath Muhammad Abu al-. *'Uqubah as-Sirqah Fiqh al-Islam* (Kairo: Al-Farmawi, 1983)

Bahnisi, Ahmad Fathî al-. *As-Siyâsah al-Janâ'iyah fî asy-Syarf'ah al-Islâmiyyah* (Kairo: Dâr al-'Urûbah, 1965)

Bahuti, Mansûr ibn Yûnus al-. *Ar-Raud al-Murbi' bi Syarh Zâd al-Mustaqnî* (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1996)



- Bakri, Muhammad bin Umar al-. *Syarah ar-Rahbiyah* (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa Syurakahu, 1349 H)
- Chittick, William C. *A Shiite Anthology* (London: Muhammad Trust of Griat Britain, Northern Ireland, 1980)
- Dahlan, Abdul Azis. Et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Imam", *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999)
- Djazuli, A. *Fikih Jinayah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 107 dan 110.
- Duraini, Muhammad Fathî ad-. *Buhûû Muqâranah fî al-Fiqh al-Islâmî wa Usûluh* (Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1994)
- Fathoni, Muslim. *Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994)
- Hainami, Syahâb ad-Dîn Ahmad ibn Hajar al-. *Hawâsyî Syekh 'Abd al-Hamîd asy-Syarwânî wa Syekh Ahmad ibn Qasîm al-'Âbadî 'alâ Tuhfah li al-Muhtâj Syarh al-Minhâj* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997)
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)
- Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993)
- Hawwa, Sa'îd. *Al-Islâm* (Azhar: Dâr as-Salâm, 1993)
- Ibnu Farhun, Burhân ad-Dîn Abû ar-Rifâ' Ibrâhîm. *Tabsirah al-Hukkâm fî Usûl al-Aqdiyyah wa Manâhij al-Ahkâm* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995)
- Ibnu Hazm, Abû Muhammad Abî ibn Ahmad ibn Sa'îd. *Al-Muhallâ* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth.)
- Ibnu 'Imâd al-Aqfahî, *Al-Irsyâd ilâ mâ Waqa'a fî al-Fiqh wa Gairihi min al-A'dâd* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992)
- Ibnu Khaldun, 'Abd ar-Rahmân *Muqaddimah ibn Khaldûn* (Magribî: Dâr al-Fikr, 1980)

Ibnu Ma

Ibnu Na

Ibnu Qu

Ibrahim

Jamil, S

Jardani

Jarjawi

Jauziy

Jawad

Jaza'in

Kaff, A

Komp

Kutub

Madk

Mais

Mans

- Maragi, Ahmad Mustafâ al-. *Tafsîr al-Marâgî* (Beirut: Dâr al-Fikr, tth.)
- Marginani, Burhân ad-Dîn 'Alî ibn Abî Bakr al-. *Syarah Fath al-Qâdir* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995)
- Mawardi, Abû al-Hasan 'Alî ibn Muhammad ibn Habîb al-. *Al-Ahkâm as-Sultaniyyah wa al-Wilâyah ad-Dîniyyah* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994)
- Mujib, M. Abdul. Et al., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984),
- Musyarafah, 'Atiyyah. *Al-Qâdî fî Islâmî* (tt.: Syarâkâh asy-Syarîq al-Ausât, 1966)
- Nadwi, Alî Ahmad an-. *Al-Qawâ'id al-Fiqiyyah* (Damsyiq: Dâr al-Qalam, 1994)
- Nasa'i, Abû 'Abd ar-Rahmân Ahmad ibn Syu'aib an-. *Kitâb as-Sunan al-Kubrâ* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991)
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1984)
- Nawawi, Yahyâ ibn Syarf ibn Mûrî Hasan ibn Husain ibn Hazm an-. *Sahîh Muslim bi Syarh an-Nawawî* (Kairo: Dâr asy-Sya'b, tth.)
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997)
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Grafindo, 1993)
- Rahardjo. M. Dawam. *Ensiklopedi Alquran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996)
- Razi, Muhammad ibn Abî Bakr ibn 'Abd al-Qadr ar-. *Mukhtâr as-Sahâh* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994)
- Rida, Râsyid. *Al-Khilâfah al-Imâmah al-'Uzmâ'* (Kairo: Matba'ah al-Manâr al-Misriyyah, 1341 H)
- Qal'ahjih, Muhammad Rawwâs. *Mausû'ah Fiqh 'Umar ibn al-Khattâb Radiyallâh 'anh* (tt.: tpn., 1981)
- Qardawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Mutaakhir* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994)

Qutb, Islâm w  
Razi, Fakhr a  
Dâr al-  
Sanhiriy, Muh  
Nahda  
Shadily, Hasa  
Ichtian  
Sidiqi, 'Abd a  
Islâmi  
Sijistani, Abû  
Dâr a  
Suma, Muha  
Prosp  
Suparta, M.  
Putra  
Suyuti, Jalâl  
an-N  
Syah, Ismail  
1992  
Syafi'i, Muh  
Syaibah, Al  
Mus  
Tim  
Syaltut, Ma  
Syaltut, Sy  
Ma  
Syaukani, I  
'alâ  
Tabattaba  
Hus  
Tarifi, Nas  
(Ri



- Qutb, *Islâm wa Daulah* (Araman: tpn., 1982)
- Razi, Fakhr ad-Dîn ar-. *At-Tafsîr al-Kabîr au Mafâtîh al-Gaib* (Beirut: Dâr al-Kutub, 1990)
- Sanhiriyy, Muhammad Ahmad Farj as-. *al-Muskilat* (Mesir: Dar an-Nahdah al-'Arabiyah, 1978)
- Shadily, Hasan. (ed.), "Arab Saudi", *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1992)
- Sidiqi, 'Abd ar-Rahîm. *Al-Jarîmah wa al-'Uqûbah fî asy-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1987)
- Sijistani, Abû Dâud Sulaimân ibn al-Asy'ab as-. *Sunan Abî Dâud* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994)
- Suma, Muhammad Amin et.al., *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek, dan tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)
- Suparta, M. dan Djedjen Zainuddin, *Fiqih* (Semarang: Karya Toha Putra, 2006)
- Suyuti, Jalâl ad-Dîn 'Abd ar-Rahmân ibn Abî Bakr as-. *Al-Asybâh wa an-Nazâ'ir fî al-Furû'* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995)
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Syafi'i, Muhammad Idrîs asy-. *Ar-Risâlah* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1309 H)
- Syaibah, Abû Bakr 'Abdullâh ibn Muhammad ibn Abî. *Al-Kitâb al-Musannaf fî al-Ahâdîs wa al-Asâr* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995)
- Syaltut, Mahmûd. *Al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah* (tt.: Dâr al-Qalam, 1966)
- Syaltut, Syaikh Mahmud dan Syaikh M. Ali al-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
- Syaukani, Mahmûd ibn 'Alî asy-. *Kitâb as-Sail al-Jarâr al-Mutadâfiq 'alâ Hadâ'iq al-Azhâr* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth.)
- Tabattaba'I, Muhammad Husayn. *Shi'ite Islam; Translated by Sayyid Husayn Nasr* (Pakistan: Shi'a Institute of Pakistan, tth.)
- Tarifi, Nasr ibn 'Aqîl ibn Jâr at-. *Al-Qadâ' fî 'Ahdi 'Umar ibn al-Khattâb*, (Riyâd: tpn., 1405 H)

- Tim Redaksi Ensiklopedi Nasional Indonesia, "Pakistan", *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: Delta Pamungkas, 1997)
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)
- Zaidan, Abd al-Karîm. *Al-Wajîz fî Usûl al-Fiqh* (Bagdad: Dâr at-Tauzî' wa an-Nasyr al-Islâmiyyah, 1993)
- Zaidan, Abdul Karim. *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam. Dalam Hamidullah dkk., Politik Islam; Konsepsi dan Dokumentasi. Terjemahan Oleh Jamaluddin Kafie* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* (Damsyîq: Dâr al-Fikr, 1989)



# FIKIH

## Bagian Kedua

### Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyasah



Ali Imran Sinaga, lahir di Medan 7 September 1969 anak dari pasangan Almarhum Drs. H. Abdullah Sinaga dengan Almarhumah Asni Situmorang. Pendidikan dasar diselesaikan di SD Muhammadiyah 17 Medan, Sedangkan Pendidikan menengah dilaluinya di Madrasah Tsanawiyah TPI Medan dan PGAN Medan.

Sarjana Pendidikan Agama Islam diperoleh dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara (1993). Menyelesaikan Magister dan Doktor di Universitas Islam Negeri Jakarta (1997 dan 2005). Sejak tahun 1994 diangkat menjadi dosen dalam mata kuliah Fikih di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara. Selain itu, sejak tahun 1993 juga mengajar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mengasuh mata kuliah Masailul Fikiyah, Al Islam dan Kemuhammadiyah, serta Bisnis Syariah. Karya ilmiah yang dipublikasikan antara lain: Pendidikan Islam dalam Perspektif Pemikiran Umar bin Khattab (1997). Hukuman Ta'zir Ditinjau dari Sudut Pendidikan Islam Umar bin Khattab (2005).

**citapustaka**

**MEDIA PERINTIS**

PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI

Email : [citapustaka@gmail.com](mailto:citapustaka@gmail.com)

Website : <http://www.citapustaka.com>

ISBN 978-602-8826-91-4



9 786028 826914